

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

LAPORAN KEGIATAN

**Bimbingan Teknis Hukum
Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Tahun
2024 bagi
Partai Keadilan Sejahtera**

Bogor, 8 s.d. 11 Mei 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Keadilan Sejahtera mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test.....	7
B.6.3. Acara Pembukaan.....	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner.....	11
D. HAMBATAN	20
E. PENUTUP	20
F. LAMPIRAN	21

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Laporan Keuangan**
- 3. Jadwal Kegiatan**
- 4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
- 5. Bahan Penjelasan Teknis**
- 6. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 7. Panduan Moderator**
- 8. Panduan Narasumber**
- 9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 10. Kumpulan Materi Narasumber**
- 11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 12. Surat Tugas Narasumber dan Moderator**
- 13. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 14. Daftar Hadir Peserta**
- 15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 16. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 17. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
- 18. Daftar Pertanyaan Peserta**
- 19. Tata Tertib Peserta**
- 20. Alur Kegiatan *Offline***

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Senin s.d. Kamis, 8 s.d. 11 Mei 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Keadilan Sejahtera sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;



- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera”.

B.2. Waktu dan Tempat

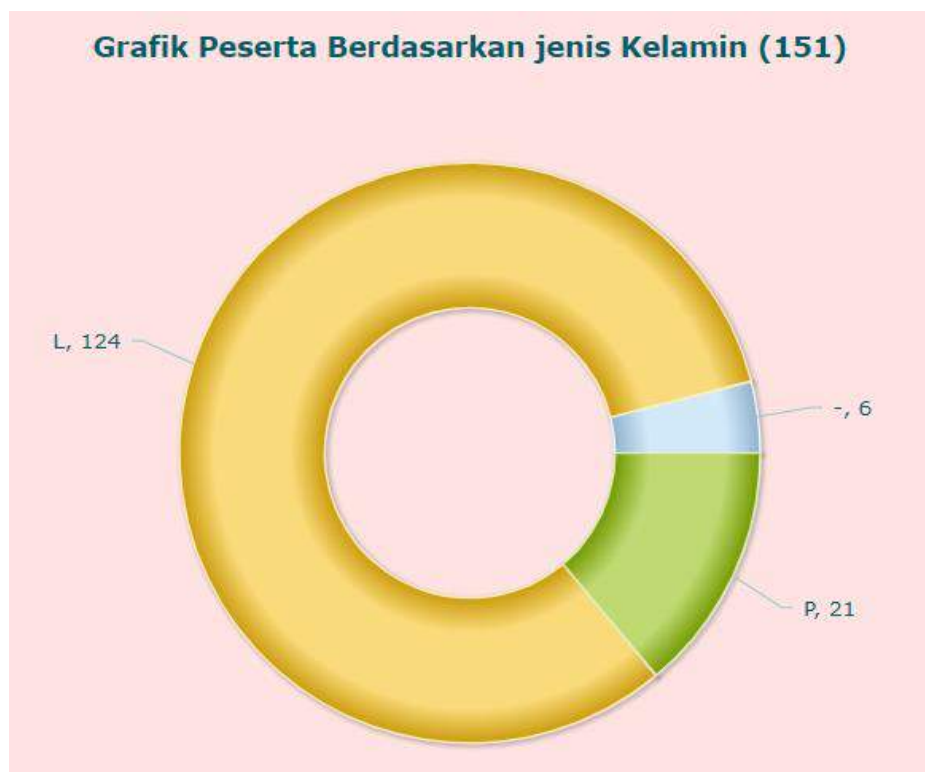
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 8 s.d. 11 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

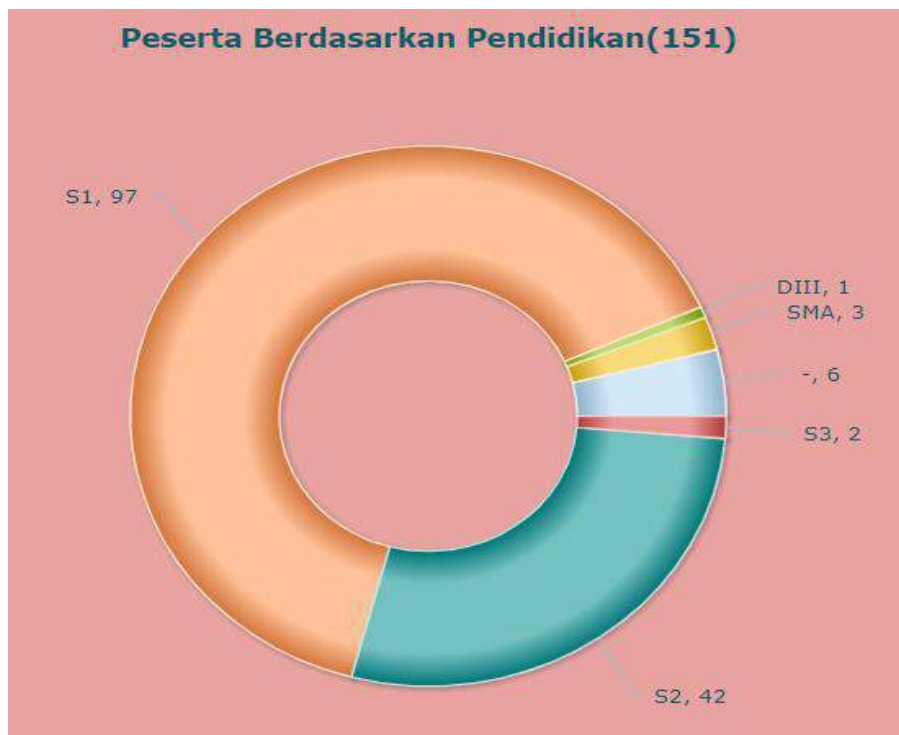
Peserta kegiatan sebanyak 151 orang pengurus dan/atau anggota Partai Keadilan Sejahtera. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera:

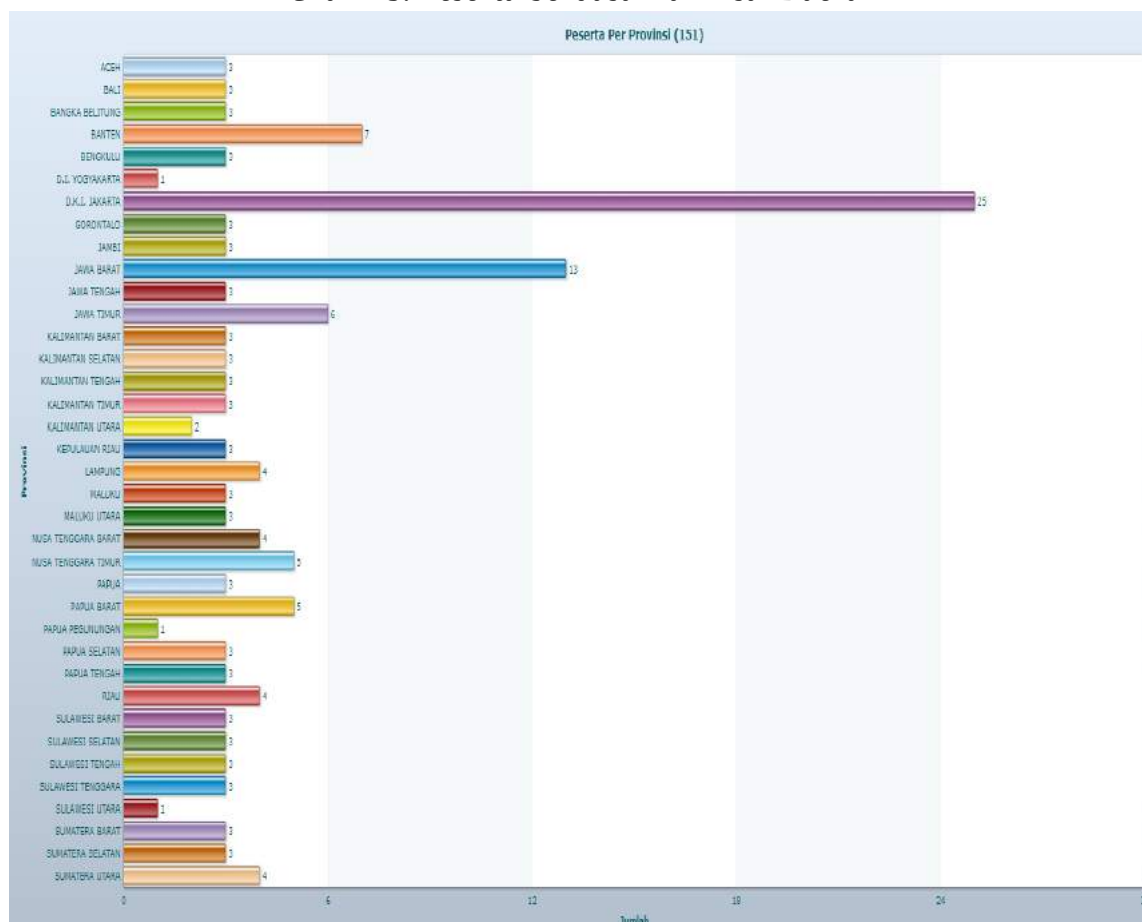
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan**B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta**

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 8 Mei 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 8 Mei 2023 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.



B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 8 Mei 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera, Habib Aboe Bakar Al Habsyi. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Mars Partai Keadilan Sejahtera, Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sambutan Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne Partai Keadilan Sejahtera, Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK serta Asisten Ahli Hakim Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. 2. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Triyono Edy Budhiarto, S.H.
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Taufik Gunanda, S.Kom. 2. Rachman Karim



NO.	MATERI	NARASUMBER
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H. 2. Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H. 3. Oly Viana Agustine. S.H., M.H. 4. Alboin Pasaribu, S.H., M.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 2. Hani Adhani, S.H., M.H. 3. Bisariyadi, S.H., LL.M. 4. Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya,



menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 11 Mei 2023 oleh Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



The background is a vibrant collage of geometric shapes. At the top, there are blue and pink triangular sections. A large, light beige rectangular area with a subtle paper texture is centered, containing the main text. This area is framed by a white border with some segments missing, creating an open, modern look. Various decorative elements are scattered around: a green circle at the top center, a red diagonal line on the right, a red triangle on the right, and several teal circles of different sizes at the bottom right. A red diagonal bar is also visible on the left side.

HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 7,25 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 132 menunjukkan nilai sebesar 1,65648. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,20**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,49 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,46 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,46 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,51 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,48 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,36 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,43 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,53 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,58 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,52 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan**



keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,95 yang tergolong kategori Sangat Baik.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,56 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,52 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,43	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,51	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,51	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,49	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,51	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,43	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,43	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
		2. YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Santhy Kustrihardiani 2. Nanang Subekti	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,46	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,47	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,45	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3.46	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,47	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,52	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,53	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,51	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,48	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,39	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,32	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,36	Baik
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,37	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,49	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,43	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,55	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,52	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,53	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,58	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,57	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,58	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,57	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,46	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan	3,52	Baik
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,95	Sangat Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,56	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,52	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Partai Keadilan Sejahtera. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,20 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,40. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,52 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,52+2,40)/2 = 2,96$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 2,96**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Kurang Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta



setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Perbanyak sesi diskusi;
 - b) Perbanyak sesi praktik dibanding materi yang bersifat teoritik;
 - c) Diadakan *ice breaking* agar peserta tidak jenuh.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Air panas di kamar mandi dapat ditambah kuantitasnya;
 - b) Makanan terlalu banyak karbohidrat sehingga peserta mudah mengantuk;
 - c) Perlu ditambah menu sayur dan buah;
 - d) Posisi colokan listrik di dalam kamar harus di area yang mudah dijangkau;
 - e) Ditambah TV di dalam kamar;
 - f) Jam dinding di dalam kamar rusak;
 - g) Terdapat kamar mandi yang rusak;
 - h) Tempat *coffee break* harus disesuaikan dengan jumlah peserta agar tidak terjadi antrian panjang hanya untuk mengambil *snack*;
 - i) Cahaya di videotron terlalu silau sehingga bisa merusak mata peserta yang duduk di bagian depan;
 - j) Handuk sudah buram;
 - k) Jaringan internet lambat;
 - l) Lorong ruangan grha bau asap rokok;
 - m) Sarana ibadah perlu diperluas dan diperbaiki.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 137 orang dari 151 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis



operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 22 Agustus 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. dan YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Bapak Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Diskusi dan tanya jawab yang dilakukan oleh peserta kepada narasumber.



Peserta melakukan senam pagi.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

LAPORAN KEUANGAN

**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Partai Keadilan Sejahtera
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Sri Astuti A. Kadir dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp 490,737,000
5	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 49,870,080
6	PT Kirana Mitra Utama Perkasa	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 127,850,000
7	Honor Narsum	Honor Narsum	Rp 8,500,000
TOTAL			Rp 676,957,080

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI Keadilan Sejahtera

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 8 s.d. 11 Mei 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Keadilan Sejahtera

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 8 Mei 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an 2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3. Pembacaan Naskah Pancasila 4. Mars Mahkamah Konstitusi 5. Mars PKS 6. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 7. Sambutan Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera 8. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 9. Hymne PKS 10. Hymne Mahkamah Konstitusi 11. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekretaris Jenderal DPP PKS Plt. Sekjen MK	Aula Grha Konstitusi 3

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: YM Hakim Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 9 Mei 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Konsolidasi Internal PKS	Narasumber: PKS	
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam pagi	Panitia	

Rabu, 10 Mei 2023	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 11 Mei 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.15 WIB	<i>Coffee Break</i>		

	10.15 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Wakil Sekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS 3. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik 4. Pembacaan Doa	Plt. Kapusdik Wakil Sekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Bogor, 8 s.d. 11 Mei 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera dapat terselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Keadilan Sejahtera yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Mei 2023

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Biaya Transportasi	15
12. Lain-lain	16
13. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan	: Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir	: • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA • Kepala Biro Kepegawaian MA • Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



Jabatan	: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research Universitas Malaya, Malaysia S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Karir	: • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas • Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas • Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
- S2 – Universitas Tarumanegara
- S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
- S2 – Universitas Sumatera Utara
- S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
 Kelahiran : 9 Juni 1969
 Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
 Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
 Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
 Universitas Jakarta
 S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
 Bisnis
 Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh M Mahkamah Konstitusi K dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 8 s.d. 11 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 8 Mei 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Teks Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Keadilan Sejahtera 5. Pembacaan Ayat Suci Al-Quran 6. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal MK 7. Sambutan Presiden Partai Keadilan Sejahtera 8. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 9. Hymne Partai Keadilan Sejahtera

		10. Hymne Mahkamah Konstitusi 11. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 9 Mei 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 10 Mei 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 11 Mei 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera 3. Sambutan Penutupan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Keadilan Sejahtera, yang terdiri dari:

- 48 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- 102 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD - Para Pihak - Objek Permohonan - Pengajuan Permohonan - Permohonan - Alur Penarikan Kembali Permohonan - Jawaban Termohon - Keterangan Pihak Terkait - Keterangan Bawaslu - Jenis Alat Bukti - Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan - Putusan - Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	- Fungsi dan Kewenangan MK - Struktur dan Mekanisme Kerja MK - Asas-Asas Hukum Acara MK - Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	- Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 - Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring - Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanlanjut Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (Website, <i>Click MK</i> , Media Sosial, dll)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

b. Ketentuan e-sertifikat:

Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.

b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:

- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
- Sandal kamar.
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.

b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.

c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.

d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

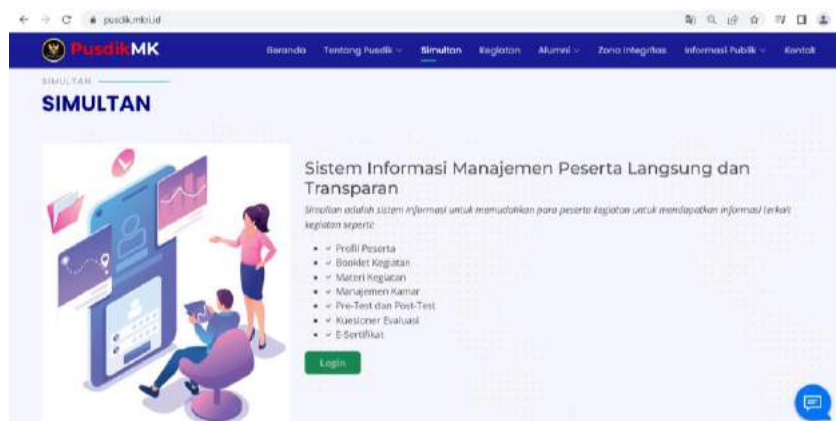
2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

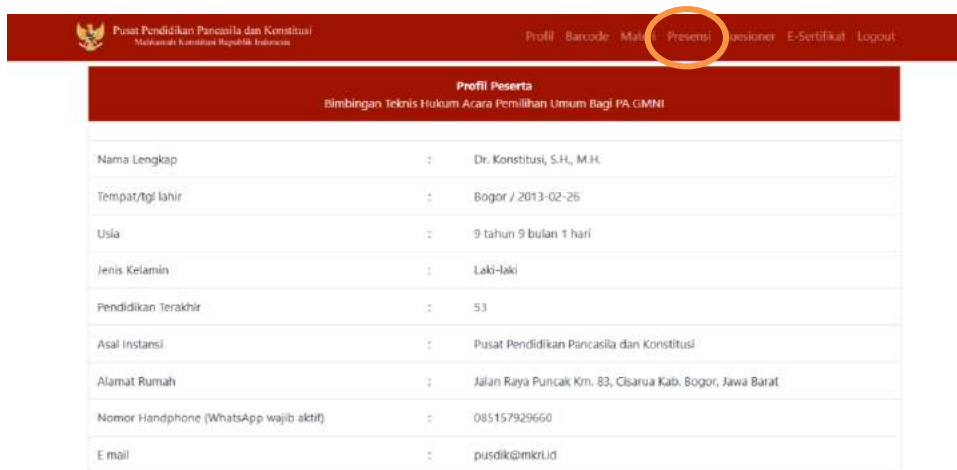
1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.

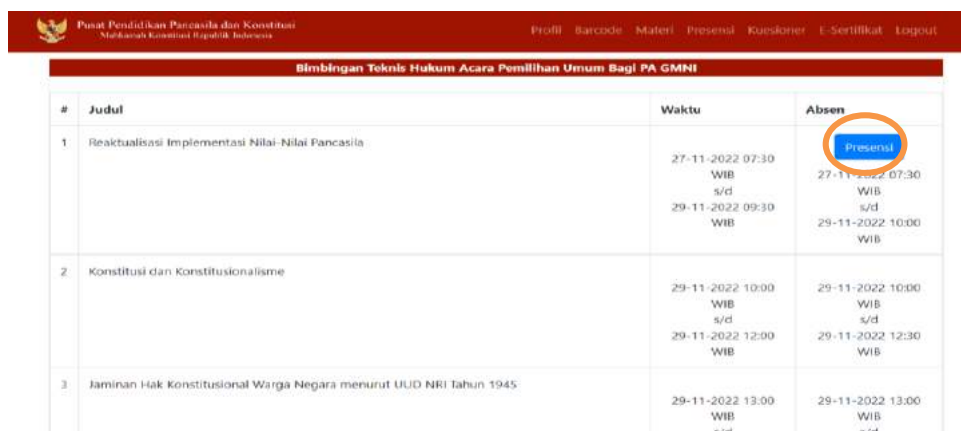


3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



Profil Peserta	
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi PA GMNI	
Nama Lengkap	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	Bogor / 2013-02-26
Usia	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	S3
Asal Instansi	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	085157929660
E mail	pusdik@mkri.id

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
	Nilai Pre Test			6
	Nilai Post Test			0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

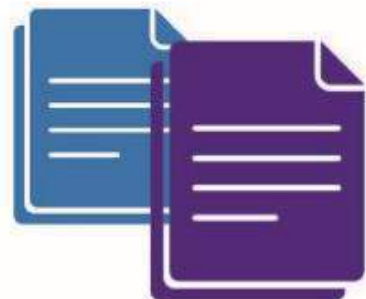
Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3

Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4

Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5

Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Elisabeth, S.E.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **pusdiklat_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **gk3_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username*: **MK-TAMU**, *password*: **Konstitusi123**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai Keadilan
Sejahtera

Senin, 8 Mei 2023



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/@officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/@mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik



Edwin Rivano

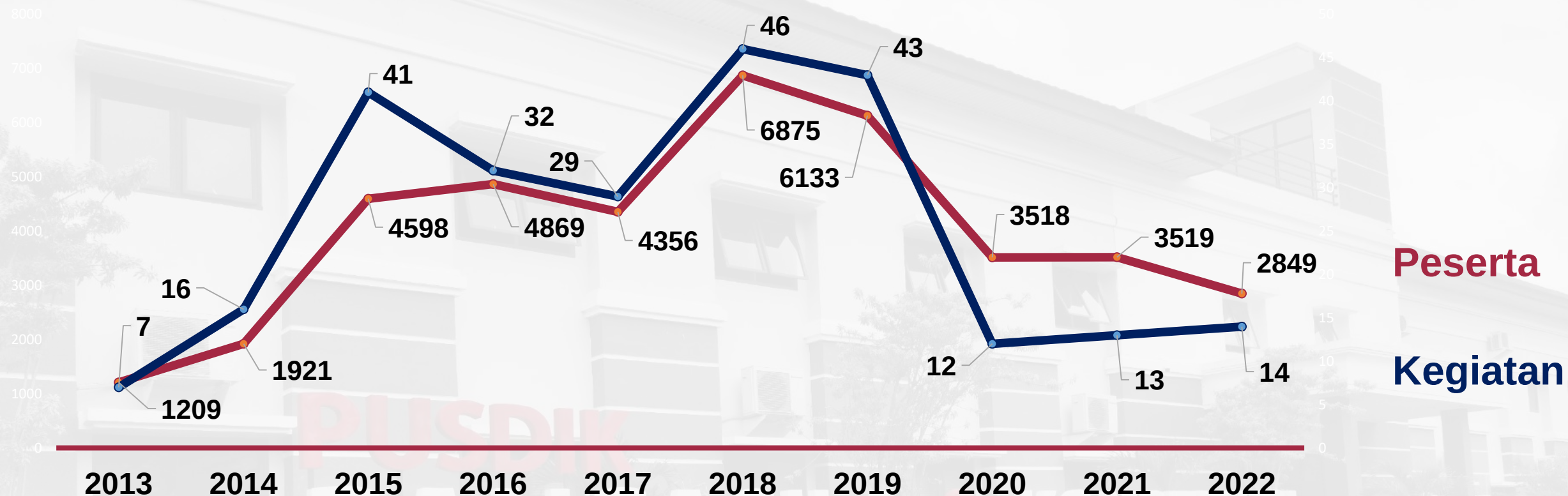


KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **28.078** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **35.654** orang



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu :** Senin s.d. Kamis
8 s.d. 11 Mei 2023
- **Tempat :**
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 8 Mei 2023	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars PKS 5. Pembacaan Ayat Suci Al-Quran 6. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 7. Sambutan Presiden Partai Keadilan Sejahtera 8. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 9. Hymne PKS 10. Hymne Mahkamah Konstitusi 11. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 9 Mei 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda I – Triyono Edy Budhiarto, S.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Konsolidasi Internal Partai Keadilan Sejahtera

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 10 Mei 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 11 Mei 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan Pimpinan PKS 3. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Keadilan Sejahtera, terdiri dari:
 - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
 - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Presiden atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia Partai Keadilan Sejahtera



AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.



PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

❖ **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



FASILITAS DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2



Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2





T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : ***Pusdiklat_MKRI***

Password : ***pusdikmk***

Nama Wi-Fi : ***GK3_PUSDIKLAT***

Password : ***pusdikmkri***

Nama Wi-Fi : ***MK-TAMU***

Password : ***Konstitusi123***



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan **Pre Test** dan **Post Test** secara online dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara online



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



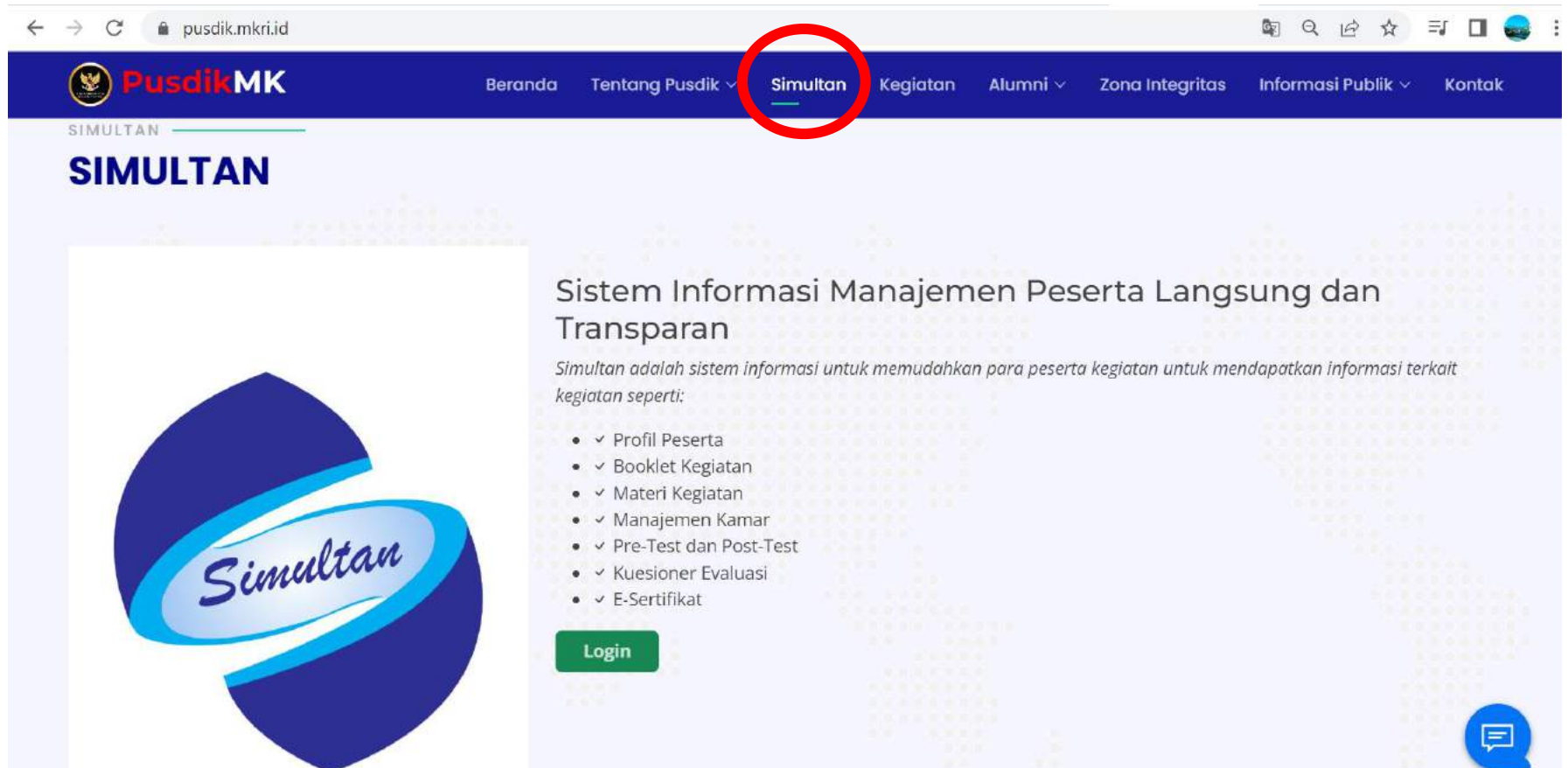
**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**



Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.





Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta



Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK *

Gelar Depan *

Nama Lengkap *

Safira Putri Purnama

Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang *

S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir *

Jakarta

1985-09-26

Jenis Kelamin *

Perempuan

Pendidikan *

S2

Instansi *

Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan *

Programmer Utama

Alamat *

Desa/Kelurahan *

Desa Satiramekar

Provinsi *

D.I.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota *

KOTA JAKARTA TIMUR

HP *

Email *

Update Data

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.



Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom (Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih)
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi Presensi **Kuesioner** Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Klik pada tulisan
“SOAL PRE TEST”



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



**Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan
Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	





SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- ☐ Badan Pengawas Pemilu
- ☐ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- ☐ Komisi Pemilihan Umum
- ☐ Mahkamah Konstitusi
- ☐ Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- ☐ Putusan
- ☐ Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- ☐ Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- ☐ Pengajuan permohonan secara daring (online)
- ☐ Persidangan jarak jauh (video conference)
- ☐ Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- ☒ Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja ***Pre Test*** dan ***Post Test*** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”



Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber





Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	☐	☐	☒	☐
2.	Sistematika Penyajian Materi	☐	☐	☐	☐
3.	Interaksi Dengan Peserta	☐	☐	☐	☐
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	☐	☐	☐	☐

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**





Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

***Seluruh penilaian wajib diisi, kecuali kolom saran dan perbaikan**





Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner

Mengisi Evaluasi kegiatan





Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	☐	☐	☐	☐
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	☐	☐	☐	☐
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	☐	☐	☐	☐
Materi yang paling menarik		Pilih Materi ▼			



Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pementernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk memaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disarankan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Keadilan Sejahtera
Senin s.d. Kamis, 8 s.d. 11 Mei 2023

YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. YM & Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	
2	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	9	55	3,44	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	0	55	3,44	Interaksi dgn peserta Interaksi dgn peserta
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
6	3	3	3	4	4	4	2	2	4	4	3	4	4	4	4	4	0	56	3,50	Suaranya beberapa bikin ngantuk
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81	Secara umum sangat baik, tetapi dalam pemberian materi setiap narasumber alangkah baiknya sesuai dengan file materinya yang tersedia di file.. tidak gabungan anatra narasumber datu denga yang lainnya.
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	peserta sebaiknya lebih tepat waktu agar penerimaan materi bisa maksimal
10	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13	Pengembangan materi yg disampaikan sedikit kurang sehingga terkesan teaks book (teaks materi)
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
12	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	8	53	3,31	
13	3	3	2	3	3	3	2	3	4	4	4	4	3	4	4	3	8	52	3,25	
14	3	2	3	3	2	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3	3	9	45	2,81	pemaparan slide tidak seluruhnya tersampaikan
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	SUDAH SANGAT BAIK MENAMBAH DURASI TANYA JAWAB
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Suara terlalu pelan, diharapkan lebih keras Materi hanya sedikit yang dapat dijelaskan. Diharapkan penyampaiannya tidak berbarengan. Karena isi materi awal mirip.
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	8	51	3,19	Jika satu materi di sampaikan 2 Narasumber agak sulit memberikan penilaian. Sebaiknya 1 materi 1 narasumber
20	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	55	3,44	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	Saran until membahas terkait materi ini baiknya pagi hari
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	60	3,75	Lanjutkan Tingkatkan
26	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50	
27	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Cukup jelas
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	49	3,06	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	8	52	3,25	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	49	3,06	Lebih perbanyak contoh kasus dilapangan, karena berkaitan dengan Hukum acara
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	Mungkin harus sesuai jadwal aja sih agar gak dadakan.. Ruangan peserta mungkin dibuat tempat duduknya sperti stadion.. Agar penglihatan peserta tidak terhalangi dengan peserta lain..
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	Mungkin harus sesuai jadwal aja sih agar gak dadakan.. Ruangan peserta mungkin dibuat tempat duduknya sperti stadion.. Agar penglihatan peserta tidak terhalangi dengan peserta lain..
35	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	
36	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	8	53	3,31	Materi dapat disampaikan dengan metode yang bervariasi sehingga dapat tersampaikan dengan lebih menyenangkan terbi dengan pengalaman dan ilmu pemateri yang sangat luar biasa Materi dapat disampaikan dengan metode yang bervariasi sehingga dapat tersampaikan dengan lebih menyenangkan terbi dengan pengalaman dan ilmu pemateri yang sangat luar biasa
37	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	7	46	2,88	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	9	58	3,63	Mohon pemateri memberikan contoh-contoh aplikatif dlm setiap paparan
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tingkatkan lagi Kalo bisa peserta per daerah di perbanyak jumlah nya
42	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Sudah sangat baik Semakin baik lagi
43	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Sudah sangat baik Semakin baik lagi
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan... Lanjutkan

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	9	57	3,56	mantapks mantapks
48	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	8	56	3,50	
49	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	8	61	3,81	Layar Background terlalu silau cahayanya, sangat mengganggu, mata jadi sakit. Baiknya warna background layarnya yang soft gelap saja jangan yang terang2 karena layarnya sangat besar.
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lanjutkan sisi atau hal-hal positif yang telah dilakukan tingkatkan lagi ketertarikan peserta kepada narasumber
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sebaiknya tidak dipanel dengan narasumber yang lain
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	50	3,13	smoga kedepanya lebih baik lagi MK terbaik
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	semoga kedrpan lebih baik lagi..dan yang paling pentin pada saat sidang PHPU nanti yang bersangkutan sbagai hakim harus netral dan profesioanal
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu bisa diperpanjang dan jumlah peserta yang bertanya diperbanyak
57	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	9	58	3,63	
58	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	Mungkin waktunya bisa ditambah
59	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	Mungkin waktunya bisa ditambah
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Belum ada saran, penyajian materinya sudah sangat baik
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada saran
63	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	Pemanfaatan waktu dalam kegiatan di maksimalkan
64	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	8	56	3,50	
65	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	0	57	3,56	MATERI DISAMPAIKAN DG SANGAT BAIK TERIMA KASIH
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	waktu tanya jawab harus diberikan lebih lama lagi
67	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Sudah cukup
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
73	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	9	59	3,69	sudah baik
74	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	8	56	3,50	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	penyajian materi sangat jelas
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Semoga narasumber sukses selalu
80	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	lebih baik lagi semoga terus menjadi baik
81	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	8	52	3,25	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	all the best
85	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	0	59	3,69	kedepannya lebih banyak alokasi kelas pada praktek pembuatan permohonan
86	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	9	58	3,63	Sering ² dipertemukan dengan YM hakim utk nambah keilmuan dan silaturahmi pencari keadilan. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan utk YM Hakim MK. Aamiin
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tiap kamar ada TV Sarana olahraga penting diadakan
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
90	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	8	54	3,38	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
92	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	9	56	3,50	Sudah baik, dan trus pertahankan
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sdh baik
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	63	3,94	
	3,53	3,51	3,48	3,53	3,43	3,50	3,44	3,50	3,50	3,55	3,53	3,52	3,51	3,40	3,57	3,54			3,50	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Keadilan Sejahtera
Senin s.d. Kamis, 8 s.d. 11 Mei 2023

Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	8	53	3,31	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,81	Tidak ada Tidak ada
4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	8	52	3,25	Ada upaya yg sistematis dan akademis dalam memenuhi semua aturan main pemilu yang menjamin kepastian hukum dan berkeadilan.
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	9	57	3,56	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	keren udah bagus baged
8	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah mantap. saran ke depan, sebaiknya pemateri menguasai materi dan tidak kaku. pemateri pada sesi ini cukup sangat mantap.
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	7	52	3,25	baik, Harap ditingkatkan lagi
12	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	9	54	3,38	Pemaparan materi cukup baik dan harapan ke depannya semua paparan materi bisa dipahami dlm aplikatif berupa contoh nyata
13	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	9	57	3,56	Pertahankan... Lanjutkan... Tingkatkan....
14	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	9	59	3,69	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	layanya terlalu silau/ terang
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semakin baik lagi Sudah baik
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	agar beliau sering dijadikan trainer dalam materi pembekalan ini
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semakin baik lagi Sudah baik
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat Jelas.
22	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	pemateri memberikan sedikit joke-joke berikan joke-joke yang membuat semangat peserta
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	MK perlu berani melakukan terobosan hukum mengingat banyak hal terkait dinamika di masyarakat
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terbaik pematerinya Mantap
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Moderatonya bagus
30	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	8	60	3,75	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah mantap tambahkan mantapnya tingkatkan ketertarikan peserta kepada narasumber
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	sudah sangat baik tidak ada perbaikan
33	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	55	3,44	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	9	50	3,13	Keren
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	62	3,88	Pertahankan yg seperti ini bila perlu di tingkatkan
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	Penyampaian materi sangat bagus, dengan penguasaan panggung dan pelibatan peserta dalam penyampaian materi.
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan Lanjutkan
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik, energik, komunikatif
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	jika sesi tanya jawab sebaiknya waktu nya ditambah karena PKS aktif banyak yang bertanya
42	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	9	58	3,63	terbaik
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	63	3,94	
52	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	Penyampaian materi lebih aplikatif lagi
54	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	9	60	3,75	
55	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Cukup
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	ok ok
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	sudah sangat baik
64	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	8	56	3,50	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	mantap
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga narasumber sukses selalu
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Oke Siip
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Oke Siip
73	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	50	3,13	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	all the best
77	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	59	3,69	lebih di tingkatkan lagi melakukan gams atau hal lain yang dapat menghilangkan kejenuhan peserta
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	TV Sarana olahraga
80	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	8	61	3,81	Bangga bisa sharing ilmu bareng pemuda terbaik bangsa. Terus belajar dan rendah hati. Semoga keberkahan dan kemanfaatan keilmuan bermanfaat utk banyak orang. Aamiin
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat bagus
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	Sudah sangat baik
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,80	3,78	3,73	3,71	3,65	3,66	3,73	3,75	3,71	3,72	3,73	3,67	3,61	3,62	3,73	3,73			3,71	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Keadilan Sejahtera
Senin s.d. Kamis, 8 s.d. 11 Mei 2023

Triyono Edy Budhiarto, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Masih perlu di perpanjang waktunya
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sesi tanya jawab waktunya harus ditambah karena PKS pro aktif dan banyak yang bertanya tapi waktu tidak cukup
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
6	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	sebaiknya, dalam memaparkan terkait hukum acara, baiknya banyak berinteraksi dengan peserta (tidak diam) di tempat) dan banyak memberikan contoh kasus.
7	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2,94	suara pemateri harus bisa lebih diperjelas dalam menyampaikan materi intonasi suara ditinggikan
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah baik Sudah baik
9	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
12	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56	
13	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	7	52	3,25	SUDAH BAIK
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Penyampaian materi agar lebih interaktif
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Pematerinya kurang meriah,serius,membuat mengantuk. Sebaiknya ada games atau joke-joke ringan biar cair suasana
16	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	Saran lebih memperhatikan intonasi atau suara agar tidak datar dari awal hingga akhir
17	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	kopi,air panas dan snacknya seharusnya tetap tersedia selalu selama materi, karena materinya banyak dan panjang jadi ngantuk.
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Interaksi dgn auden kurang cair.. Penyampaian materi terlalu tegang ..🙏🙏
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat jelas dan dapat dipahami.
22	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	8	56	3,50	
23	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Bisa lebih baik lagi jika dalam penyampaian materinya ditingkatkan: variasi dalam menyampaikan materi, interaksi dengan peserta
24	3	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	baik
26	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2,94	Volume Suara Narasumber kurang
27	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	Tidak ada
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sebaiknya tdk monoton teksbook agar tdk membosankan🙏 Lbh inovatif dan komunikatif kedepanya🙏
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	2	3	3	8	50	3,13	Bagus,, buruh intonasi yang agak keren
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	9	60	3,75	Secara umum materi dan penyampaian sudah bagus
34	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	8	56	3,50	
35	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	Intonasi serta selesainya materi yang molor jauh hampir setengah jam
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
39	2	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3	7	40	2,50	
40	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	Lanjutkan 8 Lanjutkan 8
41	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah mantap tambahkan mantapnya perbanyak komunikasi dengan peserta
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Bahasa komunikasinya agak sedikit untuk dipahami
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	50	3,13	top
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Cukup
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	Terimakasih
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	Baik Baik

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	7	48	3,00	kurang interaktif dan datar,sehingga perlu variasi dan suara yg lebih keras
58	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
59	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat jelas
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga narasumber sukses selalu
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	49	3,06	
67	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3,19	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	TV Olahraga
70	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	8	53	3,31	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	7	50	3,13	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	56	3,50	
74	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	tingkatkan lagi lakukan gams, yel-yel atau kegiatan lain yang dapat menghilangkan kejenuhan peserta, sehingga peserta bisa semangat lagi
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sdh baik
76	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	8	57	3,56	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	62	3,88	
	3,31	3,27	3,30	3,31	3,35	3,34	3,21	3,32	3,42	3,49	3,45	3,42	3,39	3,32	3,43	3,43			3,36	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Keadilan Sejahtera
Senin s.d. Kamis, 8 s.d. 11 Mei 2023

Taufik Gunanda, S.Kom. & Rachman Karim

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	8	57	3,56	
3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	59	3,69	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	terlalu kalem, harus semangat ketika jadi nara sumber untu PKS
5	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	8	51	3,19	Untuk menunjang peradilan yang efisein dan berbiaya murah, pemanfaatan IT menjadi suatu keharusan. Selalu mengupgrde perkembangan teknologi IT untuk MK yang lebih baik.
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	sudah baik sudah baik
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
8	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	45	2,81	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Materinya serius,membuat ngantuk.Mohon diselang-selingi games atau guraun ringan sehingga membuat suasana lebih segar..
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	8	47	2,94	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Sebaiknya libatkan peserta untuk langsung mencoba pembuatan akun hingga pengajuan permohonan. Langsung praktik penggunaan aplikasi
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat mudah dimengerti dan mudah pula untuk dipraktekkan apa yang dijelaskan oleh pemateri.
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	51	3,19	Tidak ada Tidak ada
16	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	4	4	3	4	4	7	53	3,31	Pemateri harus lebih semangat membawakan materi, biar peserta lebih bersemangat mengikuti pemaparan materi
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
18	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	60	3,75	intonasi suaranya terlalu rendah dan datar, harus lebih dinamis
19	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	6	46	2,88	saran : agar materi terkait dengan materi sistem informasi penanganan perkara elektronik terutama praktek yang disampaikan khusus dibahas dalam 1 hari pembelajaran termasuk praktek didalamnya tidak dalam waktu lebih kurang 2,5 jam
20	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	7	55	3,44	
21	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	46	2,88	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah baik Sudah baik
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Alhamdulillah...Cukup
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah baik Sudah baik
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah mantap tambahkan mantapnya komunikasi aktif dengan peserta
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Cukup
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mohon jangan terlalu cepat cara penyampaianya
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	Baik Baik
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	59	3,69	Secara umum cukup baik
39	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	8	57	3,56	cukup baik
40	3	4	2	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	7	58	3,63	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	keren mantab
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	baik
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga narasumber sukses selalu
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	8	59	3,69	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lanjutkan lanjutkan
58	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	Bagi pemateri agar suara lebih diangkat, bagi saya peserta dari timur kurang jelas mendengarkan penjelasan materi
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	49	3,06	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tingkatkan👍👍👍
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
64	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	59	3,69	lebih di tingkatkan lagi melakukan gams, yel yel atau kegiatan lain yang dapat menghilangkan kejenuhan peserta.
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	8	53	3,31	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tv Alat Olahraga
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
68	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	52	3,25	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	62	3,88	
70	3	2	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	7	51	3,19	
71	2	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	3	2	6	40	2,50	
	3,28	3,25	3,20	3,27	3,31	3,31	3,27	3,35	3,41	3,44	3,35	3,37	3,34	3,32	3,41	3,34			3,33	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Keadilan Sejahtera
Senin s.d. Kamis, 8 s.d. 11 Mei 2023

Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga lebih memberikan informasi yg berguna bagi peserta trik berperkara di MK
2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	8	56	3,50	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sebaiknya tidak terlalu teksbook agar tdk monoton dan bikin jenuh 🙏 Lebih dinamis,bervariasi,inovatif serta komunikatif 🙏
4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	8	53	3,31	lebih banyak jam untuk pratek pembuatan permohonan dan hal hal lain yang berkenaan dengan penyelesaian perselisihan di MK
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	9	53	3,31	Lebih keprakteknya biar lebih jelas
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
14	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	8	59	3,69	sangat baik tetapi mohon untuk materi dipisahkan untuk pemohon dan pihak terkait. ketika dicampur sedikit membingungkan. terimakasih
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah mantap.
17	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
18	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	61	3,81	Tidak ada Tidak ada
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	
22	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	8	60	3,75	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	8	57	3,56	Sudah baik Semoga semakin baik lagi
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Keren, mudah dimengerti,sangat sangat keren Udah mantab baged bapak ini
29	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pemateri interaktif,bagus penyampaianya
31	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat bagus
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah mantap tambah mantap mantap
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga narasumber sukses selalu
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	9	59	3,69	Sudah cukup baik
44	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	cukup
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Cukup
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	49	3,06	
51	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Pemateri baiknya lebih banyak berinteraksi dengan peserta, agar penyampaian lebih menarik..
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	Baik Baik
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	all the best
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	9	54	3,38	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tv Alat Olahraga
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	9	57	3,56	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sdh baik
62	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	7	54	3,38	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
64	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	lebih di tingkatkan lagi melakukan gams, yel-yel atau kegiatan lainnya yang dapat menghilangkan kejenuhan peserta
65	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	8	59	3,69	
	3,55	3,52	3,48	3,52	3,51	3,46	3,52	3,46	3,52	3,55	3,58	3,49	3,54	3,48	3,58	3,57			3,52	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Keadilan Sejahtera
Senin s.d. Kamis, 8 s.d. 11 Mei 2023

Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H., Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H., Oly Viana Agustine, S.H., M.H., Alboin Pasaribu, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	8	57	3,56	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	materi menarik dan bagus
11	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	8	52	3,25	Harus sabar dalam membimbing dan mengarahkan peserta bimtek.
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	jelas dan padat
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah baik Sudah baik semoga semakin baik lagi
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mantap mantap
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	8	60	3,75	Sudah cukup baik
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga narasumber sukses selalu
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
30	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	57	3,56	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah bagus
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	49	3,06	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tv ruang tamu Alat olahraga
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	cukup
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	all the best
57	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	9	55	3,44	Mantap Mantap
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	9	54	3,38	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
61	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
62	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	8	55	3,44	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	8	51	3,19	
64	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	59	3,69	lebih di tingkatkan lagi melakukan gams, yel-yel atau kegiatan lainnya agar agar menghilangkan kejenuhan peserta
65	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,48	3,45	3,59	3,55	3,55	3,53	3,55	3,50	3,59	3,62	3,61	3,52	3,52	3,53	3,53	3,59			3,54	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Keadilan Sejahtera
Senin s.d. Kamis, 8 s.d. 11 Mei 2023

Bisariyadi, S.H., LL.M., Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H., Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si., & Hani Adhani, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	8	56	3,50	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	penjelasan materinya sangat bagus
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga narasumber sukses selalu
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	materi bagus,penyampaian interaktif. Sebainya ada games dan joke yang menyegarkan
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	materi bagus,penyampaian interaktif. Sebainya ada games dan joke yang menyegarkan
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
16	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
23	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
24	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	Terima kasih atas bimbingannya selama bimtek.
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah keren makin keren mantap
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3,69	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	49	3,06	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lebih SEMANGAT lagi untuk ngisi materinya
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	0	56	3,50	sudah sangt baik
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	9	56	3,50	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Terus tingkatan Terus berinovasi
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	TV tamu Alat Olahraga
52	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	58	3,63	
53	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	7	53	3,31	Posisi kelas room kurang pas, utk diskusi dan fokus ajar Semoga kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan menyertai seluruh staff MK. Aamiin
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	9	56	3,50	lanjutkan terus berbuat baik
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sdh baik
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
60	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	8	57	3,56	Luar biasa... Pertahankan.
61	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
62	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	lebih di tingkatan lagi melakukan gams, yel-yel atau kegiatan lainnya agar dapat menghilangkan kejenuhan para peserta, sehingga peserta lebih fokus lagi
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
65	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	9	61	3,81	Sudah baik Semoga semakin baik lagi.
	3,55	3,48	3,57	3,49	3,52	3,55	3,54	3,54	3,58	3,63	3,55	3,49	3,48	3,46	3,51	3,52			3,53	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Keadilan Sejahtera
Senin s.d. Kamis, 8 s.d. 11 Mei 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
2	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	sdh bagus
3	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	perbanyak sesi diskusi dibanding materi 1 arah kegiatan praktik lebih di intensifkan
4	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
5	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Kamar 338 dan 340 gedung 5 sering kehabisan air mandi mohon di perbaiki, makanan terlalu banyak karbohidrat sehingga sering mengantuk dan membuat konsentrasi berkurang, saran perbaikan menu makanan dan ada ahli gizi yang bisa membantu dalam menu yang terbaik untuk acara seperti ini. Menu murah dan meyeatkan
6	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	mantap mantap mantap
7	4	4	4	12	4	4	4	12	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Suhardi	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	3	7	79	3,76	Saran untuk setiap kamar di cek terkait kondisi fasilitasnya. Seperti di kamar 124 graha 4 kamar mandinya rembes sehingga ada air yang terus jatuh dan jadi kotor. Colokan listrik di kamar sulit untuk digunakan. Jaringan internet dikamar sering tidak terjangkau
8	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
9	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
10	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	
11	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	
12	4	4	4	12	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	3	7	68	3,24	
13	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	1	4	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	68	3,24	Pengajar teknik penyusunan seharusnya Hakim MK langsung Perlu diperbanyak stop kontak listrik di kamar
14	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
15	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Air di kamar mandi kadang mati.. Charger untuk elektronik mohon di tambah Sarana ibadah mohon diperluas karena kadang jamaah melebihi kapasitas
16	3	4	3	10	4	4	4	12	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	3	7	77	3,67	Lebih banyak praktek dan eveluasi personal Mengurangi materi yang bersifat teoritik 1.Posisi duduk dibuat perwilayah, biar bisa sambil mendiskusikan, hal-hal yang terjadi di lapangan, dan bisa didiskusikan kembali. 2. Kalau bisa soal Pretest dan Post test berbeda

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
17	3	3	3	9	3	3	3	9	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Harapannya kedepan ada simulasi ber perkara Mahkamah konstitusi Praktek persidangan di Mahkamah konstitusi Tempat duduk peserta di aula dibuat kursi seperti di stadion agar peserta tidak terhalang pandangannya dan tentu harapan nya peserta tidak tidur saat materi
18	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
19	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	4	7	3	3	6	64	3,05	Kamar 128 dan 140 air kamar mandi sering mati Menu makan yang disediakan terlalu banyak karbohidrat bikin ngantuk, sebaiknya diperbanyak sayur, buah, dan protein
20	3	4	3	10	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3,24	Kren MK
21	4	4	4	12	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	4	3	4	11	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
22	4	3	4	11	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	4	3	10	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	75	3,57	Kesediaan air baik dingin / panas utk bisa di kelolah dengan baik. Sering² undangan Bimtek utk kordinasi, silaturahmi dan sharing ilmu dengan pencariin keadilan Tim terbaik yg pernah aku jumpai. Semoga Allah Subhanahu Wataalla membalas dengan segala kebaikan dunia akhirat.
23	4	4	3	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3,76	Tingkatkan lagi pelayanan yg sudah baik agar lebih baik
24	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
25	3	3	4	10	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	65	3,10	Musholah di perbaiki serta perluas Kren MK Tambah profesional
26	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
27	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Jam dinding di kamarnya rusak Semuanya bagus dan mantab semoga kedepannya bisa lebih baik
28	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	3	3	6	3	4	7	3	3	6	4	4	8	78	3,71	Sudah cukup bagus, usulan, ada baiknya pemberian peringatan acara akan dimulai lebih kurang 20 menit sebelumnya. Karena terkadang peserta, tidak melihat jam dan masih bersantai dengan kegiatannya.
29	4	4	4	12	4	4	4	12	Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
30	3	4	3	10	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	72	3,43	
31	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
33	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
34	3	3	3	9	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	3	7	67	3,19	
35	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Air panas gak nyala

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
36	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	terus tingkatkan
37	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Cukup Cukup Cukup
38	4	4	4	12	3	3	4	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
39	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	air di kamar mandi sempat macet..mohon kedepan bisa di perbaiki
40	4	4	4	12	4	4	4	12	Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Sdh baik
41	3	3	4	10	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	sdh ok dan perlu tetap perbaiki
42	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	0	4	74	3,52	untuk coffee break tempatnya hrs disesuaikan dengan jumlah peserta, selama ini antrian panjang hanya untuk ambil minuman dan makanan, sehingga wkt tdk cukup
43	3	3	4	10	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
44	2	3	3	8	2	2	2	6	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	2	4	6	2	4	4	10	4	2	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	2	6	66	3,14	Tolong perhatikan dan perbaiki Musholla dan diperluas
45	3	3	3	9	3	3	3	9	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
46	3	3	3	9	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Untuk kejelasan suara penyampaian materi baiknya semua narasumber memastikan suaranya jelas terdengar oleh peserta, misal dengan mendekatkan mic ke mulut.
47	3	3	3	9	3	3	3	9	Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Mantap
48	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
49	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	fasilitas dan kenyamanan musholla ditingkatkan sebaiknya memakai AC dan direnovasi interiornya yg sdh rusak
50	3	3	4	10	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
51	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
52	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	3	7	3	3	6	65	3,10	
53	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
54	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	sangat bagus Sangat bagus sangat bagus
55	3	4	4	11	3	3	4	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	2	5	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	4	7	75	3,57	pilihan pemateri harus yang lebih komunikatif sehingga peserta bisa lebih fokus lagi
56	3	3	4	10	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
57	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	2	3	5	2	2	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	60	2,86	
58	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	69	3,29	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
59	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	3	4	7	3	3	6	3	3	6	70	3,33	kedepannya saya berharap snack dan kopi dapat dibawa ke ruangan kelas ataupun ruangan seminar, agar ketika mengikuti pembelajaran tidak ngantuk air panas di kamar tidak berjalan lancar agar kedepannya dapat diperlancar lagi mengingat air di cisarua sangat dingin sekali pusdik MKRI keren
60	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.		4	4	8	3	4	4	11	3	4	7	3	3	6	4	3	7	3	3	6	3	3	6	70	3,33	Terus ditingkatkan
61	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	80	3,81	videotronnya terlalu silau, merusak mata peserta yg duduk paling depan, sebaiknya dibuat vidio yang warnanya gelap soft, jangan putih karena silau. sebaiknya pasang TV di kamar snacknya dan kopinya kalau masih ada sisa baiknya jangan dirapiin, selama materi berlangsung, dibiarkan dulu aja sampai habis makanan minumannya, karena ikut materi bikin cepet lapar, mikir terus. thanx u
62	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sering sering bimtek
63	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Untuk stop kontak ada 2 perkamar, tp hanya yg bs digunakan 1, sisa yg satunya lagi tertutup dengan kasur yg tidak dpt digeser...mau gak mau penggunaan stop kontak jd bergantian dgn teman sekamar...solusinya sbnrnya klo pun hanya 1 kontak yg dpt digunakan bisa disiasati dgn mnyediakan fitting di stop kontak agar bs digunakan bareng dgn teman sekamar
64	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	3	7	3	4	7	75	3,57	
65	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Semoga Pusdik MK sukses selalu
66	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Tidak ada
67	3	3	3	9	3	3	3	9	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
68	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
69	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3,90	Jaringan internet kadang lelet. Sebaiknya disediakan yg lebih baik.
70	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Tv kamar Alat Olahraga
71	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Semoga bisa lebih baik Semoga lebih baik lagi
72	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
73	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	sukses buat team MK
74	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	3	3	3	9	4	3	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	3	4	7	77	3,67	
75	4	4	4	12	4	4	4	12	Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Saluran toilet menguap ke kamar mandi Cukup sama Sama cukup

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
76	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	colokan di kamar kalau bisa ditambah
77	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	0	3	3	3	6	61	2,90	Air panas utk mandi tidak lancar, panasnya tidak konsisten dan pernah kehabisan air saat mandi, kejadian hari Kamis, 11 Mei 2023 jam 07.30 wib
78	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
79	4	4	4	12	4	4	4	12	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	all the best baju kaos keren reques PDH atau jaket yg bertuliskan MKRI
80	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	71	3,38	
81	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
82	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	
83	3	4	4	11	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	80	3,81	Secara umum pelaksanaan cukup baik
84	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	3	7	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Kamar mandi 1.3 airnya tergenang sepertinya agak tersumbat
85	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Dipertahankan pelayanan yang ada dan lebih ditingkatkan lagi kualitas pelayanan Menambah narasumber dari hakim konstitusi Kurikulum sudah sesuai kebutuhan
86	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Dipertahankan pelayanan yang ada dan lebih ditingkatkan lagi kualitas pelayanan Menambah narasumber dari hakim konstitusi Kurikulum sudah sesuai kebutuhan
87	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
88	4	4	4	12	3	3	3	9	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	3	11	2	3	5	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	75	3,57	Handuk yang tersedia di kamar sudah buram
89	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	3	7	3	2	3	8	3	3	6	4	3	7	3	3	6	3	4	7	4	3	7	72	3,43	
90	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	1	4	61	2,90	Jaringan internet lambat untuk kedepannya mohon diperbaiki
91	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	74	3,52	Cukup
92	3	3	3	9	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	4	7	70	3,33	Lorong ruang di graha 4 penginapan bau asap rokok. Lantai 2 Perlu ada lapangan bulutangkis atau kolam renang.
93	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Pembelajaran disisipi agenda-agenda game dan lain-lain untuk membangkitkan semangat dan fokus peserta dalam pemaparan materi Modul pembelajaran dijadikan dalam satu file untuk mudah dibaca dan pelajari
94	3	3	3	9	3	2	3	8	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	2	3	5	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	2	3	5	3	3	6	59	2,81	
95	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
96	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Colokan utk di kamar ditambah buat nge cash hp

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
97	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	kegiatannya menarik
98	3	3	4	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	4	4	4	12	4	2	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	4	4	8	74	3,52	
99	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
100	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	2	1	3	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	60	2,86	
101	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	Agar kamar dilengkapi colokan listrik
102	4	4	4	12	4	3	4	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
103	3	3	3	9	3	3	3	9	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	2	5	3	3	3	9	4	4	8	2	4	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	68	3,24	Ada acara yg bersifat dinamik kelompok yang berkaitan dgn materi dan tujuan yang bisa menimbulkan kesan
104	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	3	7	73	3,48	Presentasi juga perlu dibuatkan simulasi untuk hal-hal yang teknis di kamar perlu diperhatikan keperluan sarana untuk mengisi daya listrik, karena di beberapa kamar sarana tersebut tidak bisa digunakan dengan baik karena penempatannya tidak tepat di belakang tempat tidur Konsumsi buah perlu diperbanyak
105	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Secara umum sangat bagus Hanya saja beberapa pemateri kurang memuaskan dalam memberikan penjelasan, tapi itu wajar mengingat sempit waktu dan begitu antusiasnya peserta Secara umum kami memberikan apresiasi dan sangat terkesan kepada penyelenggara dalam memberikan pelayanan.
106	4	4	4	12	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	77	3,67	Sudah baik Semoga semakin baik lagi Terimakasih atas pelayanan, perhatian dan kebaikannya.
107	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
108	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Menu makan cukup bagus dan fareaktif tapi rasanya terlalu asin. Ucapan terimakasih yg sebesar2nya buat panitia penyelenggara dan permohonan maaf dari kami dari peserta.
109	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	4	7	3	4	4	11	3	3	6	3	4	7	3	3	6	4	3	7	4	4	8	72	3,43	Loudspeaker kurang jernih suaranya di grha 4 sehingga suara tidak terdengar jelas Tolong tambahkan lalapan segar khas lokal pada menu makan siang atau malam Terima kasih atas pelayanan selama mengikuti Bimtek
110	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Menu makan cukup bagus dan fareaktif tapi rasanya terlalu asin. Ucapan terimakasih yg sebesar2nya buat panitia penyelenggara dan permohonan maaf dari kami dari peserta.
111	4	4	4	12	3	3	4	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	78	3,71	Narasumber ada yg kurang komunikatif dan banyak duduk sehingga membuat peserta ngantuk Makanan harus variatif khususnya lauk ayam bisa diselingi dgn ikan bakar, cumi goreng dan lainnya
112	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
113	4	4	4	12	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	77	3,67	Sudah baik Semoga semakin baik lagi Terimakasih atas pelayanan, perhatian dan kebaikannya.
114	4	4	4	12	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	77	3,67	Sudah baik Semoga semakin baik lagi Terimakasih atas pelayanan, perhatian dan kebaikannya.
115	3	3	3	9	3	3	3	9	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Ada kegiatan dinamika kelompok atau praktek yang berkaitan dgn Materi agar membekas
	3,43	3,51	3,51	3,49	3,51	3,43	3,43	3,46			3,47	3,45	3,46	3,47	3,52	3,53	3,51	3,39	3,32	3,36	3,37	3,49	3,43	3,55	3,52	3,53	3,58	3,57	3,58	3,57	3,46	3,52	76,62	3,48	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024

Oleh:

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD

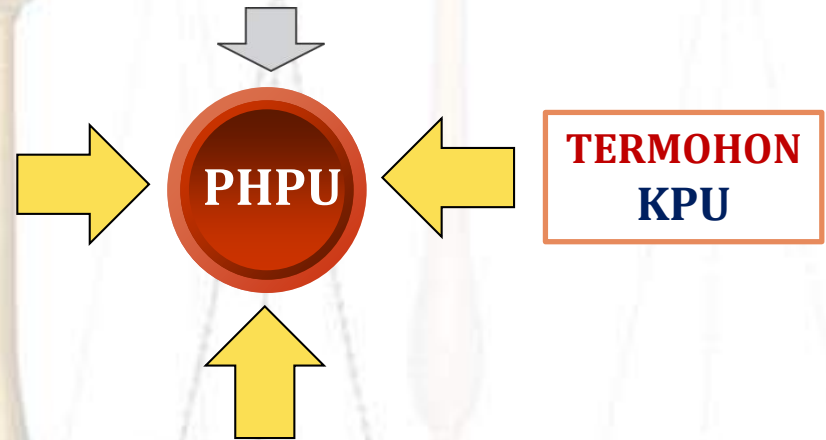


PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**terpilihnya Pemohon
sebagai anggota
DPR dan DPRD**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

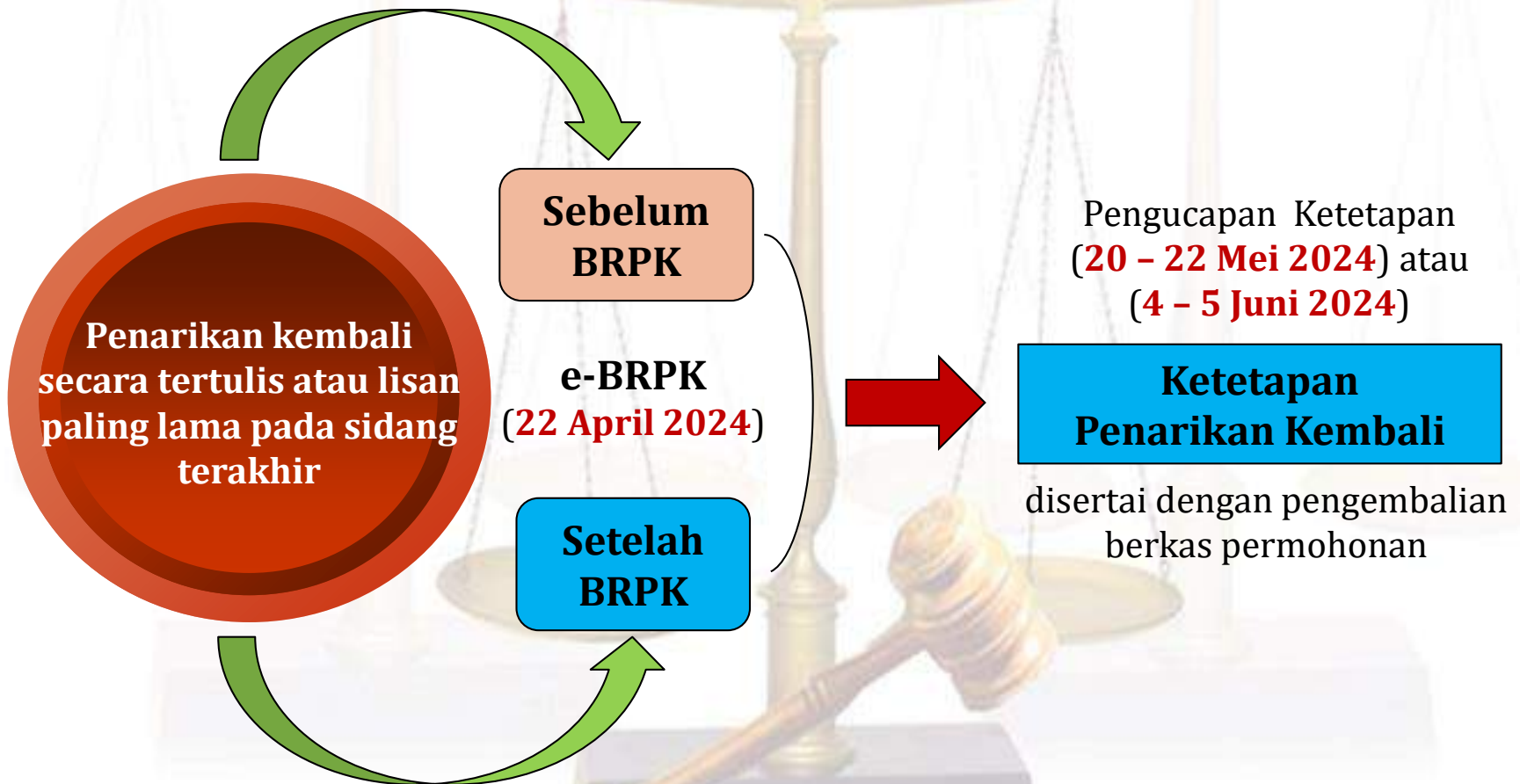
PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

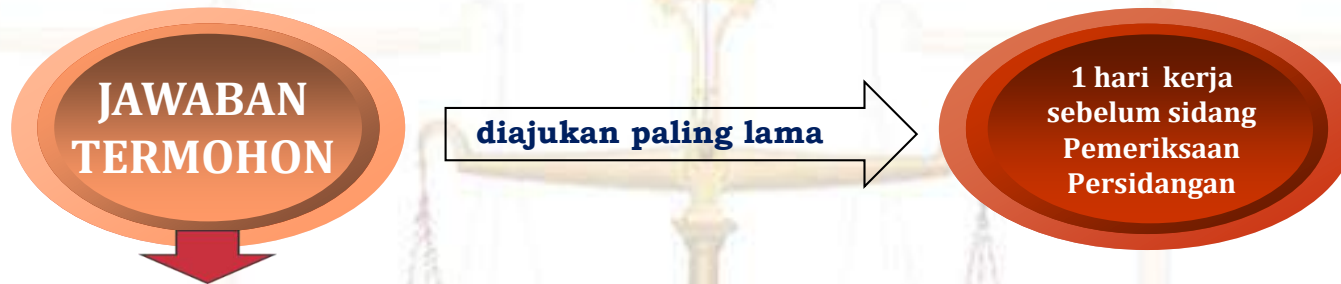
Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT



1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024

Oleh:

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (tujuh) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

ALAT BUKTI (PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD)

(Surat atau Tulisan)

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

Alat bukti keterangan para pihak (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

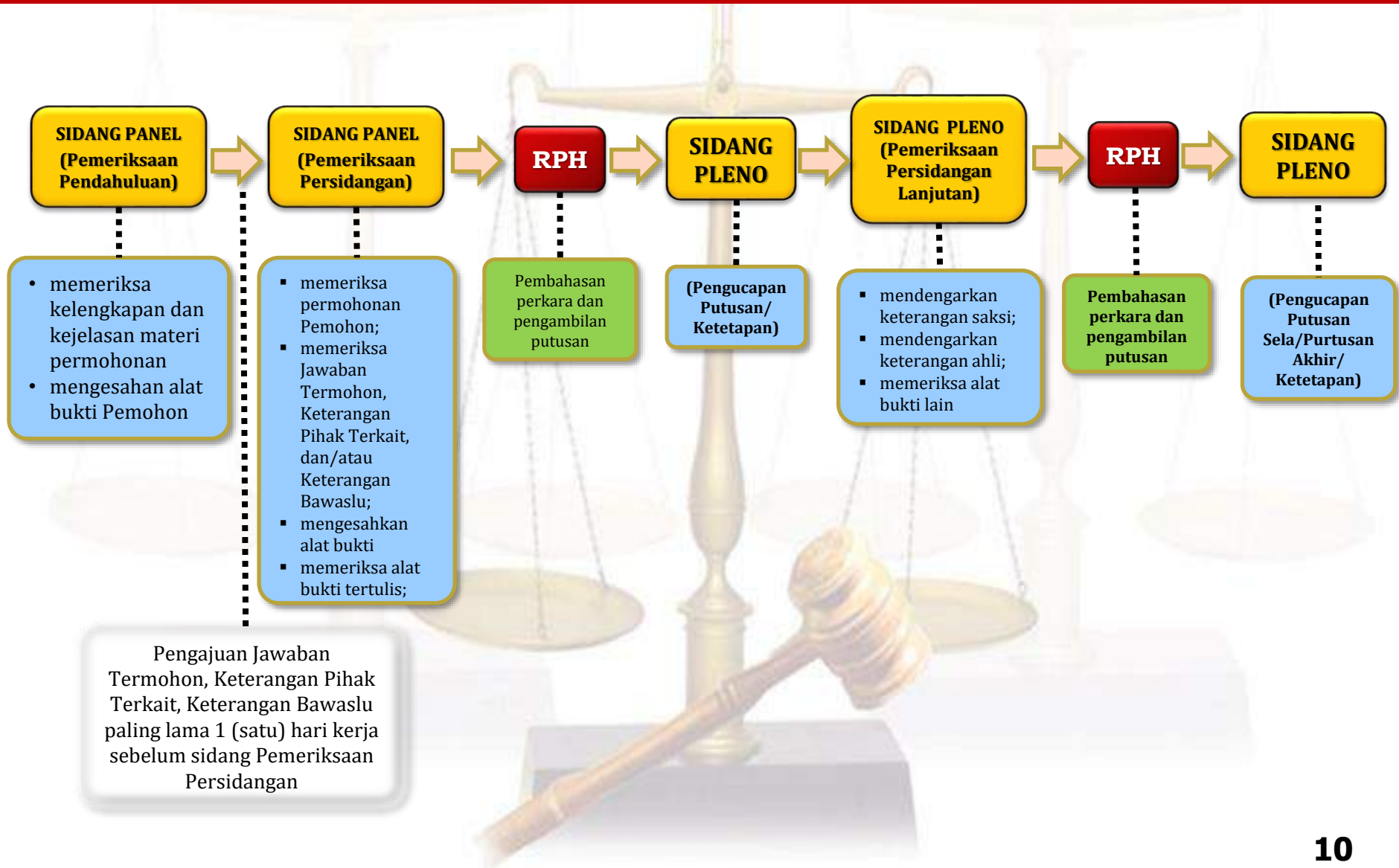
Lanjutan ...

Alat bukti keterangan pihak lain, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

Alat bukti lain, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

Alat bukti petunjuk, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan

Putusan Mahkamah, vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam e-BRPK, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam Sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Lanjutan ...

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan dalam jangka waktu **paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

“MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM”

Oleh:

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
Asisten Ahli Hakim Konstitusi**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI**

Materi Pemaparan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Struktur dan Mekanisme Kerja

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Perkembangan dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi

Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat**
Marbury v Madison
(1803)

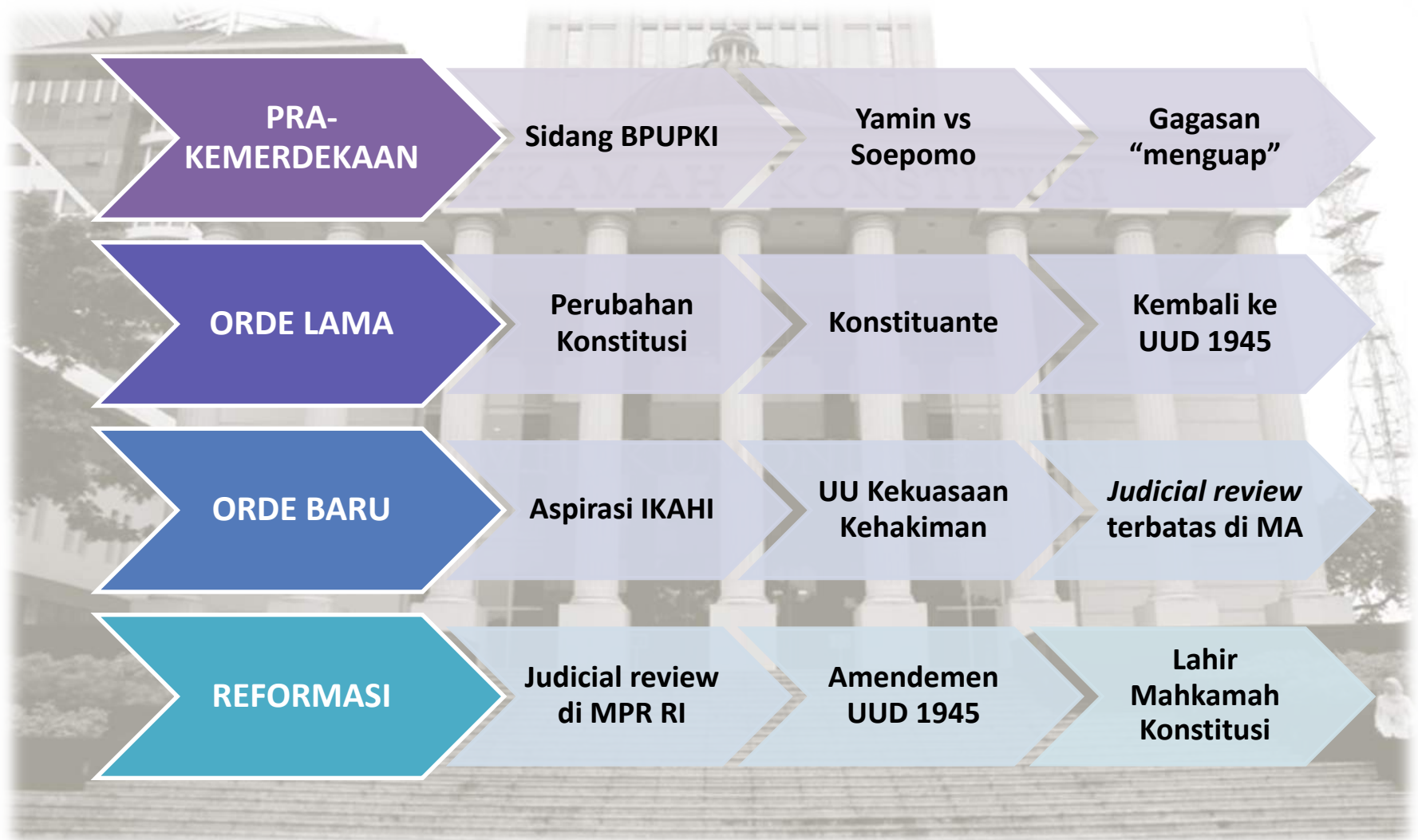


**Mahkamah
Konstitusi Austria**
(1920)

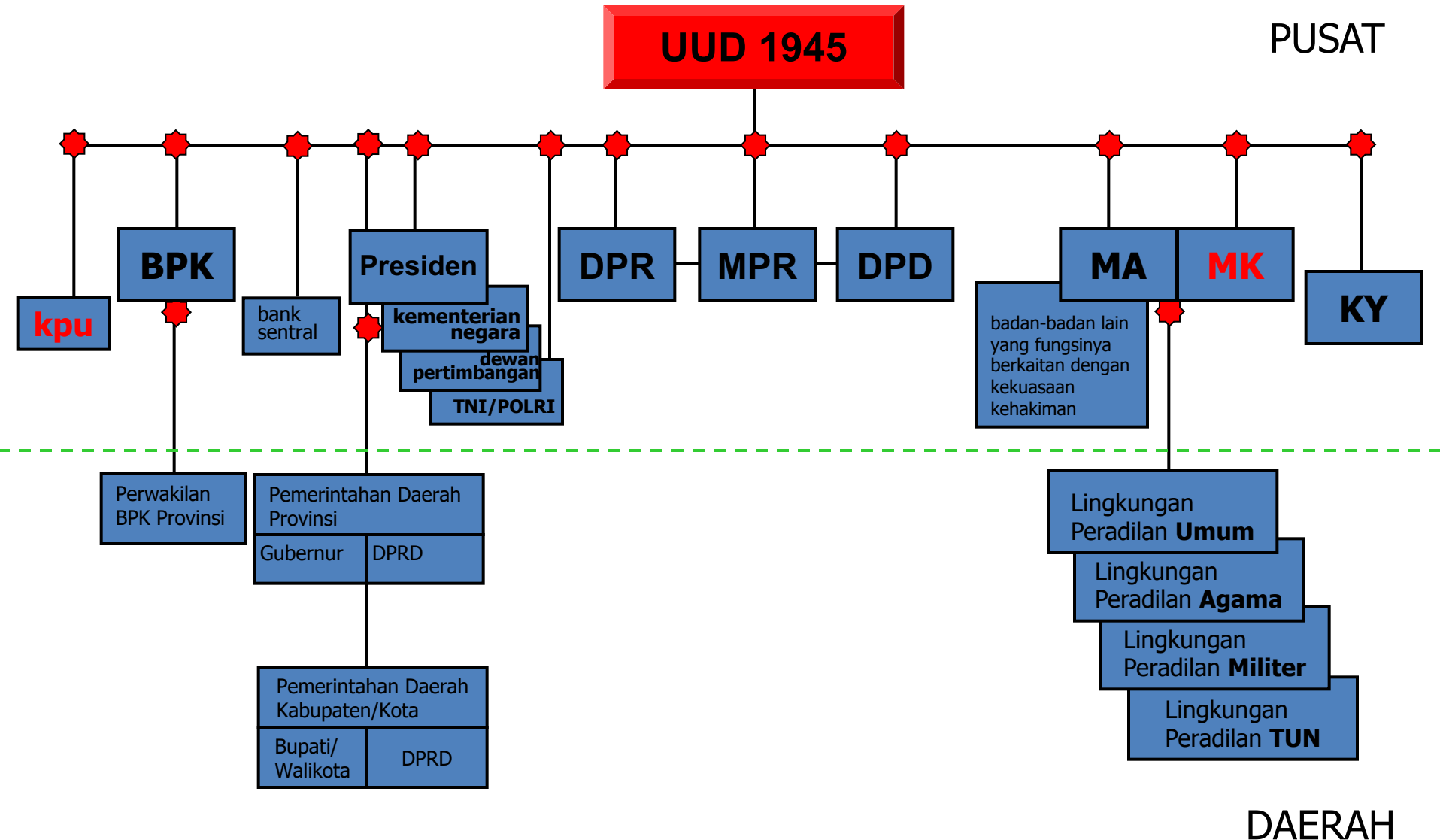


**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia**
(2003)

Sejarah Pembentukan MK Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

2

- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik

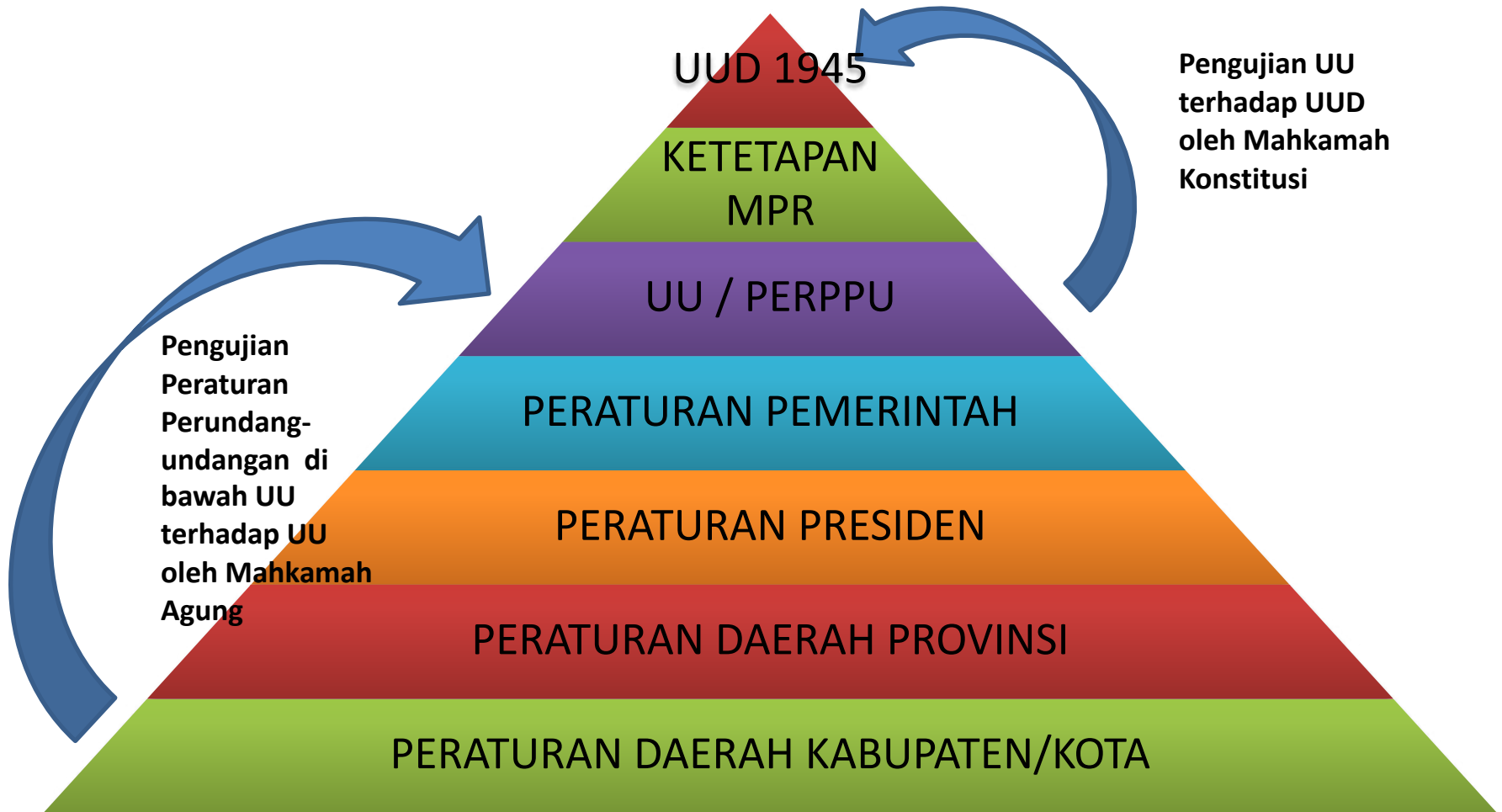
4

- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Fungsi Mahkamah Konstitusi



The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy



The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights



The Final Interpreter of the Constitution

ASAS-ASAS UTAMA

- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Aktif dan Pasif
- Asas Pembuktian Bebas



Rekapitulasi Putusan MK

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
PUU	1.641	299	619	515	169	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	-	1
Pemilu Legislatif	671	53	423	148	13	34	-
Pemilu Presiden	5	-	5	-	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah	1.136	83	495	509	35	7	7

Keterangan: Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
 - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
 - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
 - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Electoral & Parliamentary Threshold*)
 - Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
 - Pilpres dengan dua Pasangan Calon
 - Syarat menjadi anggota KPU



Contoh Putusan PUU di MK

■ Lanjutan:

- Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
- Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
- Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
- Pelaksanaan Pemilu Serentak
- Syarat Calon Anggota DPD
- Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
- Pengadilan Khusus Pemilu/Pilkada
- dsb.



Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilu

❑ PEMOHON:

1. **Pemilu Presiden:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **Pemilu Legislatif:**
 - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu. Bagaimana dengan Caleg?
 - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **Pemilu Kepala Daerah:**
 - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)

❑ TERMOHON:

1. KPU Pusat
2. KPU Provinsi
3. KPU Kabupaten/Kota

❑ PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU





Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
(Penyelesaian di MK: 14 hari kerja)



Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD
(Penyelesaian di MK: 30 hari kerja)



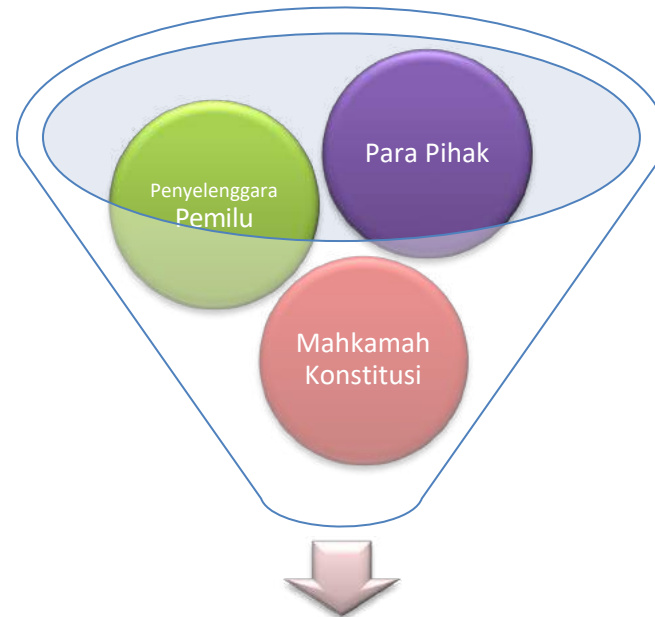
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(Penyelesaian di MK: 45 hari kerja)

Pemilihan di Indonesia

Adanya Perbedaan Perspektif



Dinamika Penanganan PHPU



**Progresivitas Hukum Acara dan
Putusan MK**

Pergeseran Paradigma Penanganan Sengketa Hasil Pemilu



Keadilan Prosedural

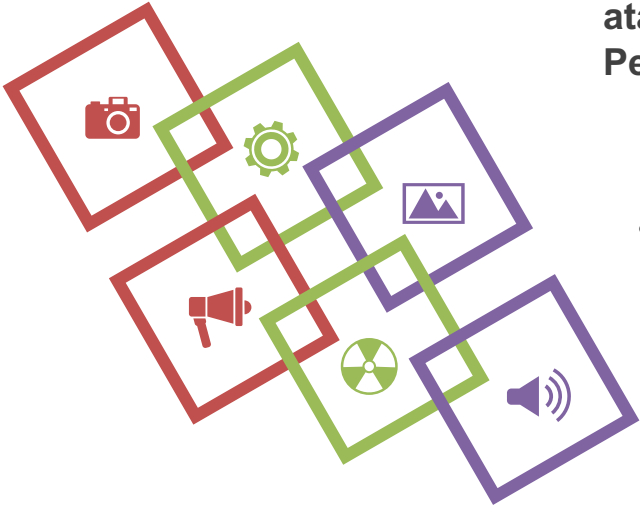
Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghitungan suara



Keadilan Substantif

Pendekatan progresif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur

Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

- Money Politics (Vote Buying)
 - Ketidaknetralan ASN atau Penyelenggara Pemilu
 - Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik
 - Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT
 - dan lain sebagainya
 - Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara
 - Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu
- 

Pelanggaran TSM dan Signifikan

Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparaturnegara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenang secara berjenjang

Sistematis

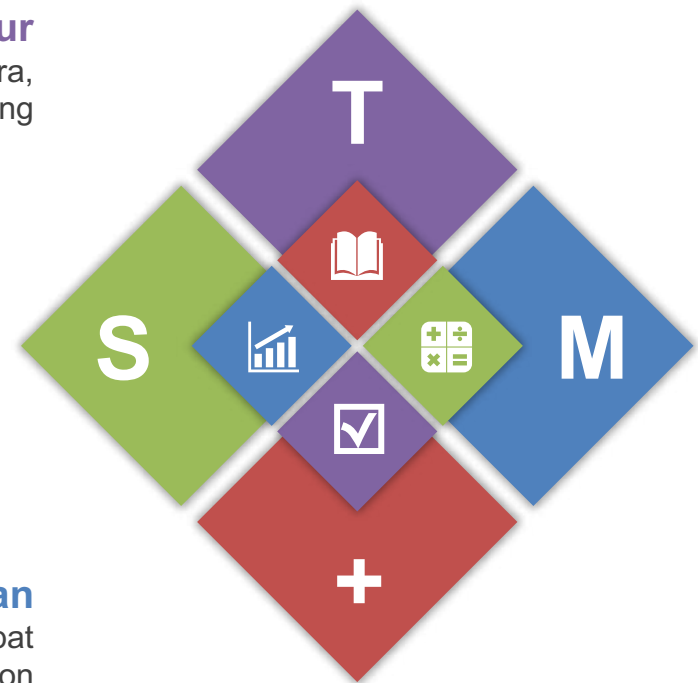
Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

Masif

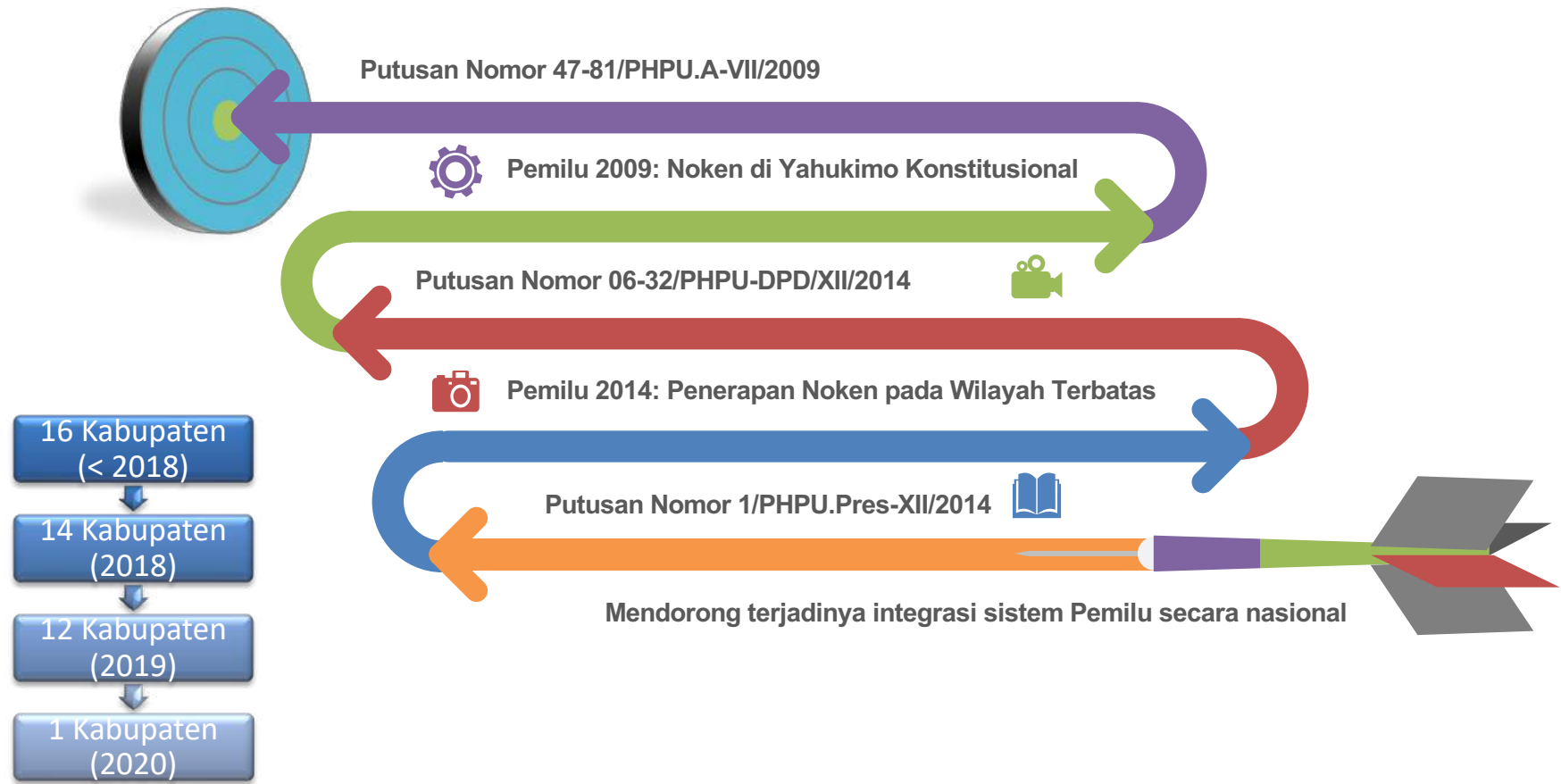
Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



Transformasi Sistem Noken



Amar Putusan: PSU

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

Penghitungan Suara Ulang



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

Pemungutan Suara Ulang



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

Putusan Sela



Putusan Akhir

Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

■ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Papol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

■ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



Terima Kasih

faiz@mkri.id | www.panmohamadfaiz.com



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com (Website)



@panmohamadfaiz (Media Sosial)

- Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI
- *External Research Fellow* di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia
- Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
- Dosen Pengajar di FH Universitas Brawijaya, FH UGM, FH UI, dan FH Universitas Jember
- Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
- Trainer Bimbingan Teknis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi
- Editor-in-Chief dari Constitutional Review Journal (Scopus dan Sinta-1)
- Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling lama **3 x 24 jam**
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

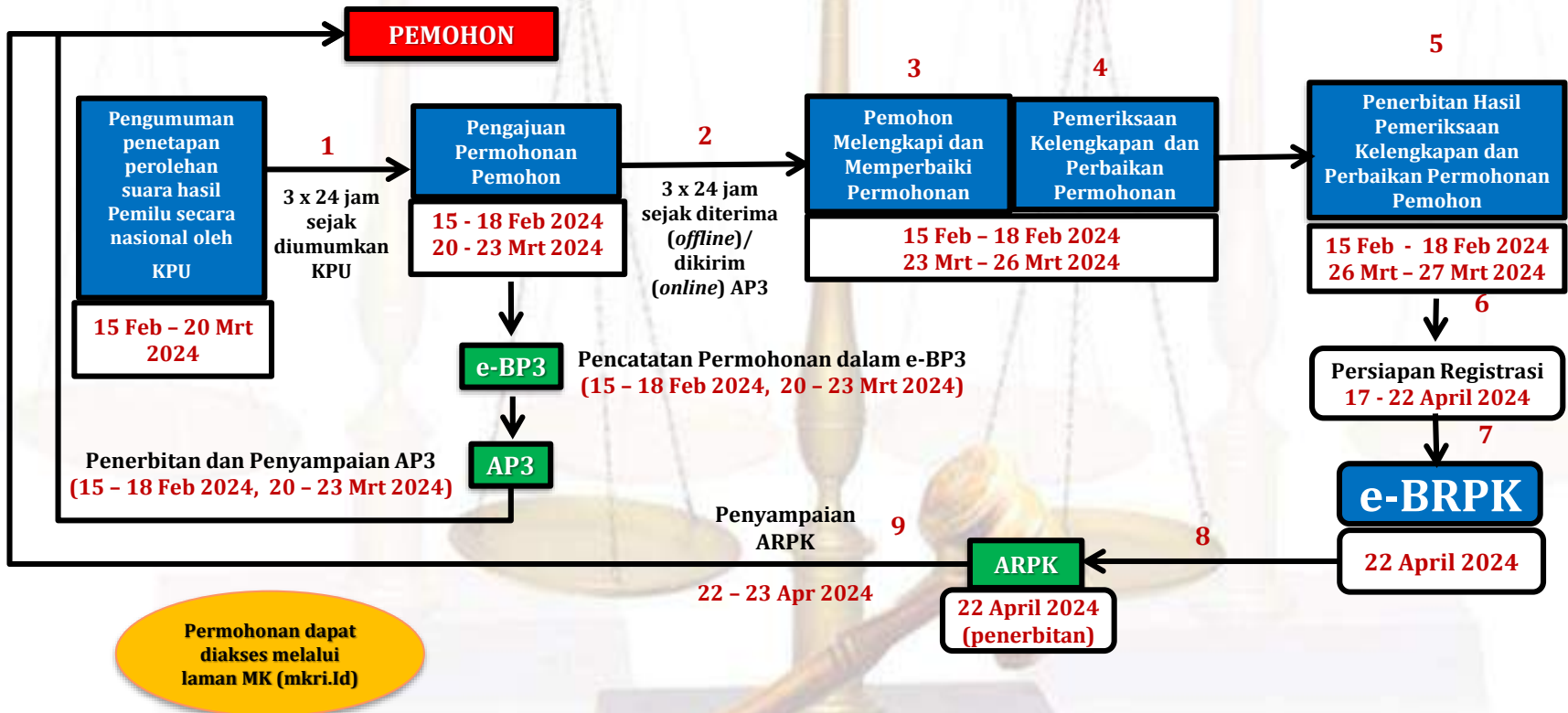
2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

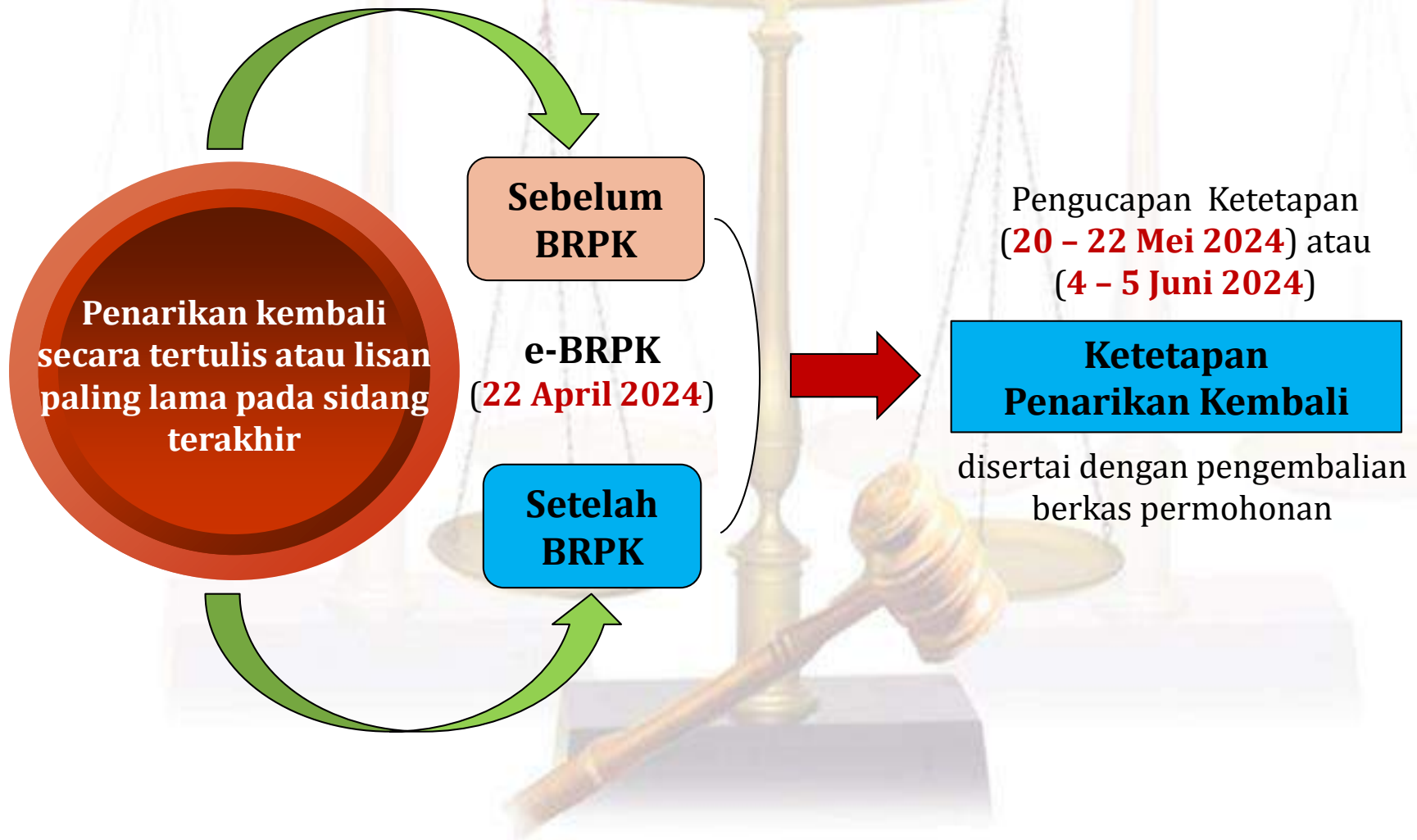
3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

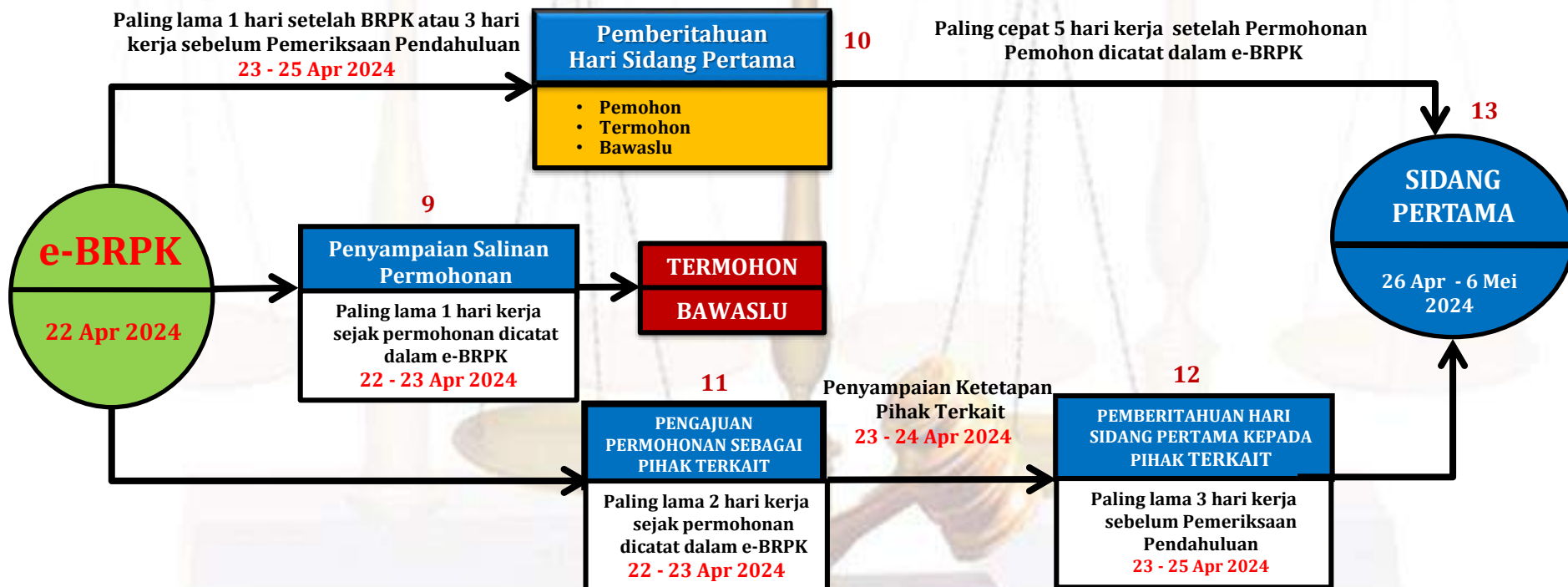


MEKANISME PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

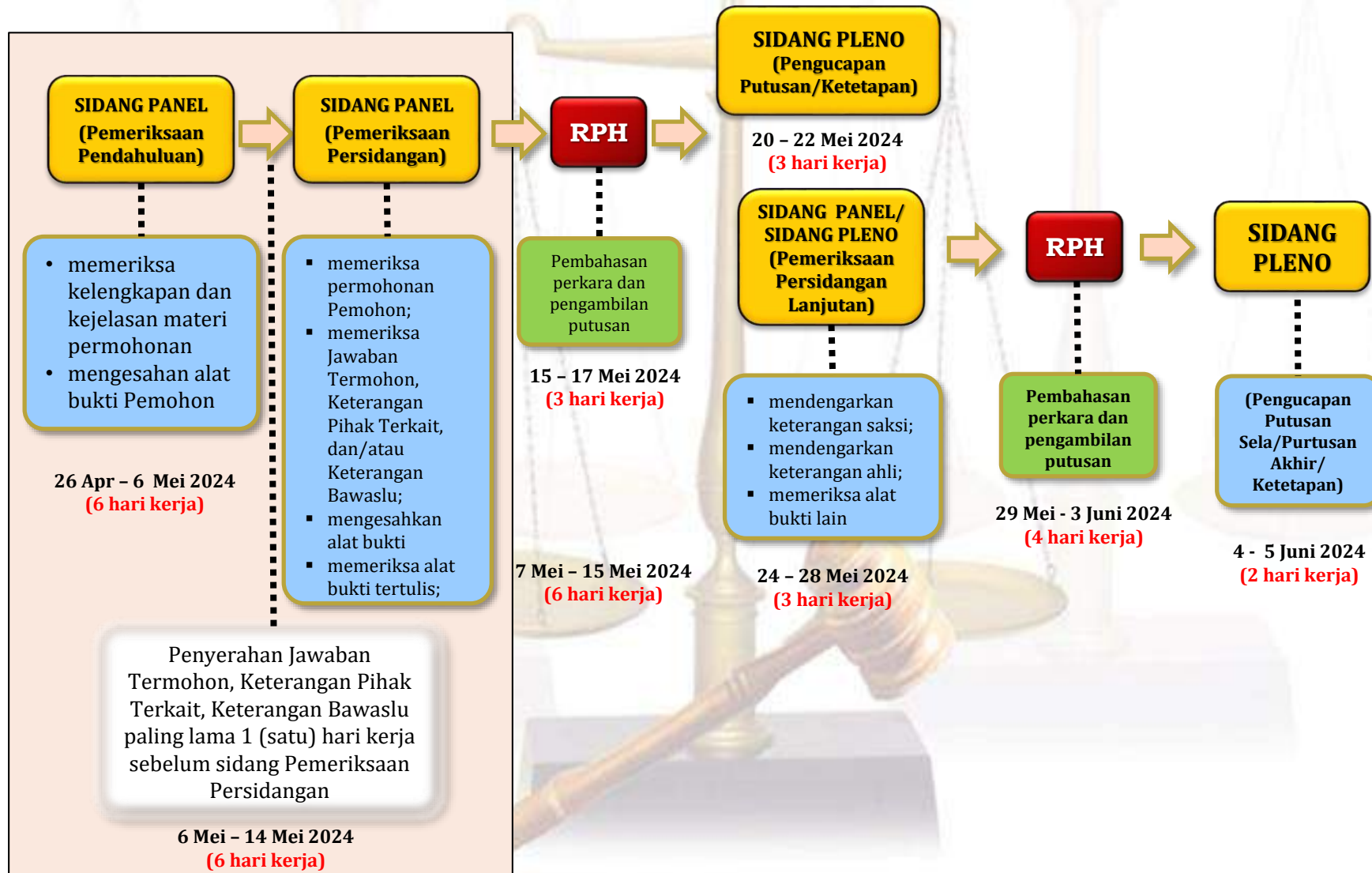
(PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



MEKANISME PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3

Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

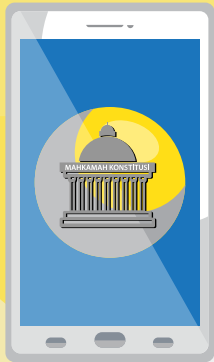
4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.

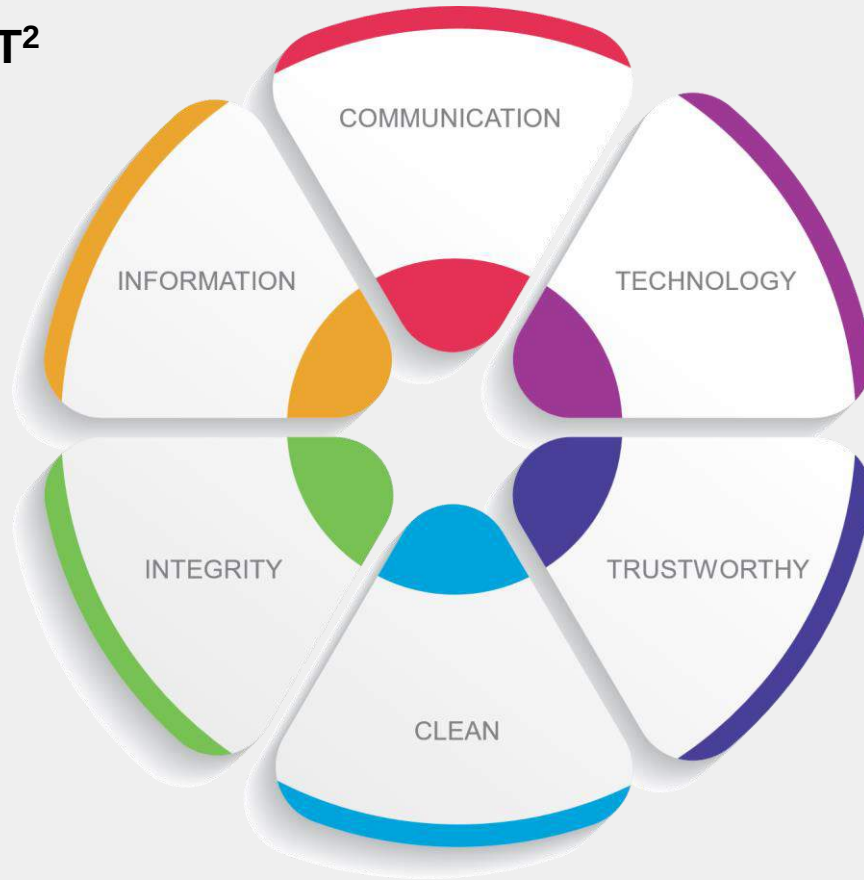




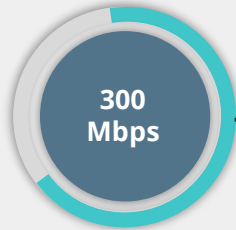
Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



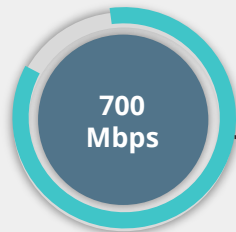
**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

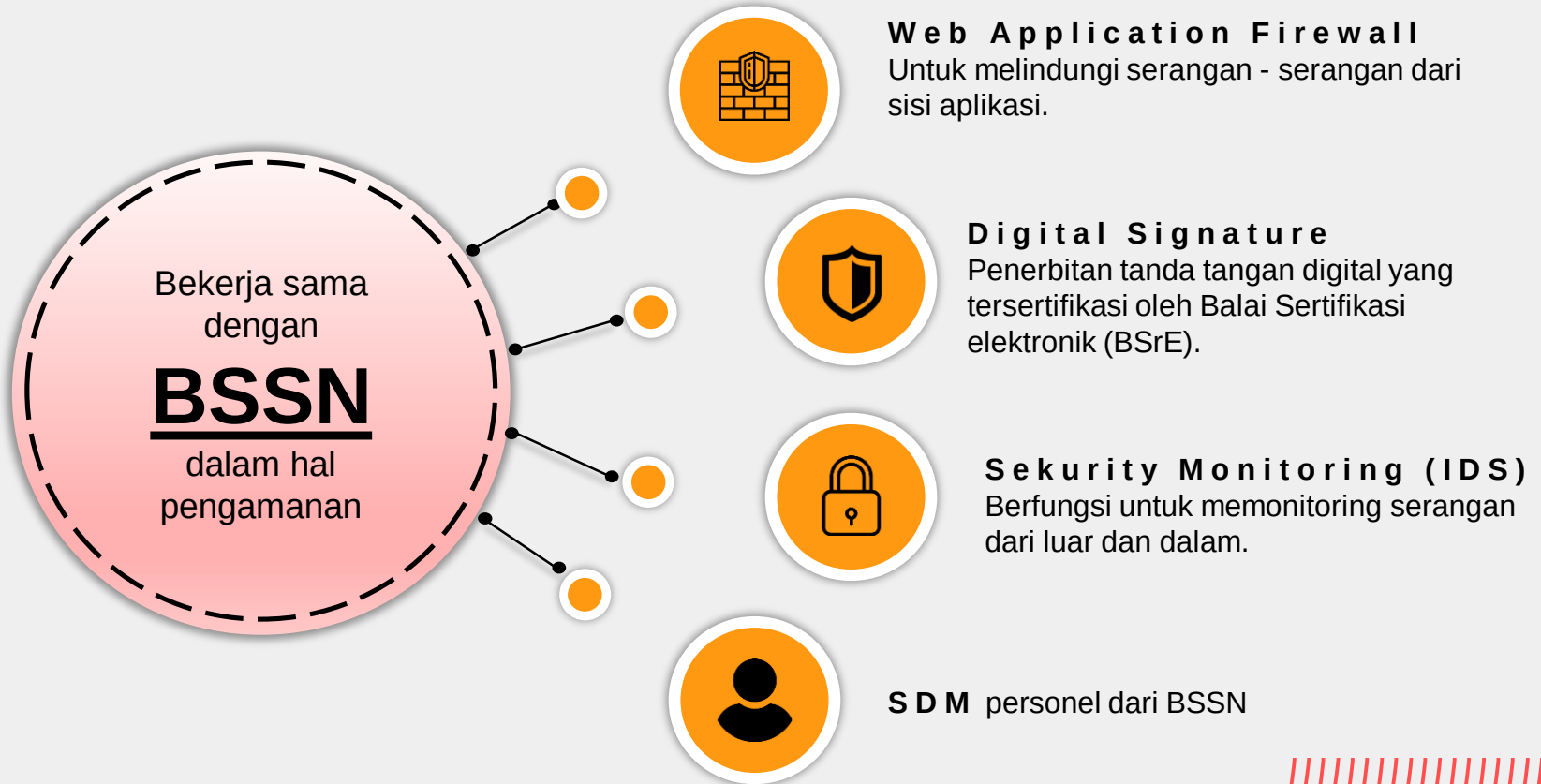


MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untuk antisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- a. Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- b. Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- c. Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- d. Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi



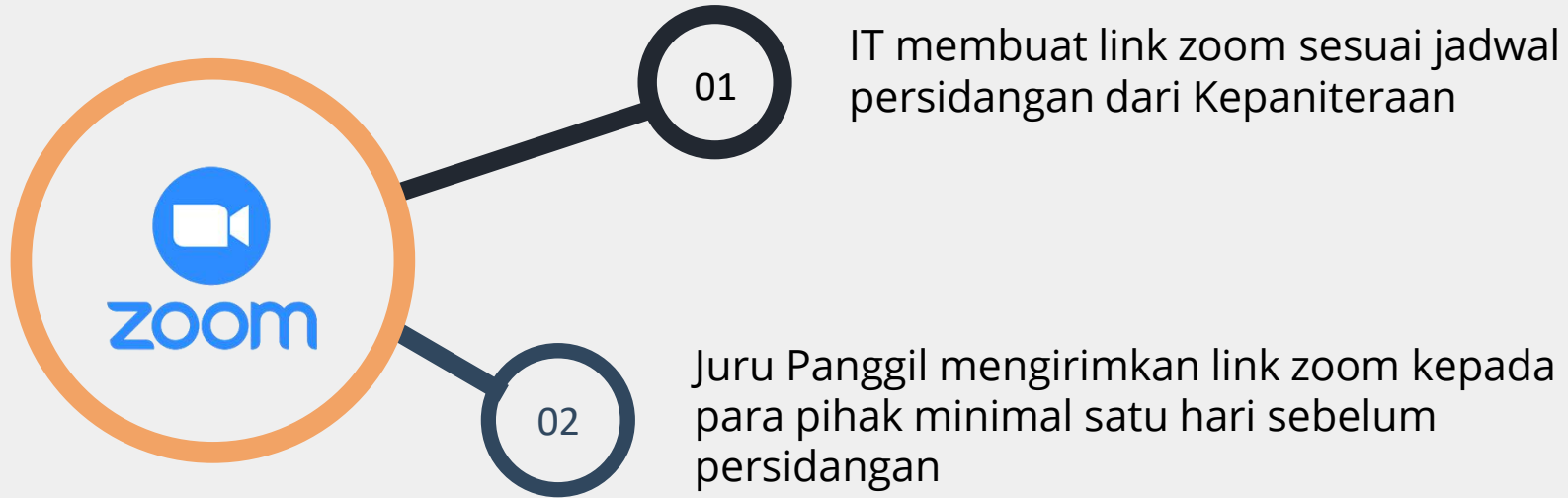
MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi



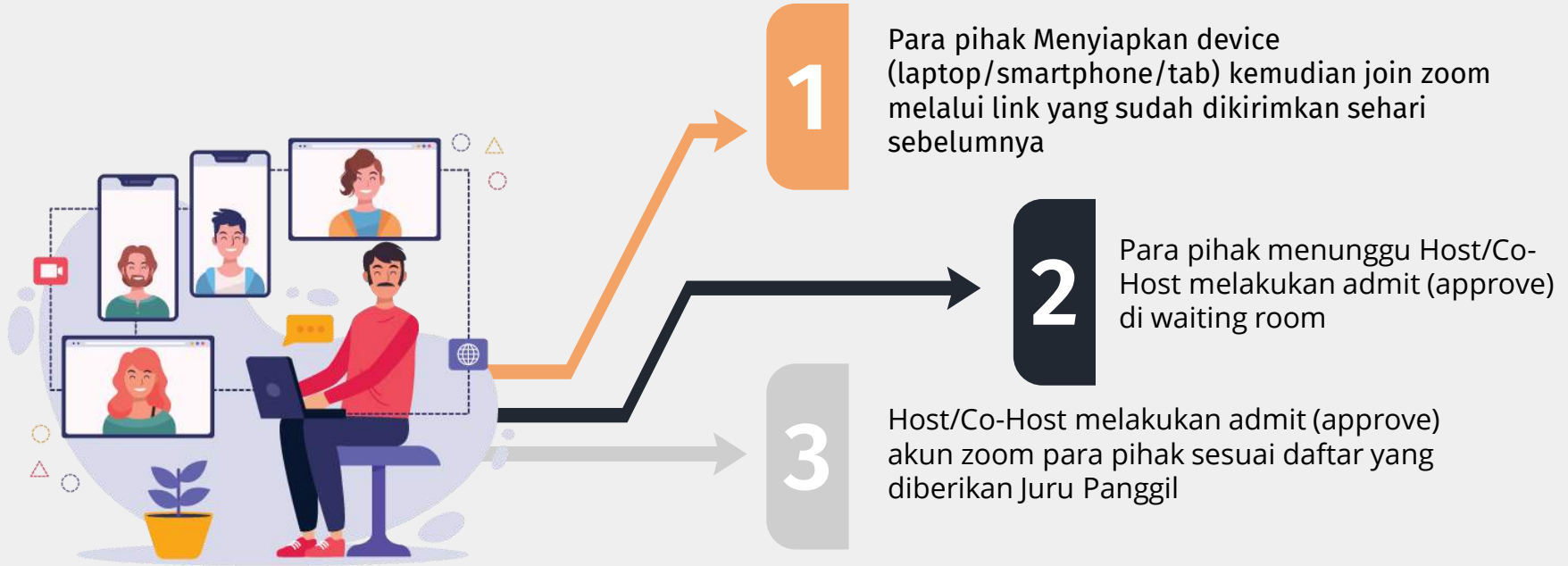
PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



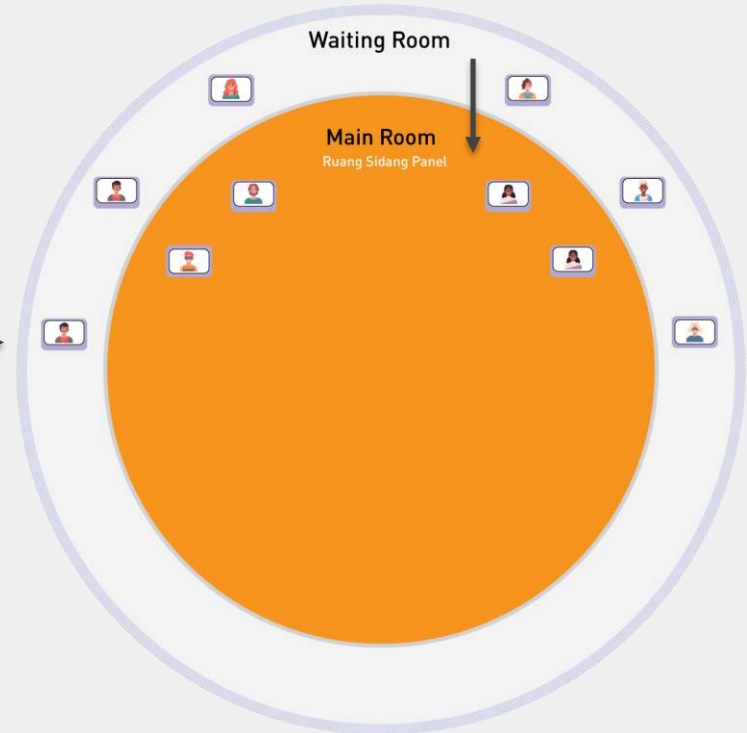
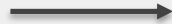
TAHAP PERSIAPAN



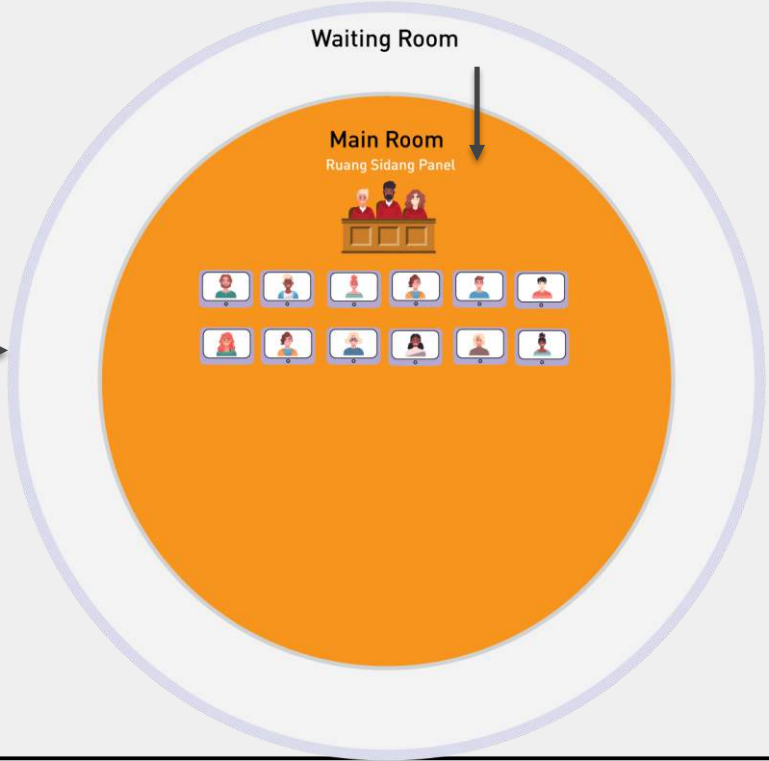
ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®

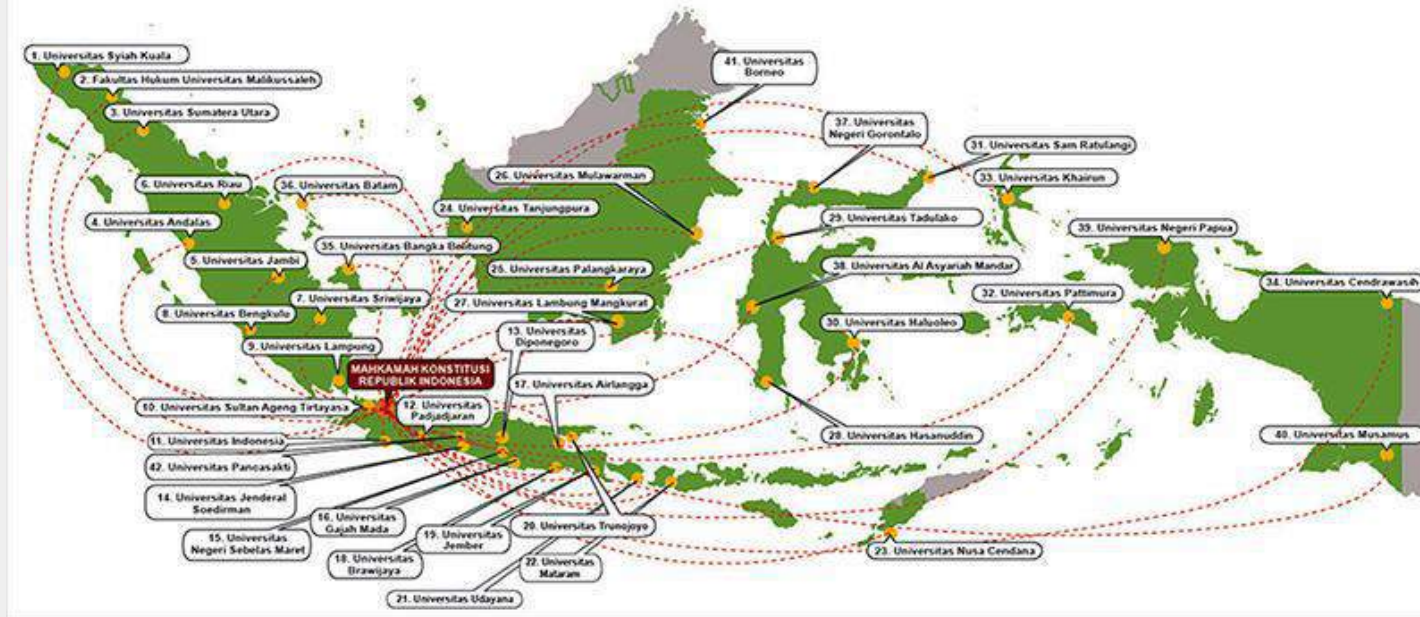


VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBRG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS VIDEO CONFERENCE PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

← → ↺

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

🔍 🔔 ⚙️ 📱 🏠 👤

YouTube

🔍 🔊

🏠 Home
🔍 Explore
📺 Shorts
📁 Subscriptions

📺 Library
🕒 History
📺 Your videos
🕒 Watch later
📅 03 MARET 2022
⌵ Show more

SUBSCRIPTIONS
🎵 Music
🏆 Sports
🎮 Gaming
🎬 Movies

MORE FROM YOUTUBE
📺 YouTube Premium
🎬 Movies
🎮 Gaming
📺 Live
🏆 Sports
⚙️ Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA
#MengawalKonstitusi
NEGERI



www.mkri.id

Mahkamah Konstitusi RI
94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNELMANAGE VIDEOS

HOMEVIDEOSPLAYLISTSCOMMUNITYCHANNELSABOUT🔍

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi...

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI
42,926 views · 7 years ago
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads ▶ PLAY ALL





<https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUMN07ILAvqk1SLFgxww/editing/images> rum : Dr. Suhartoyo., Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

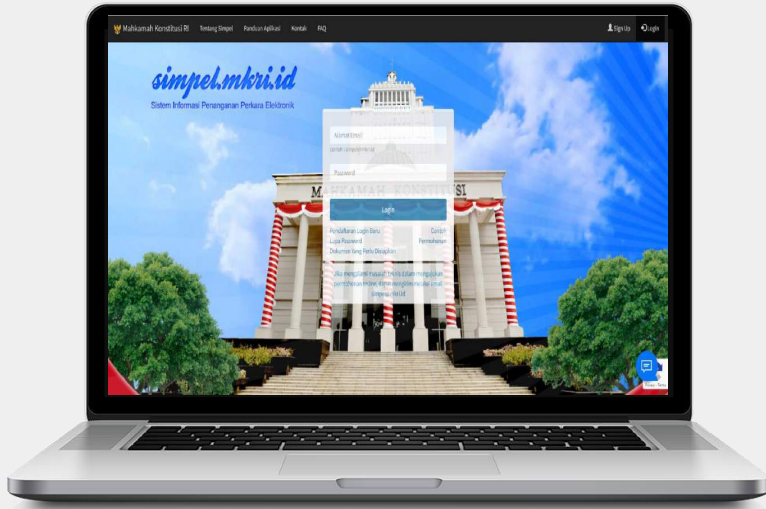
Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

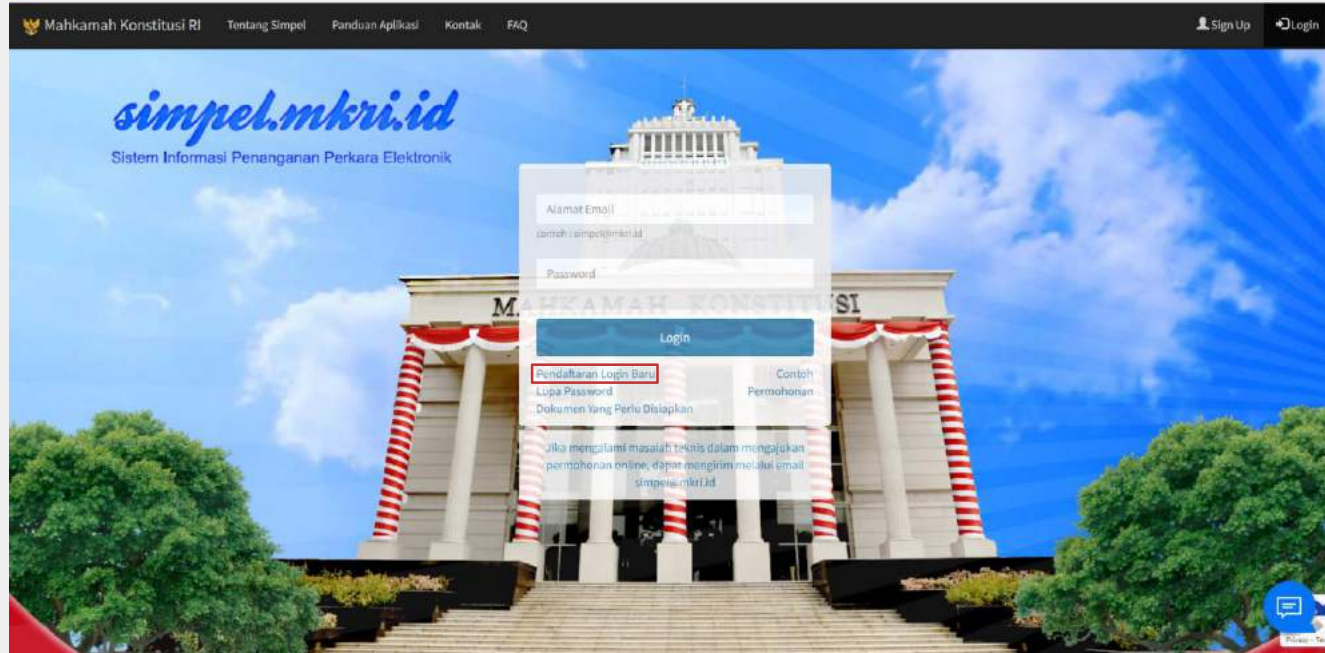
"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

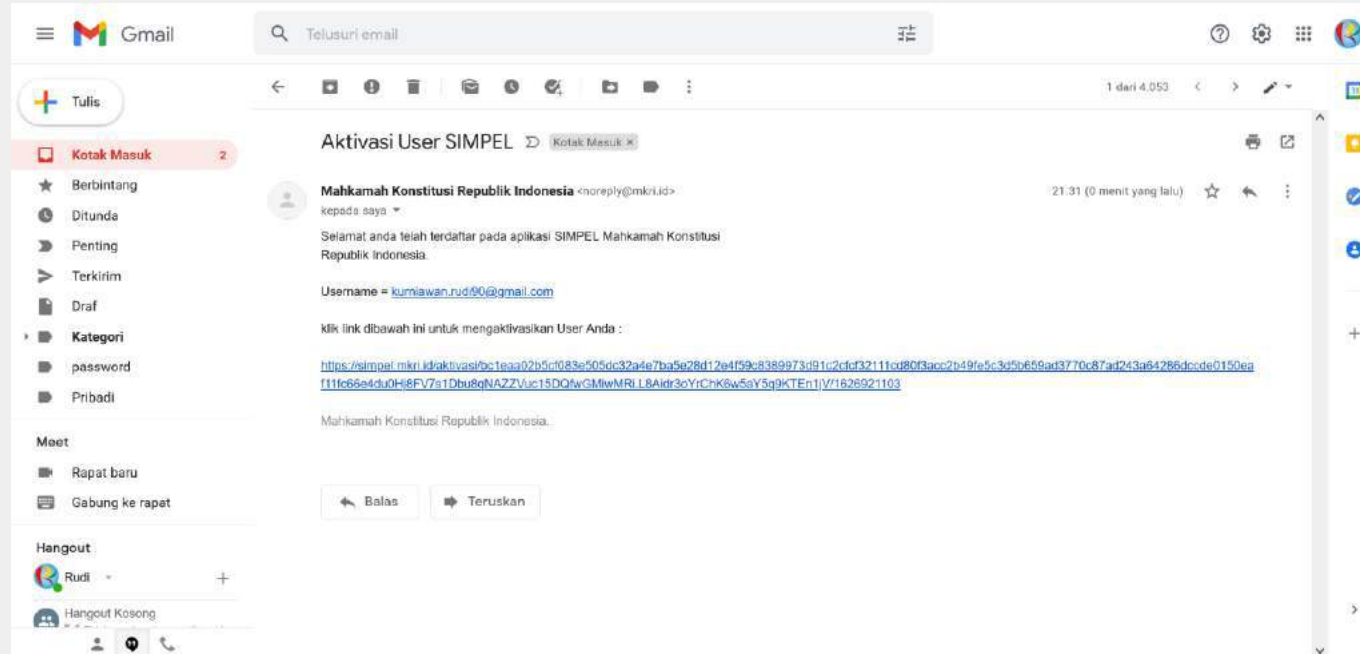


The screenshot shows the registration form for the Mahkamah Konstitusi's electronic case management system. The background is the website's header and a large image of the court building. The form is a white modal box with the following fields and elements:

- Header: **simpel.mkri.id** and **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**
- Navigation: [Tentang Simpel](#), [Panduan Aplikasi](#), [Kontak](#), [FAQ](#), [Sign Up](#), [Login](#)
- Registration Fields:
 - Full Name: Rudi Kurniawan
 - Phone Number: 081802622346
 - Email: kurniawanrudi90@gmail.com
 - Password: Masked with asterisks
- Buttons: **Register**, [Saya sudah punya akun](#), [Lupa Password](#)
- Footer: [Privacy](#) - [Terms](#)

Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

Profile User

Rudi Kurniawan

Nama *
Rudi Kurniawan

Email *
kurniawan.rudi@gmail.com

Nomor Telepon/HP *
081002022566

Nomor KTP *
1234567891011121

File KTP *
[Browse...](#) nt digital.png
File type harus jpg, gif atau png
Bukan ada file KTP

Alamat:
Gorontalo

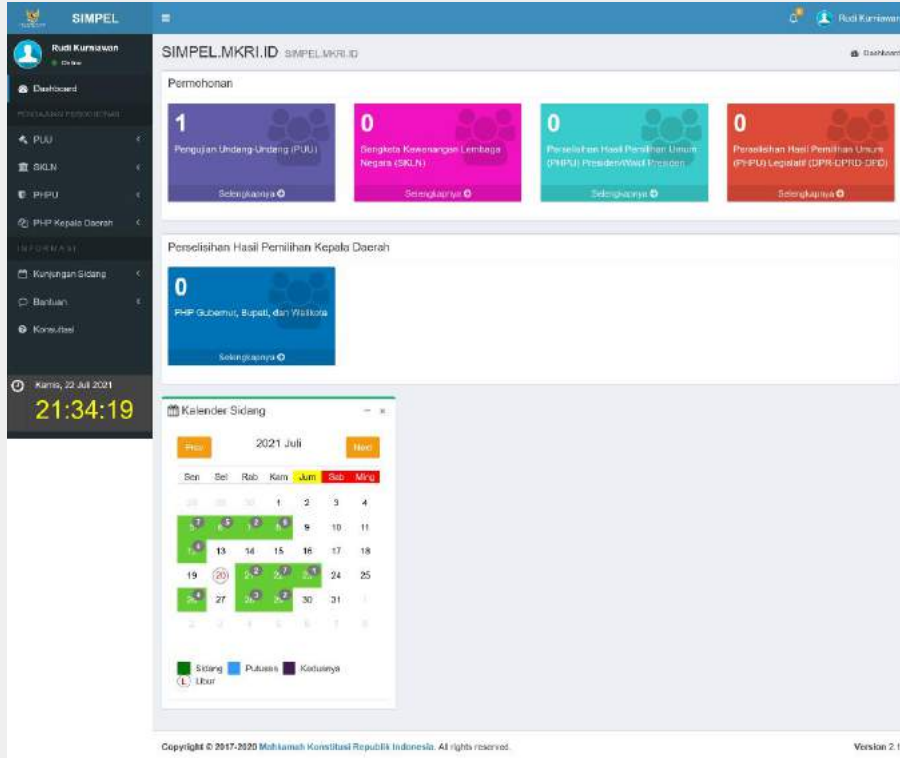
[Simpan](#) [Batal](#)

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PERMOHONAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHIP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

21:34:52

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

DashboardPermohonan OnlinePermohonan PUU

Proses Pengisian Pokok PermohonanProses Pengisian Data Pemohon dan KuasaProses Upload Dokumen

Permohonan *

Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)

Dokumen yg harus disiapkan:

KTP Pemohon (dalam format .jpg)

Email Pemohon

KTP Kuasa (dalam format .jpg) **

Email Kuasa **

Surat Kuasa (dalam format .pdf) **

File KTABAS (bagi advokat) **

Permohonan (dalam format .pdf)

Permohonan (dalam format .doc/.docx)

Daftar alat bukti (dalam format .doc)

Alistidokumen bukti

Keterangan:
** Jika menggunakan kuasa pemohon

✕ Batal

 Simpan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit

Pokok permohonan :
Contoh: Pengujian Materilil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon

+ Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	 

Data Kuasa

+ Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkriLid	1	081818181818	-	-	 

 Batal (Hapus Permohonan)

 Simpan Sementara

 Lanjutkan Upload Dokumen

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021
21:40:58

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard Permohonan Online Permohonan PUU

PUU(Pengujian Undang-Undang)

Proses Pengisian Pokok Permohonan Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa Proses Upload Dokumen

Berkas Permohonan

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

Tambah Berkas

Kembali (Edit Permohonan) Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Kirim Permohonan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

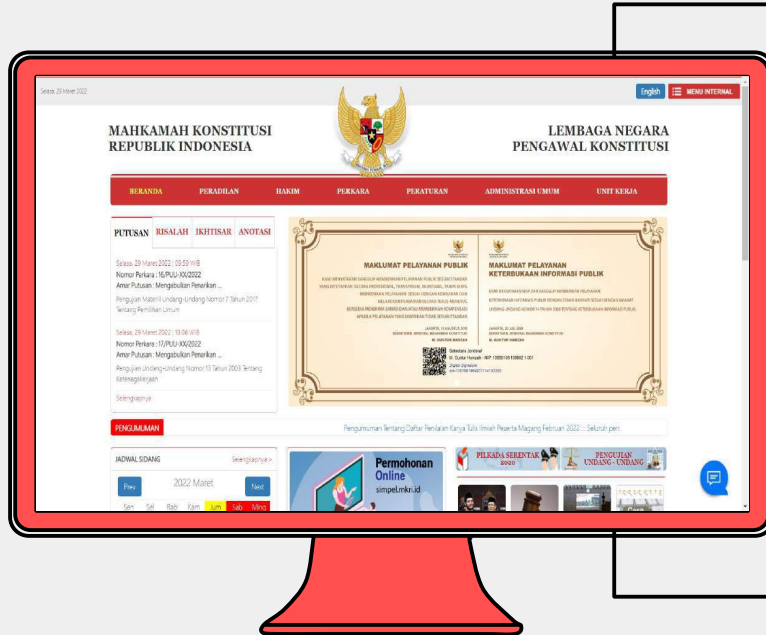
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE

Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

[BERANDA](#)[PERADILAN](#)[HAKIM](#)[PERKARA](#)[PERATURAN](#)[ADMINISTRASI UMUM](#)[UNIT KERJA](#)

PUTUSAN

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYEDIAKAN SANGKUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PEMBERIKAN SECARA SESUAI DENGAN KUALITAS, BERSEDIA MENEMPA SANGKUP MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 15 AGUSTUS 2019
KEHATI HARI, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYEDIAKAN SANGKUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BAYAR, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020
KEHATI HARI, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 196001051006021001
Zuhri Zuhri
021-102 700 100402/114103335

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh peri.

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online

simpel.mkri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTISAR, ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

[BERANDA](#)[PERADILAN](#)[HAKIM](#)[PERKARA](#)[PERATURAN](#)[ADMINISTRASI UMUM](#)[UNIT KERJA](#)

PUTUSAN

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYEDIAKAN SANGKUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PEMBERIAN KECAHA, BERKAS DAN BERKAS, BERSEDIA MENEMPA SANGKUP DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYEDIAKAN SANGKUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BAYARAN, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 12001051000021001
Zuhrotul Zuhrotul
NIP. 1207001000021114100000

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh peri.

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen

Sel

Rab

Kam

Jum

Sab

Ming

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlanggangan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik



BERITA

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo
Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak
Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK)
Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

INFO PUBLIK

PUBLIKASI



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan
Video Conference



Penelusuran
Perkara



Informasi
Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah
Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

[Selengkapnya >>](#)



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Sidang Putusan Keputusan Tunda Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlanggangan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik



simpel.mkri.id

BERITA

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo
Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak
Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK)
Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan
Video Conference



Penelusuran
Perkara



Informasi
Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah
Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarnya ■ Tunda ⌚ Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlanggangan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Permohonan Online
simpel.mkri.id



simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pandirannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020



PENGUJIAN UNDANG-UNDANG





Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Case Tracking



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Segaran Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Permohonan Online
simpel.mkri.id



BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pandirannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Case Tracking



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Segaran Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



LIVE STREAMING PERSIDANGAN



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendiriannya, Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



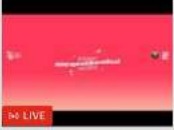
Jurnal Conserve



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin, 21/03/2022



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan



2352-9000
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



© Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Jarak No. 6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

<https://www.youtube.com/watch?v=nU7CD12Kt2A>



Select Language



CASE TRACKING

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlanggangan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Permohonan Online
simpel.mkri.id



simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pandirannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020



Hakim Konstitusi

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



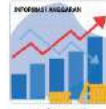
Putusan



Streaming dan Video Conference



Case Tracking



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Segaran Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



CASE TRACKING

MAHKAMAH
KONSTITUSI

Q Cari

CASE TRACKING

Jenis dokumen

☐ Putusan

☐ Anotasi

☐ Ikhtisar Putusan

☐ Risalah Persidangan

Jenis perkara

☐ Semua jenis perkara

☐ PUU

☐ SKLN

☐ PHPU

☐ PHPU.A

☐ PHPU.C

☐ PHPU.D

☐ PHRGUB

Amar putusan

☐ Semua amar putusan

☐ Tidak dapat diterima

☐ Dikabulkan

☐ Dikabulkan sebagian

☐ Ditolak

☐ Ketetapan

12/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

 Case tracking

11/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

 Case tracking

10/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CASE TRACKING

Timeline of the 24th Indonesian National Election Process:

The timeline consists of a horizontal line with circular markers indicating specific dates and events. The events are as follows:

- 19-01-2019:** Pembentukan KPU (Formation of the KPU)
- 07-03-2019:** Penetapan Peraturan KPU (KPU Regulation Determination)
- 26-01-2020:** Kampanye (Campaign)
- 07-01-2020:** Pemilihan Umum (General Election)
- 25-05-2020:** Pengumuman Hasil Pemilu (Announcement of Election Results)
- 07-05-2020:** Pemilihan Umum (General Election)
- 25-05-2020:** Pengumuman Hasil Pemilu (Announcement of Election Results)
- 19-05-2020:** KPU (KPU)
- 25-05-2020:** Pengumuman Hasil Pemilu (Announcement of Election Results)
- 25-05-2020:** Pengumuman Hasil Pemilu (Announcement of Election Results)

CLICK MK



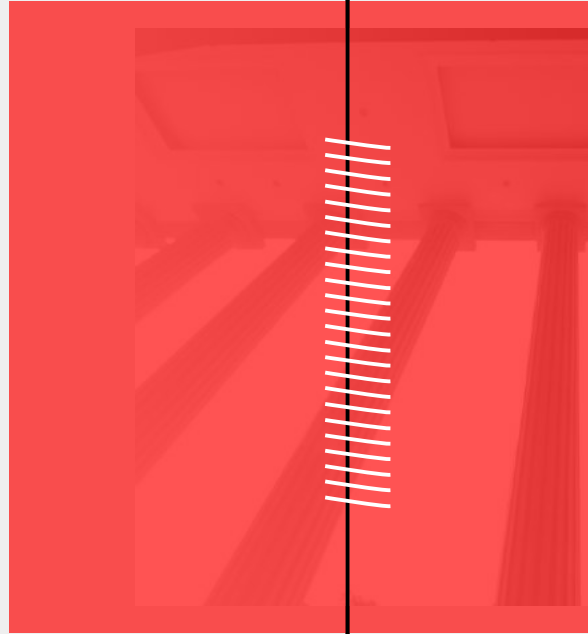
CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 10 Mei 2023**

PARA PIHAK DALAM PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Objek dalam perkara **PHPU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling lama **3 x 24 jam**
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

PKS (PHPU 2019)

Permohonan:

- A. 12 Permohonan dari Partai dan 1 dari perseorangan.
- B. Jika dilihat dari provinsi: 14 dari 33 Provinsi.
- C. Jika dilihat dari Dapil: 24 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1) DPR: 2 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2) DPRD Provinsi: 5 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3) DPRD Kabupaten/Kota: 17 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan

- a) 0 Dapil dikabulkan
- b) 14 Dapil ditolak;
- c) 10 Dapil tidak dapat diterima;**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a.nama dan alamat Pihak Terkit;

b.nomor telepon/seluler;

c.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 655/DK.06.00/05/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

03 Mei 2023

Kepada,
YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 11 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 8 Mei 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1680866910230503092840

Lampiran I

Nomor : 655/DK.06.00/05/2023

Tanggal : 03 Mei 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI Keadilan Sejahtera**

Hari, Tanggal : Senin, 8 Mei 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 8 Mei 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 652/DK.06.00/05/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

03 Mei 2023

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 11 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 8 Mei 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
[mk80090347230502021854](#)

Lampiran I

Nomor : 652/DK.06.00/05/2023

Tanggal : 03 Mei 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI Keadilan Sejahtera**

Hari, Tanggal : Senin, 8 Mei 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 8 Mei 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 649/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

02 Mei 2023

Kepada Yth,

Saudara Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 11 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 9 Mei 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di
Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk1829431688230502092110



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 645/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

02 Mei 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 11 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 9 Mei 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk-671839478230502115106



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 658/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

03 Mei 2023

Kepada Ykh. Saudara:

1. Rachman Karim

2. Taufik Gunanda

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 11 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 9 Mei 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk463809491230503030148



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 646/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

02 Mei 2023

Kepada Yth,
Saudara Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 11 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 10 Mei 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk1092586842230502115140



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 682/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

09 Mei 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Anak Agung Dian Onita**
- 2. Dian Chusnul Chatimah**
- 3. Oly Viana Agustine**
- 4. Alboin Pasaribu**

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 11 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 10 Mei 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk141049917230509091957



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 681/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

09 Mei 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Mardian Wibowo**
 - 2. Hani Adhani**
 - 3. Bisariyadi**
 - 4. Helmi Kasim**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 11 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 11 Mei 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan
Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-2087702901230509012245



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 650/DK.06.00/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

02 Mei 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 11 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 11 Mei 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature
mk-429991428230502115208



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 100/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

18 Januari 2023

Kepada Yth.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Bapak H. Ahmad Syaikh, S.AP

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 11 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Keadilan Sejahtera yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 17 April 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-687541050230118093454

Lampiran I

Nomor : 100/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Keadilan Sejahtera yang terdiri dari:
 - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Keadilan Sejahtera memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **17 April 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. *Boarding pass*

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 100/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Keadilan Sejahtera

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 8 s.d. 11 Mei 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Keadilan Sejahtera

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 8 Mei 2023	09.30 – 11.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik



		4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
KEDUA				
Selasa, 9 Mei 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 10 Mei 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 11 Mei 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 100/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 100/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
8 s.d. 11 Mei 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Keadilan Sejahtera
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 161/DK.00/01/2023

09 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Bapak H. Ahmad Syaikh, S.AP

di Jakarta

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pejabat yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Senin, 16 Januari 2023

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan Yth:

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature
mk665348236230109035816



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 651/DK.06.00/05/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

03 Mei 2023

Kepada Yth.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Bapak H. Ahmad Syaikh, S.AP

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera** yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 11 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 8 Mei 2023

Waktu : 16.30 –18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1649239888230502091457

Lampiran I

Nomor : 651/DK.06.00/05/2023

Tanggal : 03 Mei 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Keadilan Sejahtera

Hari, Tanggal : **Senin, 8 Mei 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Keadilan Sejahtera

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 8 Mei 2023	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars PKS 5. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Presiden PKS 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne PKS 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Presiden PKS Plt. Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 191/ST.SPD/2000/05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Keadilan Sejahtera di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 8 s.d. 11 Mei 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 8 Mei 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
[mk-350005278230508014813](#)

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 191/ST.SPD/2000/05/2023

Tanggal : 8 Mei 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI Keadilan Sejahtera**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	8 Mei 2023
2	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	8 Mei 2023
3	Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Narasumber	8 Mei 2023
4	Heru Setiawan, S.E., M.Si.	Narasumber	8 Mei 2023
5	Elisabeth, S.E.	Narasumber	8 dan 11 Mei 2023
6	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Narasumber	9 Mei 2023
7	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Narasumber	9 Mei 2023
8	Taufik Gunanda, S.Kom.	Narasumber	9 Mei 2023
9	Rachman Karim	Narasumber	9 Mei 2023
10	Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.	Narasumber	10 Mei 2023
11	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Narasumber	10 Mei 2023
12	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Narasumber	10 Mei 2023
13	Oly Viana Agustine. S.H., M.H.	Narasumber	10 Mei 2023
14	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Narasumber	10 Mei 2023
15	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Koordinator	11 Mei 2023
16	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Narasumber	11 Mei 2023
17	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Narasumber	11 Mei 2023
18	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Narasumber	11 Mei 2023
19	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	Narasumber	11 Mei 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

NOMOR : 23/PK/2023

NOMOR : 02/SPK/DPP-PKS/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Aboe Bakar Alhabsyi**, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, berkedudukan di MD Building, Jalan TB. Simatupang No. 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

f. se

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 8 s.d. 11 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Keadilan Sejahtera sebagai peserta kegiatan

f. B. B.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

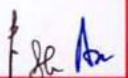
- 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal 17 April 2023.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 17 April 2023.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

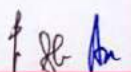
- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Elisabeth
Plt. Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Keadilan Sejahtera



Aboe Bakar Alhabsyi
Sekretaris Jenderal



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

NOMOR : 23/PK/2023

NOMOR : 02/SPK/DPP-PKS/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Aboe Bakar Alhabsyi**, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, berkedudukan di MD Building, Jalan TB. Simatupang No. 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

f se

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 8 s.d. 11 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Keadilan Sejahtera sebagai peserta kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **17 April 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **17 April 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

fda ba

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

f Se h

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Elisabeth
Elisabeth
Plt. Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Keadilan Sejahtera



Aboe Bakar Alhabsyi
Aboe Bakar Alhabsyi
Sekretaris Jenderal

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Hawari Muhammad	08/05/2023 15:03:48 WIB
2	Tulus Wahjuono	08/05/2023 15:06:24 WIB
3	Riki Sambora	08/05/2023 15:06:35 WIB
4	Deky Mulyadi	08/05/2023 15:07:20 WIB
5	Muhammad Wiman Wibisana	08/05/2023 15:07:26 WIB
6	Ihsan Abdillah	08/05/2023 15:10:40 WIB
7	Riki Martim	08/05/2023 15:14:08 WIB
8	Martadinata	08/05/2023 15:21:41 WIB
9	Muhammad Abizar Al Ghifari Musya	08/05/2023 15:24:21 WIB
10	Azzuhri Al Bajuri	08/05/2023 15:30:17 WIB
11	Putri Amalia	08/05/2023 15:30:31 WIB
12	Nadiya Ulfa	08/05/2023 15:34:18 WIB

13 Reza Revorma Putra Alam	08/05/2023 15:37:57 WIB
14 Dede	08/05/2023 15:38:45 WIB
15 Rismaya Nurbaity	08/05/2023 15:40:15 WIB
16 Agung Syaputra	08/05/2023 15:41:18 WIB
17 H. Anton Hariyadi	08/05/2023 15:42:09 WIB
18 Julita	08/05/2023 15:42:13 WIB
19 Nurfadhilah Rizmi	08/05/2023 15:44:08 WIB
20 H. Zulfadillah	08/05/2023 15:44:28 WIB
21 Muhammad Fadhly Gella	08/05/2023 15:44:28 WIB
22 Umar Bassam	08/05/2023 15:44:30 WIB
23 Khalid Dhiya UI Haqq	08/05/2023 15:45:57 WIB
24 Ibnu Saleh	08/05/2023 15:46:10 WIB
25 Firda Faradillah	08/05/2023 15:46:37 WIB
26 Andika Saputra	08/05/2023 15:46:44 WIB

27 Seta Mahardika Caesar Wahyuono	08/05/2023 15:47:49 WIB
28 Edius Pratama	08/05/2023 15:49:05 WIB
29 Heru Julianto	08/05/2023 15:49:42 WIB
30 Ramlan Damanik	08/05/2023 15:50:07 WIB
31 Rizki Masapan	08/05/2023 15:50:19 WIB
32 Faudjan Muslim	08/05/2023 15:50:50 WIB
33 Masrizal	08/05/2023 15:50:55 WIB
34 Darmiyanto	08/05/2023 15:51:04 WIB
35 Della Haerunisa	08/05/2023 15:51:34 WIB
36 Rusdi Agus Susanto	08/05/2023 15:52:22 WIB
37 Ahmad Rizal Kurniawan	08/05/2023 15:52:23 WIB
38 Mansur Naga	08/05/2023 15:53:24 WIB
39 Suyadi	08/05/2023 15:53:24 WIB
40 Neneng Annisa Rahmah	08/05/2023 15:53:48 WIB

41 Faisal	08/05/2023 15:53:52 WIB
42 Aldy Putranto	08/05/2023 15:54:09 WIB
43 Deni Wisnu	08/05/2023 15:54:13 WIB
44 ATRI FADLY B	08/05/2023 15:54:28 WIB
45 Emisah	08/05/2023 15:54:43 WIB
46 Imam Rizki Pratama	08/05/2023 15:54:45 WIB
47 Ismail Nganggon	08/05/2023 15:54:51 WIB
48 Fardy Iskandar	08/05/2023 15:54:52 WIB
49 Purwanto	08/05/2023 15:54:59 WIB
50 Furkan Abdullah	08/05/2023 15:55:22 WIB
51 Kusanto	08/05/2023 15:55:24 WIB
52 H. Deden Kurnaedi	08/05/2023 15:55:29 WIB
53 Muhammad Ahyar	08/05/2023 15:57:03 WIB
54 Muhammad Sayyid Kamil Adam	08/05/2023 15:57:15 WIB

55 Imam Sutopo	08/05/2023 15:57:23 WIB
56 Taufik Hidayat	08/05/2023 15:58:06 WIB
57 Sunandar PS	08/05/2023 15:58:22 WIB
58 Kemas Muhammad Ali Utih	08/05/2023 15:58:31 WIB
59 Khairil Amrillah	08/05/2023 15:58:45 WIB
60 Nurul Fariati	08/05/2023 15:59:19 WIB
61 Syarif Pati Pilohi	08/05/2023 15:59:21 WIB
62 Arip Imawan	08/05/2023 15:59:24 WIB
63 Mulyanto	08/05/2023 15:59:32 WIB
64 Ferlan Niko	08/05/2023 15:59:33 WIB
65 Helmi Al Djufri	08/05/2023 15:59:57 WIB
66 Fricilia Jelita Wartabone	08/05/2023 16:00:00 WIB
67 H. Deden Kurnaedi	08/05/2023 16:00:12 WIB
68 Lilis Nurmallasari	08/05/2023 16:00:17 WIB

69 Muhammad Mujaini	08/05/2023 16:00:25 WIB
70 Budiman Putra	08/05/2023 16:00:26 WIB
71 Akhmad Bumi	08/05/2023 16:00:29 WIB
72 Muhammad Arnif	08/05/2023 16:00:42 WIB
73 Basrizal	08/05/2023 16:01:04 WIB
74 Fahmi Ali Ramdhani	08/05/2023 16:01:14 WIB
75 Dudi Usman Sahupala	08/05/2023 16:01:38 WIB
76 Muhamad Budiono	08/05/2023 16:01:55 WIB
77 Djumrin	08/05/2023 16:03:18 WIB
78 Joko Fitriani Prabowo	08/05/2023 16:03:20 WIB
79 RIJALUN SHOLIHIN SIMATUPANG	08/05/2023 16:03:21 WIB
80 Joko Sulistiono	08/05/2023 16:03:24 WIB
81 Dwi Histiningrum	08/05/2023 16:03:24 WIB
82 Mustafa M. Yacob	08/05/2023 16:03:28 WIB

83 Nardi Wiharto	08/05/2023 16:03:32 WIB
84 Aminanto	08/05/2023 16:03:34 WIB
85 Darussalam	08/05/2023 16:03:37 WIB
86 Suntin Yono	08/05/2023 16:03:38 WIB
87 Resky Arisal	08/05/2023 16:03:40 WIB
88 Mohammad Indra Kelana	08/05/2023 16:03:40 WIB
89 Isra Safar	08/05/2023 16:03:43 WIB
90 Hoirullah	08/05/2023 16:03:45 WIB
91 Sudiami	08/05/2023 16:03:59 WIB
92 Hazlan	08/05/2023 16:04:05 WIB
93 Sufrizal Lubis	08/05/2023 16:04:10 WIB
94 Yusri	08/05/2023 16:04:10 WIB
95 Budiman Mubar	08/05/2023 16:04:19 WIB
96 Andi Hamdiah	08/05/2023 16:04:20 WIB

97 Hardiyansyah	08/05/2023 16:04:25 WIB
98 Arah Madani	08/05/2023 16:04:28 WIB
99 Sabarrudin	08/05/2023 16:04:36 WIB
100 R. Suyadi	08/05/2023 16:04:41 WIB
101 Nuharman	08/05/2023 16:04:42 WIB
102 Aleks Pigai	08/05/2023 16:04:52 WIB
103 Evi Risna Yanti	08/05/2023 16:04:55 WIB
104 Sultan	08/05/2023 16:04:55 WIB
105 Shalihin Alamsyah Putra	08/05/2023 16:04:57 WIB
106 H. Deden Kurnaedi	08/05/2023 16:04:58 WIB
107 Syamsul Bahri	08/05/2023 16:05:05 WIB
108 Muhammad Firdaus Abduh	08/05/2023 16:05:05 WIB
109 Abdul Naim	08/05/2023 16:05:13 WIB
110 Galih Achmad Nasukhah	08/05/2023 16:05:23 WIB

111 Hikmat Prihadi	08/05/2023 16:05:37 WIB
112 Nuharman	08/05/2023 16:05:40 WIB
113 Sri Astuti A. Kadir	08/05/2023 16:05:44 WIB
114 Nurwahidah	08/05/2023 16:05:57 WIB
115 Eka Pala Suryana	08/05/2023 16:06:07 WIB
116 Ampria Bukhori	08/05/2023 16:06:49 WIB
117 Ernawati	08/05/2023 16:08:19 WIB
118 Muhammad Azwar Dukalang	08/05/2023 16:11:20 WIB
119 Ruli Margianto	08/05/2023 16:11:38 WIB
120 Ahmar Ihsan Rangkuti	08/05/2023 16:12:12 WIB
121 Ahmad Nur Rois	08/05/2023 16:12:49 WIB
122 Aristya Kusuma Dewi	08/05/2023 16:14:20 WIB
123 Syaidah Irma	08/05/2023 16:14:53 WIB
124 Edi Sumardi	08/05/2023 16:24:09 WIB

125 Deviyanti Dwiningsih	08/05/2023 16:27:20 WIB
126 Panji Brata Kusuma	08/05/2023 16:48:08 WIB
127 Amal Hamsah	08/05/2023 16:48:30 WIB
128 Ali Wiji Edhy	08/05/2023 16:50:06 WIB
129 Suminarso	08/05/2023 19:12:25 WIB
130 Andes Robensyah	08/05/2023 19:31:45 WIB
131 Isnu Harjo Prayitno	08/05/2023 19:37:49 WIB
132 Sudirman Anas	08/05/2023 19:39:17 WIB
133 Abdul Rasyid	08/05/2023 19:40:06 WIB
134 Khairul Anwar Hasibuan	08/05/2023 19:40:28 WIB
135 Tuwarno	08/05/2023 19:41:21 WIB
136 Sahri Mewar	08/05/2023 19:42:18 WIB
137 Busyraa	08/05/2023 19:44:39 WIB
138 Anggi Aribowo	08/05/2023 19:52:12 WIB

139 Rahman Pulani	08/05/2023 20:15:23 WIB
140 Amir Hamzah Sihombing	08/05/2023 20:36:19 WIB
141 Martoni	08/05/2023 20:58:20 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Dede		08/05/2023 16:39:03 WIB
2 Taufik Hidayat		08/05/2023 16:39:53 WIB
3 Aldy Putranto		08/05/2023 16:42:07 WIB
4 Syaidah Irma		08/05/2023 16:42:19 WIB
5 H. Zulfadillah		08/05/2023 16:43:58 WIB
6 Rusdi Agus Susanto		08/05/2023 16:44:51 WIB
7 Panji Brata Kusuma		08/05/2023 16:48:14 WIB
8 Amal Hamsah		08/05/2023 16:48:34 WIB
9 Ihsan Abdillah		08/05/2023 16:48:41 WIB

10 Ali Wiji Edhy	08/05/2023 16:50:12 WIB
11 Kusanto	08/05/2023 16:50:26 WIB
12 Arip Imawan	08/05/2023 16:50:32 WIB
13 Suyadi	08/05/2023 16:51:19 WIB
14 Martadinata	08/05/2023 17:04:54 WIB
15 Seta Mahardika Caesar Wahyuono	08/05/2023 17:07:29 WIB
16 Nadiya Ulfa	08/05/2023 17:08:13 WIB
17 Ahmad Nur Rois	08/05/2023 17:08:14 WIB
18 Nuharman	08/05/2023 17:09:51 WIB
19 Darmiyanto	08/05/2023 17:10:28 WIB
20 Ahmad Rizal Kurniawan	08/05/2023 17:11:18 WIB
21 Ferlan Niko	08/05/2023 17:11:37 WIB
22 H. Deden Kurnaedi	08/05/2023 17:12:00 WIB
23 Galih Achmad Nasukhah	08/05/2023 17:13:27 WIB

24 Abdul Naim	08/05/2023 17:13:34 WIB
25 Sultan	08/05/2023 17:14:05 WIB
26 Khalid Dhiya UI Haqq	08/05/2023 17:14:19 WIB
27 Ampria Bukhori	08/05/2023 17:15:25 WIB
28 Muhammad Azwar Dukalang	08/05/2023 17:25:21 WIB
29 Tulus Wahjuono	08/05/2023 17:25:25 WIB
30 Hawari Muhammad	08/05/2023 17:25:51 WIB
31 Muhammad Wiman Wibisana	08/05/2023 17:43:56 WIB
32 Fardy Iskandar	08/05/2023 17:45:53 WIB
33 Budiman Mubar	08/05/2023 17:59:59 WIB
34 Riki Sambora	08/05/2023 18:04:47 WIB
35 Ernawati	08/05/2023 18:17:08 WIB
36 Reza Revorma Putra Alam	08/05/2023 18:24:01 WIB
37 Joko Fitriani Prabowo	08/05/2023 18:26:19 WIB

38 Hardiyansyah	08/05/2023 18:27:14 WIB
39 Muhammad Fadhly Gella	08/05/2023 18:31:48 WIB
40 Muhammad Sayyid Kamil Adam	08/05/2023 18:32:09 WIB
41 Fricilia Jelita Wartabone	08/05/2023 18:33:23 WIB
42 Furkan Abdullah	08/05/2023 18:35:51 WIB
43 ATRI FADLY B	08/05/2023 18:57:43 WIB
44 Edius Pratama	08/05/2023 19:01:58 WIB
45 Edi Sumardi	08/05/2023 19:07:37 WIB
46 Resky Arisal	08/05/2023 19:08:40 WIB
47 Suminarso	08/05/2023 19:12:17 WIB
48 Heru Julianto	08/05/2023 19:13:26 WIB
49 Aristya Kusuma Dewi	08/05/2023 19:27:58 WIB
50 Mulyanto	08/05/2023 19:31:23 WIB
51 Andes Robensyah	08/05/2023 19:31:51 WIB

52 Putri Amalia	08/05/2023 19:33:24 WIB
53 Masrizal	08/05/2023 19:35:00 WIB
54 Arah Madani	08/05/2023 19:35:40 WIB
55 Sufrizal Lubis	08/05/2023 19:36:44 WIB
56 Basrizal	08/05/2023 19:36:54 WIB
57 Muhammad Ahyar	08/05/2023 19:37:23 WIB
58 Kemas Muhammad Ali Utih	08/05/2023 19:37:28 WIB
59 Muhammad Firdaus Abduh	08/05/2023 19:37:37 WIB
60 Isnu Harjo Prayitno	08/05/2023 19:38:05 WIB
61 Nurfadhilah Rizmi	08/05/2023 19:38:05 WIB
62 Firda Faradillah	08/05/2023 19:38:12 WIB
63 Julita	08/05/2023 19:38:36 WIB
64 Sunandar PS	08/05/2023 19:38:52 WIB
65 Riki Martim	08/05/2023 19:39:00 WIB

66 Sudirman Anas	08/05/2023 19:39:09 WIB
67 Deni Wisnu	08/05/2023 19:39:18 WIB
68 Umar Bassam	08/05/2023 19:39:30 WIB
69 Muhammad Mujaini	08/05/2023 19:39:33 WIB
70 Budiman Putra	08/05/2023 19:39:41 WIB
71 Suintin Yono	08/05/2023 19:39:46 WIB
72 Azzuhri Al Bajuri	08/05/2023 19:39:48 WIB
73 Agung Syaputra	08/05/2023 19:40:09 WIB
74 Khairil Amrillah	08/05/2023 19:40:11 WIB
75 Abdul Rasyid	08/05/2023 19:40:12 WIB
76 Mansur Naga	08/05/2023 19:40:14 WIB
77 Dudi Usman Sahupala	08/05/2023 19:40:17 WIB
78 Della Haerunisa	08/05/2023 19:40:18 WIB
79 Khairul Anwar Hasibuan	08/05/2023 19:40:24 WIB

80 Nardi Wiharto	08/05/2023 19:40:37 WIB
81 Ibnu Saleh	08/05/2023 19:40:46 WIB
82 Tuwarno	08/05/2023 19:41:26 WIB
83 Emisah	08/05/2023 19:41:30 WIB
84 Mohammad Indra Kelana	08/05/2023 19:41:48 WIB
85 Sudiami	08/05/2023 19:42:06 WIB
86 Sahri Mewar	08/05/2023 19:42:23 WIB
87 Eka Pala Suryana	08/05/2023 19:42:49 WIB
88 Muhamad Budiono	08/05/2023 19:43:47 WIB
89 Busyraa	08/05/2023 19:43:59 WIB
90 Purwanto	08/05/2023 19:44:58 WIB
91 Dwi Histiningrum	08/05/2023 19:45:40 WIB
92 Deky Mulyadi	08/05/2023 19:45:46 WIB
93 Aleks Pigai	08/05/2023 19:46:06 WIB

94 Rismaya Nurbaity	08/05/2023 19:47:12 WIB
95 Ismail Nganggon	08/05/2023 19:47:19 WIB
96 Andika Saputra	08/05/2023 19:47:56 WIB
97 Rizki Masapan	08/05/2023 19:48:07 WIB
98 Mustafa M. Yacob	08/05/2023 19:48:20 WIB
99 Faudjan Muslim	08/05/2023 19:49:14 WIB
100 Deviyanti Dwiningsih	08/05/2023 19:49:53 WIB
101 Helmi Al Djufri	08/05/2023 19:50:12 WIB
102 Imam Rizki Pratama	08/05/2023 19:51:41 WIB
103 Anggi Aribowo	08/05/2023 19:52:14 WIB
104 Lilis Nurmalasari	08/05/2023 19:53:05 WIB
105 Hoirullah	08/05/2023 19:54:57 WIB
106 H. Anton Hariyadi	08/05/2023 19:55:26 WIB
107 Muhammad Abizar Al Ghifari Musya	08/05/2023 19:58:12 WIB

108 Nurwahidah	08/05/2023 20:04:05 WIB
109 Ramlan Damanik	08/05/2023 20:09:54 WIB
110 Isra Safar	08/05/2023 20:11:41 WIB
111 Rahman Pulani	08/05/2023 20:15:34 WIB
112 Muhammad Arnif	08/05/2023 20:16:44 WIB
113 Andi Hamdiah	08/05/2023 20:16:49 WIB
114 Fahmi Ali Ramdhani	08/05/2023 20:17:47 WIB
115 Aminanto	08/05/2023 20:18:07 WIB
116 Ruli Margianto	08/05/2023 20:22:50 WIB
117 Amir Hamzah Sihombing	08/05/2023 20:36:22 WIB
118 Imam Sutopo	08/05/2023 20:46:26 WIB
119 Darussalam	08/05/2023 20:47:09 WIB
120 RIJALUN SHOLIHIN SIMATUPANG	08/05/2023 20:49:03 WIB
121 Djumrin	08/05/2023 20:56:35 WIB

122 Martoni	08/05/2023 20:58:27 WIB
123 Neneng Annisa Rahmah	08/05/2023 21:00:57 WIB
124 Akhmad Bumi	08/05/2023 21:03:51 WIB
125 Ahmar Ihsan Rangkuti	08/05/2023 21:05:40 WIB
126 Syamsul Bahri	08/05/2023 21:15:04 WIB
127 Sri Astuti A. Kadir	08/05/2023 21:22:16 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Ernawati		08/05/2023 19:31:18 WIB
2 Putri Amalia		08/05/2023 19:33:33 WIB
3 Masrizal		08/05/2023 19:35:23 WIB
4 Arah Madani		08/05/2023 19:35:46 WIB
5 Martadinata		08/05/2023 19:37:00 WIB
6 Sufrizal Lubis		08/05/2023 19:37:00 WIB

7 Basrizal	08/05/2023 19:37:02 WIB
8 Muhammad Fadhly Gella	08/05/2023 19:37:14 WIB
9 Suminarso	08/05/2023 19:37:15 WIB
10 Ferlan Niko	08/05/2023 19:37:30 WIB
11 Kemas Muhammad Ali Utih	08/05/2023 19:37:36 WIB
12 Aristya Kusuma Dewi	08/05/2023 19:37:41 WIB
13 Muhammad Ahyar	08/05/2023 19:37:42 WIB
14 Muhammad Firdaus Abduh	08/05/2023 19:37:51 WIB
15 Suyadi	08/05/2023 19:37:56 WIB
16 Julita	08/05/2023 19:38:08 WIB
17 Nurfadhilah Rizmi	08/05/2023 19:38:09 WIB
18 Abdul Naim	08/05/2023 19:38:15 WIB
19 Isnu Harjo Prayitno	08/05/2023 19:38:19 WIB
20 Firda Faradillah	08/05/2023 19:38:25 WIB

21 Dede	08/05/2023 19:38:29 WIB
22 Ahmad Rizal Kurniawan	08/05/2023 19:38:29 WIB
23 Ahmad Nur Rois	08/05/2023 19:38:41 WIB
24 Fricilia Jelita Wartabone	08/05/2023 19:38:55 WIB
25 Furkan Abdullah	08/05/2023 19:38:56 WIB
26 Taufik Hidayat	08/05/2023 19:39:05 WIB
27 Riki Martim	08/05/2023 19:39:07 WIB
28 Sudirman Anas	08/05/2023 19:39:12 WIB
29 Ampria Bukhori	08/05/2023 19:39:22 WIB
30 Nuharman	08/05/2023 19:39:24 WIB
31 Deni Wisnu	08/05/2023 19:39:28 WIB
32 Khalid Dhiya UI Haqq	08/05/2023 19:39:29 WIB
33 Umar Bassam	08/05/2023 19:39:33 WIB
34 Muhammad Mujaini	08/05/2023 19:39:47 WIB

35 Budiman Putra	08/05/2023 19:39:52 WIB
36 Azzuhri Al Bajuri	08/05/2023 19:39:52 WIB
37 Suintin Yono	08/05/2023 19:39:56 WIB
38 Reza Revorma Putra Alam	08/05/2023 19:40:02 WIB
39 Amal Hamsah	08/05/2023 19:40:06 WIB
40 Agung Syaputra	08/05/2023 19:40:13 WIB
41 Mansur Naga	08/05/2023 19:40:15 WIB
42 Abdul Rasyid	08/05/2023 19:40:18 WIB
43 Dudi Usman Sahupala	08/05/2023 19:40:22 WIB
44 Khairil Amrillah	08/05/2023 19:40:25 WIB
45 Della Haerunisa	08/05/2023 19:40:28 WIB
46 Khairul Anwar Hasibuan	08/05/2023 19:40:32 WIB
47 Darmiyanto	08/05/2023 19:40:35 WIB
48 Nardi Wiharto	08/05/2023 19:40:42 WIB

49 Aldy Putranto	08/05/2023 19:40:49 WIB
50 Ibnu Saleh	08/05/2023 19:40:49 WIB
51 Arip Imawan	08/05/2023 19:41:30 WIB
52 Tuwarno	08/05/2023 19:41:31 WIB
53 H. Deden Kurnaedi	08/05/2023 19:41:40 WIB
54 Suintin Yono	08/05/2023 19:41:40 WIB
55 Heru Julianto	08/05/2023 19:41:41 WIB
56 Emisah	08/05/2023 19:41:46 WIB
57 Mohammad Indra Kelana	08/05/2023 19:41:55 WIB
58 Sudiami	08/05/2023 19:42:14 WIB
59 Sahri Mewar	08/05/2023 19:42:28 WIB
60 Hardiyansyah	08/05/2023 19:42:38 WIB
61 Muhammad Wiman Wibisana	08/05/2023 19:42:44 WIB
62 Eka Pala Suryana	08/05/2023 19:42:54 WIB

63 Suintin Yono	08/05/2023 19:43:30 WIB
64 Muhammad Sayyid Kamil Adam	08/05/2023 19:43:32 WIB
65 Muhamad Budiono	08/05/2023 19:43:51 WIB
66 Busyraa	08/05/2023 19:44:09 WIB
67 Ihsan Abdillah	08/05/2023 19:44:17 WIB
68 Edius Pratama	08/05/2023 19:44:40 WIB
69 H. Zulfadillah	08/05/2023 19:44:46 WIB
70 Kusanto	08/05/2023 19:44:51 WIB
71 Syaidah Irma	08/05/2023 19:44:58 WIB
72 Purwanto	08/05/2023 19:45:03 WIB
73 Dwi Histiningrum	08/05/2023 19:45:48 WIB
74 Deky Mulyadi	08/05/2023 19:45:53 WIB
75 Rusdi Agus Susanto	08/05/2023 19:46:21 WIB
76 Aleks Pigai	08/05/2023 19:46:35 WIB

77 Rismaya Nurbaity	08/05/2023 19:47:18 WIB
78 Ismail Nganggon	08/05/2023 19:47:34 WIB
79 Ismail Nganggon	08/05/2023 19:47:34 WIB
80 Panji Brata Kusuma	08/05/2023 19:47:40 WIB
81 Suntin Yono	08/05/2023 19:47:50 WIB
82 Hawari Muhammad	08/05/2023 19:48:03 WIB
83 Andika Saputra	08/05/2023 19:48:09 WIB
84 Rizki Masapan	08/05/2023 19:48:15 WIB
85 Mustafa M. Yacob	08/05/2023 19:48:34 WIB
86 Faudjan Muslim	08/05/2023 19:49:27 WIB
87 Budiman Mubar	08/05/2023 19:49:49 WIB
88 Deviyanti Dwiningsih	08/05/2023 19:50:05 WIB
89 Helmi Al Djufri	08/05/2023 19:50:18 WIB
90 Tulus Wahjuono	08/05/2023 19:51:47 WIB

91 Imam Rizki Pratama	08/05/2023 19:51:57 WIB
92 Anggi Aribowo	08/05/2023 19:52:17 WIB
93 Lilis Nurmalasari	08/05/2023 19:53:09 WIB
94 Hoirullah	08/05/2023 19:54:59 WIB
95 H. Anton Hariyadi	08/05/2023 19:55:31 WIB
96 Sultan	08/05/2023 19:56:42 WIB
97 Galih Achmad Nasukhah	08/05/2023 19:57:26 WIB
98 Muhammad Abizar Al Ghifari Musya	08/05/2023 19:58:16 WIB
99 Fardy Iskandar	08/05/2023 20:01:45 WIB
100 Nadiya Ulfa	08/05/2023 20:04:15 WIB
101 Nurwahidah	08/05/2023 20:04:15 WIB
102 Nurwahidah	08/05/2023 20:04:29 WIB
103 Ali Wiji Edhy	08/05/2023 20:06:04 WIB
104 Ali Wiji Edhy	08/05/2023 20:06:13 WIB

105 Ali Wiji Edhy	08/05/2023 20:06:15 WIB
106 Seta Mahardika Caesar Wahyuono	08/05/2023 20:10:18 WIB
107 Ramlan Damanik	08/05/2023 20:10:22 WIB
108 Isra Safar	08/05/2023 20:14:29 WIB
109 Muhammad Arnif	08/05/2023 20:16:50 WIB
110 Andi Hamdiah	08/05/2023 20:16:54 WIB
111 Joko Fitriani Prabowo	08/05/2023 20:17:01 WIB
112 ATRI FADLY B	08/05/2023 20:17:49 WIB
113 Fahmi Ali Ramdhani	08/05/2023 20:17:50 WIB
114 Aminanto	08/05/2023 20:18:23 WIB
115 Rahman Pulani	08/05/2023 20:19:48 WIB
116 Andes Robensyah	08/05/2023 20:33:50 WIB
117 Amir Hamzah Sihombing	08/05/2023 20:36:25 WIB
118 Imam Sutopo	08/05/2023 20:46:36 WIB

119 Muhammad Azwar Dukalang	08/05/2023 20:47:11 WIB
120 Darussalam	08/05/2023 20:47:22 WIB
121 RIJALUN SHOLIHIN SIMATUPANG	08/05/2023 20:49:05 WIB
122 Riki Sambora	08/05/2023 20:57:26 WIB
123 Djumrin	08/05/2023 20:57:52 WIB
124 Djumrin	08/05/2023 20:57:52 WIB
125 Martoni	08/05/2023 20:58:56 WIB
126 Resky Arisal	08/05/2023 20:59:39 WIB
127 Neneng Annisa Rahmah	08/05/2023 21:01:00 WIB
128 Resky Arisal	08/05/2023 21:01:08 WIB
129 Akhmad Bumi	08/05/2023 21:03:57 WIB
130 Ahmar Ihsan Rangkuti	08/05/2023 21:05:46 WIB
131 Syamsul Bahri	08/05/2023 21:15:16 WIB
132 Edi Sumardi	08/05/2023 21:17:49 WIB

133 Sri Astuti A. Kadir	08/05/2023 21:22:21 WIB
134 Kurniawan	08/05/2023 21:36:55 WIB
135 Malik Raudhi Tuasamu	08/05/2023 21:38:15 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Martadinata		09/05/2023 07:34:46 WIB
2 Nurfadhilah Rizmi		09/05/2023 07:35:37 WIB
3 Ahmad Nur Rois		09/05/2023 07:37:17 WIB
4 Abdul Naim		09/05/2023 07:37:27 WIB
5 Abdul Rasyid		09/05/2023 07:38:06 WIB
6 Ihsan Abdillah		09/05/2023 07:38:43 WIB
7 Andika Saputra		09/05/2023 07:38:58 WIB
8 Dudi Usman Sahupala		09/05/2023 07:39:05 WIB
9 Deni Wisnu		

	09/05/2023 07:40:20 WIB
10 Isnu Harjo Prayitno	09/05/2023 07:40:29 WIB
11 Budiman Putra	09/05/2023 07:41:29 WIB
12 Arip Imawan	09/05/2023 07:41:40 WIB
13 Sunandar PS	09/05/2023 07:41:41 WIB
14 Tuwarno	09/05/2023 07:42:22 WIB
15 Sahri Mewar	09/05/2023 07:42:58 WIB
16 Evi Risna Yanti	09/05/2023 07:43:04 WIB
17 Rahman Pulani	09/05/2023 07:43:28 WIB
18 Darussalam	09/05/2023 07:43:34 WIB
19 Panji Brata Kusuma	09/05/2023 07:43:59 WIB
20 Rismaya Nurbaity	09/05/2023 07:44:04 WIB
21 Amal Hamsah	09/05/2023 07:44:14 WIB
22 Ibnu Saleh	09/05/2023 07:44:38 WIB
23 Mustafa M. Yacob	

	09/05/2023 07:44:39 WIB
24 Taufik Hidayat	09/05/2023 07:45:01 WIB
25 Resky Arisal	09/05/2023 07:45:15 WIB
26 Suyadi	09/05/2023 07:45:40 WIB
27 Hawari Muhammad	09/05/2023 07:45:44 WIB
28 Muhammad Wiman Wibisana	09/05/2023 07:46:01 WIB
29 Kusanto	09/05/2023 07:46:17 WIB
30 Isra Safar	09/05/2023 07:46:26 WIB
31 Imam Rizki Pratama	09/05/2023 07:46:27 WIB
32 Suminarso	09/05/2023 07:46:34 WIB
33 Masrizal	09/05/2023 07:46:36 WIB
34 Nadiya Ulfa	09/05/2023 07:46:39 WIB
35 Syaidah Irma	09/05/2023 07:46:59 WIB
36 Julita	09/05/2023 07:47:03 WIB
37 Tulus Wahjuono	

	09/05/2023 07:47:04 WIB
38 Muhammad Syarif Hidayatullah Akbar	09/05/2023 07:47:05 WIB
39 Ahmad Rizal Kurniawan	09/05/2023 07:47:18 WIB
40 Darmiyanto	09/05/2023 07:47:21 WIB
41 Emisah	09/05/2023 07:47:28 WIB
42 Sufrizal Lubis	09/05/2023 07:47:28 WIB
43 Suntin Yono	09/05/2023 07:47:32 WIB
44 Khalid Dhiya UI Haqq	09/05/2023 07:47:37 WIB
45 Ferlan Niko	09/05/2023 07:47:37 WIB
46 H. Deden Kurnaedi	09/05/2023 07:47:42 WIB
47 Budiman Mubar	09/05/2023 07:48:04 WIB
48 H. Deden Kurnaedi	09/05/2023 07:48:09 WIB
49 Umar Bassam	09/05/2023 07:48:14 WIB
50 Nuharman	09/05/2023 07:48:19 WIB
51 H. Zulfadillah	

	09/05/2023 07:48:26 WIB
52 Muhammad Firdaus Abduh	09/05/2023 07:48:26 WIB
53 Imam Sutopo	09/05/2023 07:48:37 WIB
54 Ramlan Damanik	09/05/2023 07:48:39 WIB
55 Aristya Kusuma Dewi	09/05/2023 07:48:42 WIB
56 Sabarrudin	09/05/2023 07:48:46 WIB
57 Hardiyansyah	09/05/2023 07:48:54 WIB
58 Della Haerunisa	09/05/2023 07:49:00 WIB
59 Eka Pala Suryana	09/05/2023 07:49:02 WIB
60 Furkan Abdullah	09/05/2023 07:49:22 WIB
61 Joko Sulistiono	09/05/2023 07:49:26 WIB
62 Nuharman	09/05/2023 07:49:31 WIB
63 Rizki Masapan	09/05/2023 07:49:32 WIB
64 Neneng Annisa Rahmah	09/05/2023 07:49:35 WIB
65 Busyraa	

	09/05/2023 07:49:50 WIB
66 Khairil Amrillah	09/05/2023 07:49:52 WIB
67 Nurul Fariati	09/05/2023 07:49:53 WIB
68 Putri Amalia	09/05/2023 07:50:12 WIB
69 Resky Arisal	09/05/2023 07:50:17 WIB
70 Martoni	09/05/2023 07:50:31 WIB
71 Purwanto	09/05/2023 07:50:32 WIB
72 Nurwahidah	09/05/2023 07:50:32 WIB
73 Dede	09/05/2023 07:50:33 WIB
74 Firda Faradillah	09/05/2023 07:50:34 WIB
75 Aleks Pigai	09/05/2023 07:50:42 WIB
76 Nardi Wiharto	09/05/2023 07:51:00 WIB
77 Dwi Histiningrum	09/05/2023 07:51:01 WIB
78 Junaidi	09/05/2023 07:51:07 WIB
79 Sultan	

	09/05/2023 07:51:08 WIB
80 Sri Astuti A. Kadir	09/05/2023 07:51:14 WIB
81 Sri Astuti A. Kadir	09/05/2023 07:51:14 WIB
82 Galih Achmad Nasukhah	09/05/2023 07:51:19 WIB
83 Sudiami	09/05/2023 07:51:28 WIB
84 Khairul Anwar Hasibuan	09/05/2023 07:52:14 WIB
85 Malik Raudhi Tuasamu	09/05/2023 07:52:38 WIB
86 Mansur Naga	09/05/2023 07:52:46 WIB
87 Lilis Nurmalasari	09/05/2023 07:52:49 WIB
88 Aminanto	09/05/2023 07:53:21 WIB
89 Faudjan Muslim	09/05/2023 07:53:23 WIB
90 Rusdi Agus Susanto	09/05/2023 07:53:27 WIB
91 Ernawati	09/05/2023 07:54:03 WIB
92 Ampria Bukhori	09/05/2023 07:54:04 WIB
93 Azzuhri Al Bajuri	

	09/05/2023 07:54:05 WIB
94 Fardy Iskandar	09/05/2023 07:54:45 WIB
95 Akhmad Bumi	09/05/2023 07:55:15 WIB
96 Suntin Yono	09/05/2023 07:55:31 WIB
97 Mulyanto	09/05/2023 07:55:42 WIB
98 Muhammad Sayyid Kamil Adam	09/05/2023 07:55:44 WIB
99 Suntin Yono	09/05/2023 07:55:51 WIB
100 Agung Syaputra	09/05/2023 07:56:10 WIB
101 Fahmi Ali Ramdhani	09/05/2023 07:56:23 WIB
102 Muhammad Abizar Al Ghifari Musya	09/05/2023 07:56:32 WIB
103 Seta Mahardika Caesar Wahyuono	09/05/2023 07:57:10 WIB
104 Ismail Nganggon	09/05/2023 07:58:28 WIB
105 Arah Madani	09/05/2023 07:59:02 WIB
106 Reza Revorma Putra Alam	09/05/2023 07:59:34 WIB
107 Riki Martim	

	09/05/2023 07:59:55 WIB
108 Muhammad Mujaini	09/05/2023 08:00:29 WIB
109 Yusri	09/05/2023 08:00:48 WIB
110 Deky Mulyadi	09/05/2023 08:01:15 WIB
111 Fricilia Jelita Wartabone	09/05/2023 08:01:22 WIB
112 Mohammad Indra Kelana	09/05/2023 08:02:16 WIB
113 Syamsul Bahri	09/05/2023 08:02:52 WIB
114 ATRI FADLY B	09/05/2023 08:04:22 WIB
115 Faisal	09/05/2023 08:05:30 WIB
116 Deviyanti Dwiningsih	09/05/2023 08:07:02 WIB
117 Heru Julianto	09/05/2023 08:09:40 WIB
118 Muhammad Azwar Dukalang	09/05/2023 08:17:10 WIB
119 Riki Sambora	09/05/2023 08:18:33 WIB
120 Amir Hamzah Sihombing	09/05/2023 08:18:33 WIB
121 Muhammad Arnif	

	09/05/2023 08:18:37 WIB
122 Edius Pratama	09/05/2023 08:23:41 WIB
123 Ruli Margianto	09/05/2023 08:27:42 WIB
124 Sudirman Anas	09/05/2023 08:27:42 WIB
125 Anggi Aribowo	09/05/2023 08:31:12 WIB
126 Ali Wiji Edhy	09/05/2023 08:34:20 WIB
127 Muhamad Budiono	09/05/2023 08:37:47 WIB
128 Muhammad Ahyar	09/05/2023 08:40:23 WIB
129 Suntin Yono	09/05/2023 08:40:26 WIB
130 Shalihin Alamsyah Putra	09/05/2023 08:46:23 WIB
131 Andes Robensyah	09/05/2023 08:48:35 WIB
132 Andi Hamdiah	09/05/2023 08:58:01 WIB
133 Joko Fitriani Prabowo	09/05/2023 08:58:07 WIB
134 Edi Sumardi	09/05/2023 08:59:45 WIB
135 Helmi Al Djufri	

	09/05/2023 09:13:13 WIB
136 RIJALUN SHOLIHIN SIMATUPANG	09/05/2023 09:14:19 WIB
137 Basrizal	09/05/2023 09:16:51 WIB
138 Hikmat Prihadi	09/05/2023 09:18:14 WIB
139 Syarif Pati Pilohi	09/05/2023 09:27:26 WIB
140 H. Anton Hariyadi	09/05/2023 09:34:41 WIB
141 Kemas Muhammad Ali Utih	09/05/2023 09:35:55 WIB
142 Ahmar Ihsan Rangkuti	09/05/2023 09:44:33 WIB
143 Djumrin	09/05/2023 09:46:19 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Putri Amalia		09/05/2023 10:05:04 WIB
2 Joko Fitrian Prabowo		09/05/2023 10:08:13 WIB
3 Ahmad Rizal Kurniawan		09/05/2023 10:08:21 WIB

4 Martoni	09/05/2023 10:09:08 WIB
5 Sunandar PS	09/05/2023 10:09:10 WIB
6 Dede	09/05/2023 10:09:21 WIB
7 Kemas Muhammad Ali Utih	09/05/2023 10:10:22 WIB
8 Muhammad Wiman Wibisana	09/05/2023 10:10:43 WIB
9 Abdul Naim	09/05/2023 10:10:56 WIB
10 Abdul Rasyid	09/05/2023 10:12:05 WIB
11 Budiman Mubar	09/05/2023 10:12:11 WIB
12 Agung Syaputra	09/05/2023 10:12:12 WIB
13 Panji Brata Kusuma	09/05/2023 10:12:12 WIB
14 Sabarrudin	09/05/2023 10:12:12 WIB
15 Galih Achmad Nasukhah	09/05/2023 10:12:34 WIB
16 Sufrizal Lubis	09/05/2023 10:13:23 WIB
17 Faisal	09/05/2023 10:13:53 WIB

18 Ihsan Abdillah	09/05/2023 10:13:53 WIB
19 Aldy Putranto	09/05/2023 10:13:58 WIB
20 Ahmad Nur Rois	09/05/2023 10:14:01 WIB
21 Joko Sulistiono	09/05/2023 10:14:03 WIB
22 Taufik Hidayat	09/05/2023 10:14:03 WIB
23 Muhammad Azwar Dukalang	09/05/2023 10:14:22 WIB
24 Akhmad Bumi	09/05/2023 10:14:48 WIB
25 Hardiyansyah	09/05/2023 10:14:51 WIB
26 Muhammad Fadhly Gella	09/05/2023 10:14:57 WIB
27 Riki Martim	09/05/2023 10:15:06 WIB
28 Mohammad Indra Kelana	09/05/2023 10:15:20 WIB
29 Malik Raudhi Tuasamu	09/05/2023 10:15:24 WIB
30 Khairul Anwar Hasibuan	09/05/2023 10:15:33 WIB
31 Nadiya Ulfa	09/05/2023 10:15:35 WIB

32 Mustafa M. Yacob	09/05/2023 10:15:46 WIB
33 Suyadi	09/05/2023 10:15:48 WIB
34 Sahri Mewar	09/05/2023 10:15:58 WIB
35 Ismail Nganggon	09/05/2023 10:16:24 WIB
36 Amir Hamzah Sihombing	09/05/2023 10:16:25 WIB
37 Imam Sutopo	09/05/2023 10:16:26 WIB
38 Darmiyanto	09/05/2023 10:16:31 WIB
39 Suminarso	09/05/2023 10:16:38 WIB
40 Khalid Dhiya UI Haqq	09/05/2023 10:16:45 WIB
41 Ampria Bukhori	09/05/2023 10:16:47 WIB
42 Sultan	09/05/2023 10:16:48 WIB
43 Reza Revorma Putra Alam	09/05/2023 10:16:51 WIB
44 Ali Wiji Edhy	09/05/2023 10:16:56 WIB
45 Edi Sumardi	09/05/2023 10:17:06 WIB

46 Azzuhri Al Bajuri	09/05/2023 10:17:19 WIB
47 Sudiami	09/05/2023 10:17:21 WIB
48 Umar Bassam	09/05/2023 10:17:22 WIB
49 Muhammad Sayyid Kamil Adam	09/05/2023 10:18:02 WIB
50 Imam Rizki Pratama	09/05/2023 10:18:04 WIB
51 Dudi Usman Sahupala	09/05/2023 10:18:15 WIB
52 Ernawati	09/05/2023 10:18:33 WIB
53 Fricilia Jelita Wartabone	09/05/2023 10:18:34 WIB
54 Ferlan Niko	09/05/2023 10:18:38 WIB
55 Nuharman	09/05/2023 10:18:46 WIB
56 Muhammad Mujaini	09/05/2023 10:18:51 WIB
57 Busyraa	09/05/2023 10:19:09 WIB
58 Andi Hamdiah	09/05/2023 10:19:21 WIB
59 Hawari Muhammad	09/05/2023 10:19:26 WIB

60 Suintin Yono	09/05/2023 10:19:30 WIB
61 Darussalam	09/05/2023 10:19:34 WIB
62 ATRI FADLY B	09/05/2023 10:19:38 WIB
63 Furkan Abdullah	09/05/2023 10:19:41 WIB
64 Arip Imawan	09/05/2023 10:19:56 WIB
65 Khairil Amrillah	09/05/2023 10:20:08 WIB
66 Julita	09/05/2023 10:20:14 WIB
67 Muhammad Arnif	09/05/2023 10:20:28 WIB
68 Nardi Wiharto	09/05/2023 10:20:44 WIB
69 Tulus Wahjuono	09/05/2023 10:20:55 WIB
70 Della Haerunisa	09/05/2023 10:21:15 WIB
71 Masrizal	09/05/2023 10:21:23 WIB
72 Aleks Pigai	09/05/2023 10:22:19 WIB
73 Arya Jagad Pamungkas	09/05/2023 10:22:33 WIB

74 Helmi Al Djufri	09/05/2023 10:23:07 WIB
75 Abdul Mamat Irawan	09/05/2023 10:23:56 WIB
76 Mansur Naga	09/05/2023 10:24:08 WIB
77 Firda Faradillah	09/05/2023 10:25:05 WIB
78 Nurwahidah	09/05/2023 10:25:35 WIB
79 Muhammad Syarif Hidayatullah Akbar	09/05/2023 10:25:57 WIB
80 Muhamad Budiono	09/05/2023 10:26:12 WIB
81 Kusanto	09/05/2023 10:26:24 WIB
82 Riki Sambora	09/05/2023 10:26:28 WIB
83 Mulyanto	09/05/2023 10:26:37 WIB
84 Martadinata	09/05/2023 10:26:59 WIB
85 Kurniawan	09/05/2023 10:27:01 WIB
86 Isra Safar	09/05/2023 10:27:23 WIB
87 Sri Astuti A. Kadir	09/05/2023 10:28:17 WIB

88 Arah Madani	09/05/2023 10:28:44 WIB
89 Lilis Nurmalasari	09/05/2023 10:28:54 WIB
90 Aminanto	09/05/2023 10:28:58 WIB
91 Emisah	09/05/2023 10:30:58 WIB
92 Basrizal	09/05/2023 10:30:59 WIB
93 H. Zulfadillah	09/05/2023 10:31:26 WIB
94 H. Anton Hariyadi	09/05/2023 10:32:11 WIB
95 Dwi Histiningrum	09/05/2023 10:32:31 WIB
96 Andika Saputra	09/05/2023 10:32:49 WIB
97 Syamsul Bahri	09/05/2023 10:34:22 WIB
98 Syaidah Irma	09/05/2023 10:35:20 WIB
99 Djumrin	09/05/2023 10:36:36 WIB
100 Hoirullah	09/05/2023 10:37:29 WIB
101 Deky Mulyadi	09/05/2023 10:37:50 WIB

102 Junaidi	09/05/2023 10:39:55 WIB
103 Eka Pala Suryana	09/05/2023 10:42:54 WIB
104 Deni Wisnu	09/05/2023 10:44:20 WIB
105 Muhammad Abizar Al Ghifari Musya	09/05/2023 10:44:30 WIB
106 RIJALUN SHOLIHIN SIMATUPANG	09/05/2023 10:45:31 WIB
107 Andes Robensyah	09/05/2023 10:46:09 WIB
108 Rahman Pulani	09/05/2023 10:46:21 WIB
109 Neneng Annisa Rahmah	09/05/2023 10:46:26 WIB
110 Edius Pratama	09/05/2023 10:46:55 WIB
111 Evi Risna Yanti	09/05/2023 10:49:01 WIB
112 Yusri	09/05/2023 10:49:33 WIB
113 Aristya Kusuma Dewi	09/05/2023 10:50:34 WIB
114 Sudirman Anas	09/05/2023 10:51:11 WIB
115 Heru Julianto	09/05/2023 10:51:36 WIB

116 Seta Mahardika Caesar Wahyuono	09/05/2023 10:53:24 WIB
117 H. Deden Kurnaedi	09/05/2023 10:55:34 WIB
118 Anggi Aribowo	09/05/2023 10:56:23 WIB
119 Ramlan Damanik	09/05/2023 10:56:29 WIB
120 Nurfadhilah Rizmi	09/05/2023 10:58:11 WIB
121 Faudjan Muslim	09/05/2023 10:58:21 WIB
122 Ruli Margianto	09/05/2023 11:03:31 WIB
123 Deviyanti Dwiningsih	09/05/2023 11:06:01 WIB
124 Budiman Putra	09/05/2023 11:06:38 WIB
125 Tuwarno	09/05/2023 11:09:40 WIB
126 Rizki Masapan	09/05/2023 11:14:18 WIB
127 Amal Hamsah	09/05/2023 11:24:06 WIB
128 Resky Arisal	09/05/2023 11:24:52 WIB
129 Resky Arisal	09/05/2023 11:27:07 WIB

130 Rismaya Nurbaity	09/05/2023 11:28:28 WIB
131 Purwanto	09/05/2023 11:28:58 WIB
132 Shalihin Alamsyah Putra	09/05/2023 11:30:15 WIB
133 Muhammad Ahyar	09/05/2023 11:31:23 WIB
134 Fardy Iskandar	09/05/2023 11:31:23 WIB
135 Ahmar Ihsan Rangkuti	09/05/2023 11:33:51 WIB
136 Rusdi Agus Susanto	09/05/2023 11:50:56 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Muhammad Wiman Wibisana	09/05/2023 13:02:39 WIB
2	Nurfadhilah Rizmi	09/05/2023 13:02:47 WIB
3	Dudi Usman Sahupala	09/05/2023 13:08:26 WIB
4	Muhammad Abizar Al Ghifari Musya	09/05/2023 13:09:34 WIB
5	Ibnu Saleh	09/05/2023

	13:10:14 WIB
6 Mulyanto	09/05/2023 13:10:15 WIB
7 Imam Sutopo	09/05/2023 13:12:10 WIB
8 Galih Achmad Nasukhah	09/05/2023 13:12:50 WIB
9 Nuharman	09/05/2023 13:13:14 WIB
10 Muhammad Sayyid Kamil Adam	09/05/2023 13:14:25 WIB
11 Budiman Mubar	09/05/2023 13:14:37 WIB
12 Muhammad Firdaus Abduh	09/05/2023 13:15:28 WIB
13 Ferlan Niko	09/05/2023 13:15:28 WIB
14 Ihsan Abdillah	09/05/2023 13:15:29 WIB
15 Kemas Muhammad Ali Utih	09/05/2023 13:15:36 WIB
16 Kemas Muhammad Ali Utih	09/05/2023 13:15:36 WIB
17 Suminarso	09/05/2023 13:16:07 WIB
18 Ahmad Rizal Kurniawan	09/05/2023 13:16:30 WIB
19 Amal Hamsah	09/05/2023

	13:16:43 WIB
20 Hawari Muhammad	09/05/2023 13:16:54 WIB
21 Martadinata	09/05/2023 13:17:05 WIB
22 Sahri Mewar	09/05/2023 13:17:32 WIB
23 Abdul Rasyid	09/05/2023 13:17:33 WIB
24 Masrizal	09/05/2023 13:18:30 WIB
25 Ahmad Nur Rois	09/05/2023 13:18:56 WIB
26 Sufrizal Lubis	09/05/2023 13:18:59 WIB
27 Ismail Nganggon	09/05/2023 13:19:06 WIB
28 Panji Brata Kusuma	09/05/2023 13:19:37 WIB
29 Aminanto	09/05/2023 13:19:41 WIB
30 Budiman Putra	09/05/2023 13:20:00 WIB
31 Muhammad Fadhly Gella	09/05/2023 13:20:16 WIB
32 Furkan Abdullah	09/05/2023 13:20:23 WIB
33 Deni Wisnu	09/05/2023

	13:20:35 WIB
34 Umar Bassam	09/05/2023 13:20:36 WIB
35 Hikmat Prihadi	09/05/2023 13:20:54 WIB
36 Arip Imawan	09/05/2023 13:21:20 WIB
37 Deni Wisnu	09/05/2023 13:21:27 WIB
38 Isra Safar	09/05/2023 13:21:43 WIB
39 Tulus Wahjuono	09/05/2023 13:21:50 WIB
40 Deni Wisnu	09/05/2023 13:21:53 WIB
41 Mansur Naga	09/05/2023 13:21:58 WIB
42 Muhammad Azwar Dukalang	09/05/2023 13:22:04 WIB
43 Della Haerunisa	09/05/2023 13:22:15 WIB
44 Resky Arisal	09/05/2023 13:22:20 WIB
45 Firda Faradillah	09/05/2023 13:22:33 WIB
46 Sabarrudin	09/05/2023 13:22:40 WIB
47 Darmiyanto	09/05/2023

	13:22:52 WIB
48 Sultan	09/05/2023 13:22:53 WIB
49 Rismaya Nurbaity	09/05/2023 13:22:55 WIB
50 Sri Astuti A. Kadir	09/05/2023 13:23:03 WIB
51 Abdul Naim	09/05/2023 13:23:05 WIB
52 RIJALUN SHOLIHIN SIMATUPANG	09/05/2023 13:23:19 WIB
53 Muhammad Mujaini	09/05/2023 13:23:23 WIB
54 Malik Raudhi Tuasamu	09/05/2023 13:23:37 WIB
55 Mohammad Indra Kelana	09/05/2023 13:23:49 WIB
56 Kusanto	09/05/2023 13:24:09 WIB
57 Eka Pala Suryana	09/05/2023 13:24:25 WIB
58 Nadiya Ulfa	09/05/2023 13:24:33 WIB
59 Syaidah Irma	09/05/2023 13:24:48 WIB
60 Neneng Annisa Rahmah	09/05/2023 13:24:54 WIB
61 Ramlan Damanik	09/05/2023

	13:24:57 WIB
62 Muhamad Budiono	09/05/2023 13:25:06 WIB
63 Azzuhri Al Bajuri	09/05/2023 13:25:07 WIB
64 Yusri	09/05/2023 13:25:15 WIB
65 Resky Arisal	09/05/2023 13:25:27 WIB
66 Julita	09/05/2023 13:25:32 WIB
67 Akhmad Bumi	09/05/2023 13:25:33 WIB
68 Riki Martim	09/05/2023 13:25:50 WIB
69 Fahmi Ali Ramdhani	09/05/2023 13:25:50 WIB
70 Darussalam	09/05/2023 13:25:51 WIB
71 Sudirman Anas	09/05/2023 13:25:58 WIB
72 Dede	09/05/2023 13:26:18 WIB
73 Andika Saputra	09/05/2023 13:26:18 WIB
74 Basrizal	09/05/2023 13:26:24 WIB
75 Taufik Hidayat	09/05/2023

	13:26:32 WIB
76 Putri Amalia	09/05/2023 13:26:49 WIB
77 Agung Syaputra	09/05/2023 13:27:00 WIB
78 Sunandar PS	09/05/2023 13:27:03 WIB
79 Rizki Masapan	09/05/2023 13:27:07 WIB
80 Abdul Mamat Irawan	09/05/2023 13:27:21 WIB
81 Imam Rizki Pratama	09/05/2023 13:27:29 WIB
82 Riki Sambora	09/05/2023 13:27:36 WIB
83 Ernawati	09/05/2023 13:27:37 WIB
84 Andes Robensyah	09/05/2023 13:27:41 WIB
85 Dwi Histiningrum	09/05/2023 13:27:46 WIB
86 Khalid Dhiya UI Haqq	09/05/2023 13:28:07 WIB
87 Isnu Harjo Prayitno	09/05/2023 13:28:46 WIB
88 Reza Revorma Putra Alam	09/05/2023 13:29:12 WIB
89 Deky Mulyadi	09/05/2023

	13:29:30 WIB
90 Martoni	09/05/2023 13:29:43 WIB
91 Junaidi	09/05/2023 13:29:43 WIB
92 Hardiyansyah	09/05/2023 13:29:47 WIB
93 Deviyanti Dwiningsih	09/05/2023 13:29:50 WIB
94 Muhammad Arnif	09/05/2023 13:29:51 WIB
95 Fricilia Jelita Wartabone	09/05/2023 13:30:03 WIB
96 Aleks Pigai	09/05/2023 13:30:14 WIB
97 Amir Hamzah Sihombing	09/05/2023 13:30:21 WIB
98 Nardi Wiharto	09/05/2023 13:30:41 WIB
99 Khairil Amrillah	09/05/2023 13:31:17 WIB
100 Emisah	09/05/2023 13:31:26 WIB
101 H. Zulfadillah	09/05/2023 13:31:30 WIB
102 Nurwahidah	09/05/2023 13:31:57 WIB
103 Edius Pratama	09/05/2023

	13:32:28 WIB
104 Tuwarno	09/05/2023 13:32:50 WIB
105 Sudiami	09/05/2023 13:33:25 WIB
106 Ampria Bukhori	09/05/2023 13:35:40 WIB
107 Helmi Al Djufri	09/05/2023 13:36:05 WIB
108 Suyadi	09/05/2023 13:36:21 WIB
109 Suyadi	09/05/2023 13:37:02 WIB
110 Heru Julianto	09/05/2023 13:37:35 WIB
111 Suntin Yono	09/05/2023 13:37:41 WIB
112 Suntin Yono	09/05/2023 13:40:01 WIB
113 Khairul Anwar Hasibuan	09/05/2023 13:40:05 WIB
114 Rahman Pulani	09/05/2023 13:40:21 WIB
115 H. Deden Kurnaedi	09/05/2023 13:41:01 WIB
116 Aldy Putranto	09/05/2023 13:42:01 WIB
117 Mustafa M. Yacob	09/05/2023

	13:43:38 WIB
118 Nurul Fariati	09/05/2023 13:45:03 WIB
119 Busyraa	09/05/2023 13:45:42 WIB
120 Joko Sulistiono	09/05/2023 13:45:45 WIB
121 Fardy Iskandar	09/05/2023 13:46:15 WIB
122 Ruli Margianto	09/05/2023 13:46:51 WIB
123 ATRI FADLY B	09/05/2023 13:48:03 WIB
124 Faudjan Muslim	09/05/2023 13:52:25 WIB
125 Anggi Aribowo	09/05/2023 13:52:26 WIB
126 Ali Wiji Edhy	09/05/2023 13:52:55 WIB
127 Ahmar Ihsan Rangkuti	09/05/2023 13:53:01 WIB
128 Syarif Pati Pilohi	09/05/2023 13:53:06 WIB
129 Lilis Nurmalasari	09/05/2023 13:54:23 WIB
130 Rusdi Agus Susanto	09/05/2023 13:56:38 WIB
131 Evi Risna Yanti	09/05/2023

	13:59:18 WIB
132 Suntin Yono	09/05/2023 14:04:13 WIB
133 Arya Jagad Pamungkas	09/05/2023 14:04:13 WIB
134 Suntin Yono	09/05/2023 14:04:52 WIB
135 Joko Fitriani Prabowo	09/05/2023 14:04:58 WIB
136 Faisal	09/05/2023 14:09:01 WIB
137 Muhammad Syarif Hidayatullah Akbar	09/05/2023 14:10:19 WIB
138 Shalihin Alamsyah Putra	09/05/2023 14:21:30 WIB
139 Aristya Kusuma Dewi	09/05/2023 14:26:12 WIB
140 Djumrin	09/05/2023 14:46:21 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ahmad Rizal Kurniawan	10/05/2023 08:30:26 WIB
2	Emisah	10/05/2023 08:30:40 WIB
3	Martadinata	

	10/05/2023 08:32:12 WIB
4 Sudirman Anas	10/05/2023 08:32:20 WIB
5 Abdul Rasyid	10/05/2023 08:33:39 WIB
6 Budiman Putra	10/05/2023 08:34:19 WIB
7 Mustafa M. Yacob	10/05/2023 08:34:53 WIB
8 Panji Brata Kusuma	10/05/2023 08:35:13 WIB
9 Budiman Mubar	10/05/2023 08:35:28 WIB
10 Sufrizal Lubis	10/05/2023 08:35:39 WIB
11 Deni Wisnu	10/05/2023 08:35:54 WIB
12 Darussalam	10/05/2023 08:36:00 WIB
13 Reza Revorma Putra Alam	10/05/2023 08:36:07 WIB
14 Resky Arisal	10/05/2023 08:36:09 WIB
15 Andika Saputra	10/05/2023 08:36:12 WIB
16 Ahmad Nur Rois	10/05/2023 08:36:20 WIB
17 Abdul Naim	

	10/05/2023 08:36:22 WIB
18 Mohammad Indra Kelana	10/05/2023 08:36:23 WIB
19 Ernawati	10/05/2023 08:36:25 WIB
20 Masrizal	10/05/2023 08:36:26 WIB
21 Taufik Hidayat	10/05/2023 08:36:31 WIB
22 Furkan Abdullah	10/05/2023 08:36:34 WIB
23 Deni Wisnu	10/05/2023 08:36:47 WIB
24 Amir Hamzah Sihombing	10/05/2023 08:36:51 WIB
25 Ramlan Damanik	10/05/2023 08:36:53 WIB
26 Imam Rizki Pratama	10/05/2023 08:36:55 WIB
27 Azzuhri Al Bajuri	10/05/2023 08:36:59 WIB
28 Agung Syaputra	10/05/2023 08:37:01 WIB
29 Hawari Muhammad	10/05/2023 08:37:03 WIB
30 Tulus Wahjuono	10/05/2023 08:37:23 WIB
31 Nurul Fariati	

	10/05/2023 08:37:29 WIB
32 Dede	10/05/2023 08:37:34 WIB
33 Ampria Bukhori	10/05/2023 08:37:35 WIB
34 Dwi Histiningrum	10/05/2023 08:37:36 WIB
35 Ferlan Niko	10/05/2023 08:37:49 WIB
36 Muhammad Firdaus Abduh	10/05/2023 08:38:03 WIB
37 Resky Arisal	10/05/2023 08:38:21 WIB
38 Sri Astuti A. Kadir	10/05/2023 08:38:22 WIB
39 Khairil Amrillah	10/05/2023 08:38:24 WIB
40 Nuharman	10/05/2023 08:38:24 WIB
41 Abdul Mamat Irawan	10/05/2023 08:38:34 WIB
42 Neneng Annisa Rahmah	10/05/2023 08:38:41 WIB
43 Fricilia Jelita Wartabone	10/05/2023 08:38:44 WIB
44 Aminanto	10/05/2023 08:38:46 WIB
45 Malik Raudhi Tuasamu	

	10/05/2023 08:38:52 WIB
46 Muhamad Budiono	10/05/2023 08:38:53 WIB
47 Imam Sutopo	10/05/2023 08:39:01 WIB
48 Evi Risna Yanti	10/05/2023 08:39:05 WIB
49 Della Haerunisa	10/05/2023 08:39:05 WIB
50 Julita	10/05/2023 08:39:05 WIB
51 Suyadi	10/05/2023 08:39:12 WIB
52 Ismail Nganggon	10/05/2023 08:39:17 WIB
53 Andes Robensyah	10/05/2023 08:39:25 WIB
54 Aristya Kusuma Dewi	10/05/2023 08:39:25 WIB
55 Sunandar PS	10/05/2023 08:39:39 WIB
56 Rahman Pulani	10/05/2023 08:39:44 WIB
57 Akhmad Bumi	10/05/2023 08:39:45 WIB
58 Helmi Al Djufri	10/05/2023 08:39:45 WIB
59 Faudjan Muslim	

	10/05/2023 08:39:46 WIB
60 Galih Achmad Nasukhah	10/05/2023 08:40:04 WIB
61 Putri Amalia	10/05/2023 08:40:10 WIB
62 Isra Safar	10/05/2023 08:40:29 WIB
63 Aldy Putranto	10/05/2023 08:40:32 WIB
64 Arip Imawan	10/05/2023 08:40:33 WIB
65 Muhammad Azwar Dukalang	10/05/2023 08:40:37 WIB
66 Hardiyansyah	10/05/2023 08:40:39 WIB
67 Sultan	10/05/2023 08:40:50 WIB
68 Nurwahidah	10/05/2023 08:40:53 WIB
69 Lilis Nurmallasari	10/05/2023 08:41:10 WIB
70 Sudiami	10/05/2023 08:41:22 WIB
71 Deviyanti Dwiningsih	10/05/2023 08:41:41 WIB
72 Amal Hamsah	10/05/2023 08:41:42 WIB
73 Joko Sulistiono	

	10/05/2023 08:41:49 WIB
74 Nardi Wiharto	10/05/2023 08:41:59 WIB
75 Anggi Aribowo	10/05/2023 08:41:59 WIB
76 Firda Faradillah	10/05/2023 08:42:08 WIB
77 Martoni	10/05/2023 08:42:14 WIB
78 Muhammad Sayyid Kamil Adam	10/05/2023 08:42:15 WIB
79 Sabarrudin	10/05/2023 08:42:30 WIB
80 Muhammad Abizar Al Ghifari Musya	10/05/2023 08:42:44 WIB
81 Nadiya Ulfa	10/05/2023 08:43:07 WIB
82 Muhammad Wiman Wibisana	10/05/2023 08:43:08 WIB
83 Deky Mulyadi	10/05/2023 08:43:13 WIB
84 Umar Bassam	10/05/2023 08:43:24 WIB
85 Ihsan Abdillah	10/05/2023 08:43:40 WIB
86 Riki Martim	10/05/2023 08:43:50 WIB
87 RIJALUN SHOLIHIN SIMATUPANG	

	10/05/2023 08:43:53 WIB
88 Muhammad Mujaini	10/05/2023 08:44:16 WIB
89 Khalid Dhiya UI Haqq	10/05/2023 08:44:19 WIB
90 Isnu Harjo Prayitno	10/05/2023 08:45:05 WIB
91 Fahmi Ali Ramdhani	10/05/2023 08:45:31 WIB
92 Rusdi Agus Susanto	10/05/2023 08:45:36 WIB
93 Eka Pala Suryana	10/05/2023 08:45:47 WIB
94 Syaidah Irma	10/05/2023 08:45:51 WIB
95 Neneng Annisa Rahmah	10/05/2023 08:46:17 WIB
96 Suntin Yono	10/05/2023 08:46:27 WIB
97 Seta Mahardika Caesar Wahyuono	10/05/2023 08:46:30 WIB
98 Kemas Muhammad Ali Utih	10/05/2023 08:47:46 WIB
99 Khairul Anwar Hasibuan	10/05/2023 08:47:54 WIB
100 Mansur Naga	10/05/2023 08:47:59 WIB
101 Heru Julianto	

	10/05/2023 08:48:08 WIB
102 Basrizal	10/05/2023 08:50:23 WIB
103 Muhammad Arnif	10/05/2023 08:50:57 WIB
104 Rizki Masapan	10/05/2023 08:52:27 WIB
105 ATRI FADLY B	10/05/2023 08:52:45 WIB
106 Syamsul Bahri	10/05/2023 08:52:57 WIB
107 Suminarso	10/05/2023 08:55:36 WIB
108 Ahmar Ihsan Rangkuti	10/05/2023 08:56:54 WIB
109 H. Zulfadillah	10/05/2023 08:56:59 WIB
110 Darmiyanto	10/05/2023 08:57:11 WIB
111 Kusanto	10/05/2023 08:57:58 WIB
112 Aleks Pigai	10/05/2023 08:58:16 WIB
113 Busyraa	10/05/2023 08:59:40 WIB
114 Ibnu Saleh	10/05/2023 09:00:10 WIB
115 Faisal	

	10/05/2023 09:01:07 WIB
116 Junaidi	10/05/2023 09:01:43 WIB
117 Sahri Mewar	10/05/2023 09:06:41 WIB
118 Fardy Iskandar	10/05/2023 09:07:05 WIB
119 Hoirullah	10/05/2023 09:07:32 WIB
120 Edius Pratama	10/05/2023 09:15:43 WIB
121 Ruli Margianto	10/05/2023 09:16:47 WIB
122 Muhammad Syarif Hidayatullah Akbar	10/05/2023 09:22:03 WIB
123 Purwanto	10/05/2023 09:22:46 WIB
124 Nurfadhilah Rizmi	10/05/2023 09:25:51 WIB
125 Arah Madani	10/05/2023 09:37:41 WIB
126 Tuwarno	10/05/2023 09:44:02 WIB
127 Tuwarno	10/05/2023 09:44:30 WIB
128 Edi Sumardi	10/05/2023 09:45:35 WIB
129 H. Deden Kurnaedi	

	10/05/2023 09:46:33 WIB
130 Sukiswo	10/05/2023 10:03:12 WIB
131 Riki Sambora	10/05/2023 10:04:30 WIB
132 Joko Fitriani Prabowo	10/05/2023 10:06:40 WIB
133 Hikmat Prihadi	10/05/2023 10:07:37 WIB
134 Arya Jagad Pamungkas	10/05/2023 10:08:20 WIB
135 Muhammad Fathur	10/05/2023 10:08:58 WIB
136 Rismaya Nurbaity	10/05/2023 10:16:25 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Imam Sutopo		10/05/2023 10:00:31 WIB
2 Taufik Hidayat		10/05/2023 10:02:47 WIB
3 Sukiswo		10/05/2023 10:03:20 WIB
4 Joko Fitriani Prabowo		10/05/2023 10:06:48 WIB

5 Sabarrudin	10/05/2023 10:07:13 WIB
6 Muhammad Abizar Al Ghifari Musya	10/05/2023 10:07:45 WIB
7 Arya Jagad Pamungkas	10/05/2023 10:08:25 WIB
8 Muhammad Fathur	10/05/2023 10:09:06 WIB
9 Abdul Mamat Irawan	10/05/2023 10:12:03 WIB
10 Martadinata	10/05/2023 10:13:01 WIB
11 Rismaya Nurbaity	10/05/2023 10:16:28 WIB
12 Abdul Rasyid	10/05/2023 10:20:54 WIB
13 Deky Mulyadi	10/05/2023 10:22:04 WIB
14 Panji Brata Kusuma	10/05/2023 10:32:04 WIB
15 Deni Wisnu	10/05/2023 10:32:24 WIB
16 Mohammad Indra Kelana	10/05/2023 10:32:41 WIB
17 Putri Amalia	10/05/2023 10:33:55 WIB
18 Ferlan Niko	10/05/2023 10:34:04 WIB

19 Tuwarno	10/05/2023 10:34:10 WIB
20 Muhammad Wiman Wibisana	10/05/2023 10:34:24 WIB
21 Muhamad Budiono	10/05/2023 10:34:28 WIB
22 Reza Revorma Putra Alam	10/05/2023 10:34:38 WIB
23 Ramlan Damanik	10/05/2023 10:34:38 WIB
24 Hawari Muhammad	10/05/2023 10:35:14 WIB
25 Muhammad Sayyid Kamil Adam	10/05/2023 10:35:14 WIB
26 Tulus Wahjuono	10/05/2023 10:35:27 WIB
27 Sufrizal Lubis	10/05/2023 10:35:44 WIB
28 Ihsan Abdillah	10/05/2023 10:35:45 WIB
29 Amir Hamzah Sihombing	10/05/2023 10:35:56 WIB
30 Budiman Putra	10/05/2023 10:35:59 WIB
31 Joko Sulistiono	10/05/2023 10:36:00 WIB
32 Sri Astuti A. Kadir	10/05/2023 10:36:03 WIB

33 Sunandar PS	10/05/2023 10:36:07 WIB
34 Malik Raudhi Tuasamu	10/05/2023 10:36:09 WIB
35 Riki Sambora	10/05/2023 10:36:11 WIB
36 Sultan	10/05/2023 10:36:13 WIB
37 Darussalam	10/05/2023 10:36:24 WIB
38 Ahmar Ihsan Rangkuti	10/05/2023 10:36:27 WIB
39 Aminanto	10/05/2023 10:36:28 WIB
40 Isra Safar	10/05/2023 10:36:29 WIB
41 Edi Sumardi	10/05/2023 10:36:30 WIB
42 Riki Martim	10/05/2023 10:36:37 WIB
43 Deviyanti Dwiningsih	10/05/2023 10:36:37 WIB
44 Khairul Anwar Hasibuan	10/05/2023 10:36:47 WIB
45 Galih Achmad Nasukhah	10/05/2023 10:36:53 WIB
46 Syaidah Irma	10/05/2023 10:36:58 WIB

47 Suminarso	10/05/2023 10:37:07 WIB
48 Ernawati	10/05/2023 10:37:14 WIB
49 Aleks Pigai	10/05/2023 10:37:19 WIB
50 Suyadi	10/05/2023 10:37:22 WIB
51 Emisah	10/05/2023 10:37:32 WIB
52 Furkan Abdullah	10/05/2023 10:37:43 WIB
53 Kemas Muhammad Ali Utih	10/05/2023 10:37:46 WIB
54 Aristya Kusuma Dewi	10/05/2023 10:38:11 WIB
55 Nurwahidah	10/05/2023 10:38:41 WIB
56 Umar Bassam	10/05/2023 10:41:04 WIB
57 Fricilia Jelita Wartabone	10/05/2023 10:41:45 WIB
58 Abdul Rojak	10/05/2023 10:42:09 WIB
59 Julita	10/05/2023 10:42:37 WIB
60 Firda Faradillah	10/05/2023 10:42:53 WIB

61 Muhammad Azwar Dukalang	10/05/2023 10:43:07 WIB
62 Nurfadhilah Rizmi	10/05/2023 10:43:12 WIB
63 Aldy Putranto	10/05/2023 10:43:20 WIB
64 Nadiya Ulfa	10/05/2023 10:43:41 WIB
65 Della Haerunisa	10/05/2023 10:46:09 WIB
66 Ahmad Nur Rois	10/05/2023 10:48:11 WIB
67 ATRI FADLY B	10/05/2023 10:53:45 WIB
68 Imam Rizki Pratama	10/05/2023 10:58:31 WIB
69 Ruli Margianto	10/05/2023 11:22:28 WIB
70 Anggi Aribowo	10/05/2023 11:24:02 WIB
71 Faisal	10/05/2023 11:25:58 WIB
72 Ahmad Rizal Kurniawan	10/05/2023 11:26:22 WIB
73 Kusanto	10/05/2023 11:31:09 WIB
74 Muhammad Syarif Hidayatullah Akbar	10/05/2023 11:41:41 WIB

75 Arip Imawan	10/05/2023 12:34:15 WIB
76 Seta Mahardika Caesar Wahyuono	10/05/2023 12:35:32 WIB
77 Agung Syaputra	10/05/2023 12:49:10 WIB
78 Eka Pala Suryana	10/05/2023 12:49:32 WIB
79 Nardi Wiharto	10/05/2023 12:52:34 WIB
80 H. Zulfadillah	10/05/2023 13:11:35 WIB
81 Shalihin Alamsyah Putra	10/05/2023 13:21:30 WIB
82 Muhammad Firdaus Abduh	10/05/2023 13:47:38 WIB
83 Rizki Masapan	10/05/2023 13:56:32 WIB
84 Abdul Naim	10/05/2023 14:14:40 WIB
85 Azzuhri Al Bajuri	10/05/2023 14:15:12 WIB
86 Neneng Annisa Rahmah	10/05/2023 14:31:48 WIB
87 Syamsul Syamsuddin Ali	10/05/2023 14:31:52 WIB
88 Kurniawan	10/05/2023 14:34:13 WIB

89 Ismail Nganggon	10/05/2023 14:36:41 WIB
90 Andes Robensyah	10/05/2023 14:41:33 WIB
91 Dudi Usman Sahupala	10/05/2023 14:45:14 WIB
92 Fardy Iskandar	10/05/2023 14:47:00 WIB
93 Muhammad Fadhly Gella	10/05/2023 14:50:03 WIB
94 Resky Arisal	10/05/2023 14:52:12 WIB
95 RIJALUN SHOLIHIN SIMATUPANG	10/05/2023 14:52:54 WIB
96 Faudjan Muslim	10/05/2023 14:55:56 WIB
97 Akhmad Bumi	10/05/2023 15:16:57 WIB
98 Budiman Mubar	10/05/2023 15:23:39 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Abdul Rasyid		11/05/2023 08:01:37 WIB
2 Syaidah Irma		11/05/2023

	08:03:46 WIB
3 Amal Hamsah	11/05/2023 08:04:47 WIB
4 Darussalam	11/05/2023 08:05:03 WIB
5 Ahmad Rizal Kurniawan	11/05/2023 08:05:47 WIB
6 Amir Hamzah Sihombing	11/05/2023 08:06:07 WIB
7 Amir Hamzah Sihombing	11/05/2023 08:06:09 WIB
8 Amir Hamzah Sihombing	11/05/2023 08:06:13 WIB
9 Amir Hamzah Sihombing	11/05/2023 08:06:14 WIB
10 Amir Hamzah Sihombing	11/05/2023 08:06:14 WIB
11 Panji Brata Kusuma	11/05/2023 08:08:13 WIB
12 Muhammad Syarif Hidayatullah Akbar	11/05/2023 08:08:53 WIB
13 Mustafa M. Yacob	11/05/2023 08:09:45 WIB
14 Imam Sutopo	11/05/2023 08:09:54 WIB
15 Sufrizal Lubis	11/05/2023 08:10:13 WIB
16 Khairil Amrillah	11/05/2023

	08:10:37 WIB
17 Aminanto	11/05/2023 08:11:06 WIB
18 Ramlan Damanik	11/05/2023 08:11:11 WIB
19 Azzuhri Al Bajuri	11/05/2023 08:11:39 WIB
20 Fricilia Jelita Wartabone	11/05/2023 08:12:23 WIB
21 Fricilia Jelita Wartabone	11/05/2023 08:12:25 WIB
22 Riki Martim	11/05/2023 08:12:32 WIB
23 Evi Risna Yanti	11/05/2023 08:12:46 WIB
24 Evi Risna Yanti	11/05/2023 08:12:47 WIB
25 Riki Sambora	11/05/2023 08:13:02 WIB
26 Nurwahidah	11/05/2023 08:14:20 WIB
27 Busyraa	11/05/2023 08:14:20 WIB
28 Nuharman	11/05/2023 08:14:33 WIB
29 Maryono	11/05/2023 08:14:38 WIB
30 Sahri Mewar	11/05/2023

	08:15:00 WIB
31 Yusri	11/05/2023 08:15:03 WIB
32 Masrizal	11/05/2023 08:15:33 WIB
33 Eka Pala Suryana	11/05/2023 08:15:59 WIB
34 Budiman Mubar	11/05/2023 08:15:59 WIB
35 Fardy Iskandar	11/05/2023 08:16:29 WIB
36 Malik Raudhi Tuasamu	11/05/2023 08:16:43 WIB
37 Akhmad Bumi	11/05/2023 08:16:56 WIB
38 Budiman Putra	11/05/2023 08:17:28 WIB
39 Isra Safar	11/05/2023 08:17:37 WIB
40 Khalid Dhiya UI Haqq	11/05/2023 08:18:36 WIB
41 Helmi Al Djufri	11/05/2023 08:19:02 WIB
42 Sudirman Anas	11/05/2023 08:19:17 WIB
43 Furkan Abdullah	11/05/2023 08:19:49 WIB
44 Nurul Fariati	11/05/2023

	08:20:14 WIB
45 Arip Imawan	11/05/2023 08:20:28 WIB
46 Abdul Naim	11/05/2023 08:20:37 WIB
47 Andes Robensyah	11/05/2023 08:20:50 WIB
48 Joko Sulistiono	11/05/2023 08:21:38 WIB
49 Umar Bassam	11/05/2023 08:21:44 WIB
50 Suminarso	11/05/2023 08:22:07 WIB
51 Muhammad Wiman Wibisana	11/05/2023 08:22:21 WIB
52 Nadiya Ulfa	11/05/2023 08:23:18 WIB
53 Hawari Muhammad	11/05/2023 08:23:33 WIB
54 Aristya Kusuma Dewi	11/05/2023 08:23:43 WIB
55 Tulus Wahjuono	11/05/2023 08:23:48 WIB
56 Seta Mahardika Caesar Wahyuono	11/05/2023 08:23:53 WIB
57 Della Haerunisa	11/05/2023 08:23:58 WIB
58 Deky Mulyadi	11/05/2023

	08:24:01 WIB
59 Hikmat Prihadi	11/05/2023
	08:24:21 WIB
60 Isnu Harjo Prayitno	11/05/2023
	08:24:38 WIB
61 Emisah	11/05/2023
	08:24:39 WIB
62 Emisah	11/05/2023
	08:24:39 WIB
63 Muhammad Firdaus Abduh	11/05/2023
	08:24:52 WIB
64 Julita	11/05/2023
	08:25:12 WIB
65 Mohammad Indra Kelana	11/05/2023
	08:27:02 WIB
66 Muhammad Arnif	11/05/2023
	08:27:05 WIB
67 Muhammad Arnif	11/05/2023
	08:27:06 WIB
68 Muhammad Azwar Dukalang	11/05/2023
	08:27:36 WIB
69 Neneng Annisa Rahmah	11/05/2023
	08:27:54 WIB
70 Basrizal	11/05/2023
	08:28:22 WIB
71 H. Zulfadillah	11/05/2023
	08:28:24 WIB
72 Basrizal	11/05/2023

	08:28:25 WIB
73 Muhammad Sayyid Kamil Adam	11/05/2023
	08:28:25 WIB
74 Basrizal	11/05/2023
	08:28:27 WIB
75 Basrizal	11/05/2023
	08:28:28 WIB
76 Basrizal	11/05/2023
	08:28:34 WIB
77 Basrizal	11/05/2023
	08:28:35 WIB
78 Basrizal	11/05/2023
	08:28:36 WIB
79 Basrizal	11/05/2023
	08:28:39 WIB
80 Nurfadhilah Rizmi	11/05/2023
	08:28:50 WIB
81 Nurfadhilah Rizmi	11/05/2023
	08:28:52 WIB
82 Sultan	11/05/2023
	08:29:24 WIB
83 Putri Amalia	11/05/2023
	08:30:08 WIB
84 H. Deden Kurnaedi	11/05/2023
	08:30:38 WIB
85 Sunandar PS	11/05/2023
	08:30:42 WIB
86 Ihsan Abdillah	11/05/2023

	08:30:44 WIB
87 Edi Sumardi	11/05/2023
	08:30:53 WIB
88 Reza Revorma Putra Alam	11/05/2023
	08:31:10 WIB
89 Tuwarno	11/05/2023
	08:31:19 WIB
90 Nardi Wiharto	11/05/2023
	08:31:44 WIB
91 Imam Rizki Pratama	11/05/2023
	08:32:01 WIB
92 Faisal	11/05/2023
	08:32:01 WIB
93 Faisal	11/05/2023
	08:32:03 WIB
94 Hardiyansyah	11/05/2023
	08:32:17 WIB
95 Aleks Pigai	11/05/2023
	08:33:07 WIB
96 Kusanto	11/05/2023
	08:33:30 WIB
97 Galih Achmad Nasukhah	11/05/2023
	08:36:03 WIB
98 Khairul Anwar Hasibuan	11/05/2023
	08:36:55 WIB
99 Ampria Bukhori	11/05/2023
	08:37:14 WIB
100 Syamsul Bahri	11/05/2023

	08:38:26 WIB
101 Ahmad Nur Rois	11/05/2023 08:40:09 WIB
102 Martoni	11/05/2023 08:40:56 WIB
103 Deni Wisnu	11/05/2023 08:43:56 WIB
104 Andika Saputra	11/05/2023 08:44:02 WIB
105 Syamsul Syamsuddin Ali	11/05/2023 08:44:53 WIB
106 Muhammad Mujaini	11/05/2023 08:46:33 WIB
107 Taufik Hidayat	11/05/2023 08:47:11 WIB
108 Arah Madani	11/05/2023 08:47:49 WIB
109 Neneng Annisa Rahmah	11/05/2023 08:51:05 WIB
110 Dede	11/05/2023 08:52:54 WIB
111 Sabarrudin	11/05/2023 08:56:31 WIB
112 Suntin Yono	11/05/2023 08:56:58 WIB
113 Muhammad Abizar Al Ghifari Musya	11/05/2023 08:57:01 WIB
114 Resky Arisal	11/05/2023

	08:57:11 WIB
115 Dwi Histiningrum	11/05/2023 08:59:04 WIB
116 ATRI FADLY B	11/05/2023 08:59:34 WIB
117 Heru Julianto	11/05/2023 09:02:31 WIB
118 Mansur Naga	11/05/2023 09:05:55 WIB
119 Ernawati	11/05/2023 09:09:24 WIB
120 Ruli Margianto	11/05/2023 09:09:48 WIB
121 Anggi Aribowo	11/05/2023 09:10:01 WIB
122 Ibnu Saleh	11/05/2023 09:11:10 WIB
123 Mulyanto	11/05/2023 09:12:02 WIB
124 Ahmar Ihsan Rangkuti	11/05/2023 09:16:38 WIB
125 Martadinata	11/05/2023 09:20:24 WIB
126 Rusdi Agus Susanto	11/05/2023 09:22:12 WIB
127 Agung Syaputra	11/05/2023 09:29:08 WIB
128 Ali Wiji Edhy	11/05/2023

	09:46:20 WIB
129 Suyadi	11/05/2023 09:49:28 WIB
130 Edius Pratama	11/05/2023 09:53:50 WIB
131 Firda Faradillah	11/05/2023 09:58:44 WIB
132 Purwanto	11/05/2023 10:02:56 WIB
133 Hoirullah	11/05/2023 10:06:28 WIB
134 Ismail Nganggon	11/05/2023 10:23:29 WIB
135 Muhammad Fathur	11/05/2023 10:23:47 WIB
136 Rizki Masapan	11/05/2023 10:24:45 WIB
137 RIJALUN SHOLIHIN SIMATUPANG	11/05/2023 10:26:14 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Mustafa M. Yacob	11/05/2023 10:30:18 WIB
2	Amir Hamzah Sihombing	11/05/2023 10:30:21 WIB
3	Ruli Margianto	

	11/05/2023 10:31:21 WIB
4 Abdul Mamat Irawan	11/05/2023 10:32:00 WIB
5 Putri Amalia	11/05/2023 10:32:14 WIB
6 Arya Jagad Pamungkas	11/05/2023 10:32:16 WIB
7 Taufik Hidayat	11/05/2023 10:32:25 WIB
8 Masrizal	11/05/2023 10:32:31 WIB
9 Aminanto	11/05/2023 10:32:59 WIB
10 Muhamad Budiono	11/05/2023 10:33:00 WIB
11 Azzuhri Al Bajuri	11/05/2023 10:33:10 WIB
12 Lilis Nurmallasari	11/05/2023 10:33:35 WIB
13 Ali Wiji Edhy	11/05/2023 10:34:00 WIB
14 Muhammad Abizar Al Ghifari Musya	11/05/2023 10:34:00 WIB
15 Fricilia Jelita Wartabone	11/05/2023 10:34:30 WIB
16 Basrizal	11/05/2023 10:34:33 WIB
17 Sahri Mewar	

	11/05/2023 10:34:42 WIB
18 Faudjan Muslim	11/05/2023 10:34:51 WIB
19 Junaidi	11/05/2023 10:34:55 WIB
20 Aldy Putranto	11/05/2023 10:35:03 WIB
21 Muhammad Sayyid Kamil Adam	11/05/2023 10:35:06 WIB
22 Riki Sambora	11/05/2023 10:35:10 WIB
23 Busyraa	11/05/2023 10:35:17 WIB
24 Agung Syaputra	11/05/2023 10:35:32 WIB
25 Mohammad Indra Kelana	11/05/2023 10:35:58 WIB
26 Fardy Iskandar	11/05/2023 10:36:31 WIB
27 Hikmat Prihadi	11/05/2023 10:36:31 WIB
28 Andes Robensyah	11/05/2023 10:37:42 WIB
29 ATRI FADLY B	11/05/2023 10:37:58 WIB
30 Hardiyansyah	11/05/2023 10:38:00 WIB
31 Furkan Abdullah	

	11/05/2023 10:38:14 WIB
32 Panji Brata Kusuma	11/05/2023 10:38:26 WIB
33 Abdul Rasyid	11/05/2023 10:38:57 WIB
34 Sufrizal Lubis	11/05/2023 10:39:17 WIB
35 Sudirman Anas	11/05/2023 10:40:54 WIB
36 Darussalam	11/05/2023 10:40:55 WIB
37 Neneng Annisa Rahmah	11/05/2023 10:41:00 WIB
38 Budiman Putra	11/05/2023 10:41:06 WIB
39 Tulus Wahjuono	11/05/2023 10:41:23 WIB
40 Amal Hamsah	11/05/2023 10:41:47 WIB
41 Tuwarno	11/05/2023 10:41:57 WIB
42 Seta Mahardika Caesar Wahyuono	11/05/2023 10:42:37 WIB
43 Suyadi	11/05/2023 10:42:43 WIB
44 Joko Fitrian Prabowo	11/05/2023 10:42:48 WIB
45 H. Zulfadillah	

	11/05/2023 10:42:54 WIB
46 Reza Revorma Putra Alam	11/05/2023 10:43:13 WIB
47 Deviyanti Dwiningsih	11/05/2023 10:43:25 WIB
48 Helmi Al Djufri	11/05/2023 10:43:59 WIB
49 Suyadi	11/05/2023 10:44:17 WIB
50 Syaidah Irma	11/05/2023 10:44:32 WIB
51 Edius Pratama	11/05/2023 10:45:37 WIB
52 Martadinata	11/05/2023 10:45:44 WIB
53 Sukiswo	11/05/2023 10:46:47 WIB
54 Ahmad Nur Rois	11/05/2023 10:46:54 WIB
55 Resky Arisal	11/05/2023 10:46:55 WIB
56 Nadiya Ulfa	11/05/2023 10:47:19 WIB
57 Mansur Naga	11/05/2023 10:47:32 WIB
58 Aristya Kusuma Dewi	11/05/2023 10:47:47 WIB
59 Deni Wisnu	

	11/05/2023 10:48:25 WIB
60 Khairul Anwar Hasibuan	11/05/2023 10:48:28 WIB
61 Sabarrudin	11/05/2023 10:48:42 WIB
62 Martoni	11/05/2023 10:50:57 WIB
63 Imam Rizki Pratama	11/05/2023 10:52:02 WIB
64 Ernawati	11/05/2023 10:52:54 WIB
65 Dudi Usman Sahupala	11/05/2023 10:53:43 WIB
66 Rismaya Nurbaity	11/05/2023 10:54:35 WIB
67 Firda Faradillah	11/05/2023 10:54:35 WIB
68 Della Haerunisa	11/05/2023 10:54:54 WIB
69 Muhammad Syarif Hidayatullah Akbar	11/05/2023 10:55:28 WIB
70 Akhmad Bumi	11/05/2023 10:56:46 WIB
71 Suntin Yono	11/05/2023 10:59:40 WIB
72 Syamsul Syamsuddin Ali	11/05/2023 11:03:16 WIB
73 Muhammad Arnif	

	11/05/2023 11:04:30 WIB
74 Fahmi Ali Ramdhani	11/05/2023 11:04:41 WIB
75 Muhammad Firdaus Abduh	11/05/2023 11:07:08 WIB
76 Abdul Naim	11/05/2023 11:09:07 WIB
77 Ahmad Rizal Kurniawan	11/05/2023 11:09:45 WIB
78 Eka Pala Suryana	11/05/2023 11:10:57 WIB
79 Suminarso	11/05/2023 11:12:10 WIB
80 Aleks Pigai	11/05/2023 11:22:22 WIB
81 Imam Sutopo	11/05/2023 11:23:44 WIB
82 Ramlan Damanik	11/05/2023 11:25:16 WIB
83 Emisah	11/05/2023 11:25:20 WIB
84 Sunandar PS	11/05/2023 11:34:07 WIB
85 Syarif Pati Pilohi	11/05/2023 11:42:40 WIB
86 Hawari Muhammad	11/05/2023 11:42:41 WIB
87 Arah Madani	

		11/05/2023
		11:42:54 WIB
88 Ihsan Abdillah		
		11/05/2023
		11:45:51 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI

password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke *e-mail*:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Perseorangan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Partai Politik

KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
10 Mei 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI Keadilan Sejahtera

KELAS 1

Narasumber

: Mardian Wibowo

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Rizki Masapan, S.H.	DPW DKI Jakarta	100	70	100	82
2	2	Faudjan Muslim, S.H.	DPP PKS	100	80	100	88
3	4	Rusdi Agus Susanto, S.H.	DPW Kalimantan Tengah	100	80	100	88
4	5	Lilis Nurmalasari, S.Sy., CPL.	DPW Riau	100	80	100	88
5	6	Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.	DPP PKS	100	80	100	88
6	8	Akhmad Bumi, S.H.	DPW Nusa Tenggara Timur	100	80	100	88
7	9	Neneng Annisa Rahmah, S.H.	DPW Banten	100	90	100	94
8	13	Furkan Abdullah, S.H.	DPW Maluku Utara	100	70	100	82
9	15	Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., CPM.	DPW Maluku	100	80	100	88
10	16	Imam Rizki Pratama, S.H.	DPW DI Yogyakarta	100	70	100	82
11	17	Nuharman, S.H.	DPW Bengkulu	100	70	100	82
12	18	Muhammad Firdaus Abduh, M.Si.	DPW Papua Pegunungan	90	70	100	80
13	19	Abdul Naim, S.Pd.	DPW Papua	90	70	100	80
14	20	Budiman Mubar, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Selatan	100	75	100	85
15	22	Kurniawan, S.H., M.H.	DPW Papua Barat Daya	90	80	100	86
16	25	Khairil Amrillah, S.Pd.I.	DPW Papua Tengah	80	70	100	78
17	26	Arip Imawan, S.H., M.H., CM., SHEL.	DPW Jawa Timur	100	80	100	88
18	31	Fardy Iskandar, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Timur	90	65	100	77
19	36	Rahman Pulani, S.H.	DPW Sulawesi Tenggara	80	70	100	78
20	39	Amal Hamsah, S.H.	DPW Sulawesi Tengah	90	65	100	77
21	41	Umar Bassam, S.H.	DPP PKS	100	80	100	88
22	42	Khalid Dhiya Ul Haqq, S.H.	DPP PKS	100	75	100	85
23	43	Darmiyanto, S.H.	DPP PKS	90	75	100	83
24	48	Sabarrudin, S.H., M.Kn.	DPP PKS	100	75	100	85
25	49	Resky Arisal, S.Pd.	DPW Papua Barat	80	75	100	81
26	50	Nardi Wiharto, S.H.	DPP PKS	90	75	100	83
27	53	Suntin Yono, S.H.	DPW Kalimantan Selatan	100	70	100	82
28	55	Purwanto, A.Md.	DPW Papua Selatan	100	60	100	76
29	65	Drs. H. Deden Kurnaedi, S.Ag., S.H., M.M.	DPW Sumatera Selatan	80	70	100	78
30	66	Muhammad Ahyar, S.H.	DPW Nusa Tenggara Barat	100	80	100	88
31	67	Budiman Putra, S.H.	DPW Sumatera Barat	90	80	100	86
32	72	Ramlan Damanik, S.H.	DPW Sumatera Utara	100	70	100	82
33	76	Eka Pala Suryana, S.H., M.H.	DPW Jawa Tengah	100	70	100	82
34	81	Andi Hamdiah, S.H., M.Hum.	DPW Sulawesi Barat				0
35	85	Dwi Histiningrum, S.H.	DPW Kalimantan Barat	90	70	100	80
36	87	Mohammad Indra Kelana, S.H.	DPW Kepulauan Riau	100	80	100	88
37	91	Andes Robensyah, S.H.	DPW Jambi	90	70	100	80



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI Keadilan Sejahtera

KELAS 2

Narasumber

: Hani Adhani

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	3	H. Zulfadillah, S.H.	DPW DKI Jakarta	60	70	60	66
2	7	Joko Fitrian Prabowo, S.H., M.Kn.	DPP PKS	60	60	60	60
3	10	Muhamad Budiono, S.H.	DPW Kalimantan Tengah	60	60	60	60
4	12	Hoirullah, S.Sy., M.H.	DPP PKS	70	60	60	62
5	14	Isra Safar, S.H.	DPW Maluku Utara	60	60	60	60
6	21	Kusanto, S.Pd.I.	DPW Papua	60	60	60	60
7	29	Imam Sutopo, S.H.	DPW Jawa Timur	60	60	60	60
8	32	Joko Sulistiono, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Timur	60	60	60	60
9	33	Agung Syaputra, S.H.	DPW Sulawesi Selatan	70	70	70	70
10	34	Panji Brata Kusuma, S.H.	DPW Bengkulu	60	70	70	68
11	45	Djumrin, S.H.	DPW Sulawesi Tenggara	60	60	60	60
12	46	Aleks Pigai, M.Pd.	DPW Papua Tengah	60	60	60	60
13	56	Nurfadhilah Rizmi, S.H.	DPP PKS	70	70	60	68
14	57	Julita, S.H.	DPP PKS	60	60	60	60
15	58	Rismaya Nurbaity, S.H.	DPP PKS	70	70	60	68
16	59	Tuwarno	DPW Papua Selatan	60	60	60	60
17	60	Firda Faradillah, S.H.	DPP PKS	60	60	60	60
18	61	Suyadi, S.H.	DPW Kalimantan Selatan	60	60	60	60
19	62	Della Haerunisa, S.H.	DPP PKS	60	60	60	60
20	77	Isnu Harjo Prayitno, S.H., M.H.	DPP PKS	70	70	60	68
21	78	Nadiya Ulfa, S.H.	DPW Jawa Tengah	80	80	80	80
22	88	Emisah, S.H.	DPW Kalimantan Barat	70	60	60	62
23	92	Hardiyansyah, S.H.	DPW Jambi	60	60	60	60
24	95	Dr. Muhammad Wiman Wibisana, S.H., M.H.	DPW Bali	80	80	80	80
25	97	Muhammad Sayyid Kamil Adam	DPW Gorontalo	60	60	60	60
26	102	Ihsan Abdillah, S.H.	DPW Bangka Belitung	60	60	60	60
27	105	Hazlan, S.H.	DPW Kalimantan Utara	60	60	60	60
28	108	R. Hikmat Prihadi, S.H.	DPW Jawa Barat	60	60	60	60
29	110	Faisal, S.H., M.H.	DPW Aceh	70	60	60	62
30	114	Muhammad Azwar Dukalang, S.E.	DPW Sulawesi Utara	60	60	60	60
31	120	Mansur Naga, S.H.	DPP PKS	60	60	60	60
32	121	Arah Madani, S.H.	DPP PKS				0
33	123	Ruli Margianto, S.H., M.H.	DPP PKS				0
34	124	Heru Julianto, S.H.	DPP PKS	70	80	70	76
35	125	Seta Mahardika Caesar Wahyuono, S.H., M.H.	DPP PKS	60	60	60	60
36	126	Ampria Bukhori, S.H., M.H.	DPW Lampung	70	80	70	76
37	129	Edius Pratama, S.H.	DPP PKS	60	60	60	60



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI Keadilan Sejahtera

KELAS 4

Narasumber : Helmi Kasim

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	27	Dr. Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I.	DPW Riau	25	20	25	70
2	51	Edi Sumardi, S.H.	DPW Papua Barat	25	20	25	70
3	54	Ernawati, S.H., M.H.	DPP PKS	25	25	25	70
4	69	Darussalam, S.H.	DPW Sumatera Selatan	25	30	25	80
5	71	Sunandar PS, S.H., M.H.	DPW Nusa Tenggara Barat	25	30	25	80
6	74	Masrizal, S.H.	DPW Sumatera Barat	25	20	25	70
7	82	Riki Martim, S.H., CLA.	DPW Banten	25	25	25	75
8	84	Sri Astuti A. Kadir, S.H.	DPW Maluku Utara	25	25	25	75
9	90	Syamsul Bahri, S.H.	DPW Sulawesi Barat	25	25	25	75
10	94	Riki Sambora, S.H.	DPW Papua Barat Daya	25	25	25	75
11	96	Mulyanto, S.H.I., M.H.	DPW Kepulauan Riau	25	20	25	70
12	100	Fricilia Jelita Wartabone, S.H., M.H.	DPW Gorontalo	25	30	25	80
13	101	Muhammad Abizar Al Ghifari Musya, S.H.	DPW Bali	25	35	25	85
14	104	Syaidah Irma, S.H.	DPW Bangka Belitung	25	25	25	75
15	106	Yusri, S.H.	DPW Kalimantan Utara	25	20	25	70
16	109	Ismail Nganggon, S.H.	DPP PKS	25	20	25	70
17	116	R. Suyadi, S.H.	DPW Jawa Barat	25	20	25	70
18	122	Taufik Hidayat, S.H.	DPW Aceh	25	30	25	80
19	127	Sultan, S.H., M.H.	DPW Lampung	25	30	25	80
20	128	Galih Achmad Nasukhah, S.H.I., M.H.	DPW Lampung	25	35	25	85
21	130	Syamsul Syamsuddin Ali, S.H.	DPW Nusa Tenggara Timur	25	20	25	70
22	131	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	DPP PKS	25	35	25	85
23	132	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	DPP PKS	25	30	25	80
24	133	H. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	DPP PKS				0
25	134	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	DPP PKS	25	25	25	75
26	135	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	DPP PKS				0
27	136	Suminarso	DPP PKS	25	20	25	70
28	137	Ali Wiji Edhy, S.H.	DPP PKS				0
29	138	Khairul Anwar Hasibuan, S.H., M.H.	DPP PKS	25	25	25	75
30	139	Busyraa, S.H.	DPP PKS	25	25	25	75
31	140	Unggul Wibawa, S.E., M.Akt., S.H., M.H.	DPP PKS				0
32	142	Abdul Rasyid	DPW Sulawesi Tengah	25	35	25	85
33	143	Amir Hamzah Sihombing, S.H.	DPW Jambi	25	30	25	80
34	144	Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I.	DPW Maluku	25	30	25	80
35	145	Maryono, S.H., CGP.	DPW Sulawesi Utara				0

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI Keadilan Sejahtera

NAMA NARASUMBER : Mardian Wibowo

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta secara umum sudah mengikuti template permohonan.
	Diskusi hangat dan banyak pertanyaan terkait hal-hal yang belum ada di PMK atau template.
	Peserta bersemangat dan memberi perhatian penuh pada rekan yang presentasi dan kepada narasumber/fasilitator.
2	
3	
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI Keadilan Sejahtera

NAMA NARASUMBER : Helmi Kasim

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Sebagian peserta sudah menunjukkan pemahaman tentang apa yang perlu dituangkan dalam naskah keterangan sebagai pihak terkait
2	Terdapat peserta yang sebagian isi keterangan hanya mengulang template
3	Terdapat keterangan Pihak Terkait perseorangan yang identitasnya justru berisi identitas Pemohon
4	Dalam penyusunan eksepsi, terdapat poin-poin eksepsi yang saling bertentangan. Eksepsi tidak berwenang tetapi di akhir eksepsi menyatakan Mahkamah berwenang
5	Sebagian keterangan perlu penajaman dalil bantahan dalam pokok permohonan dan perlu memperhatikan bahwa pada setiap dalil langsung merujuk ke bukti kontra

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, SH 2. YM. Dr. Suhartoyo, S.H
Moderator	Nanang Subekti

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Ahmad Hamzah_Sulteng : Dalam sidang PHPU bukti bukti yg bisa dipertimbangkan hanya angka angka saja atau kah memerlukan bukti pendukung lainnya
2.	Evi Rismayanti : Apakah petitum boleh diubah atau diperbaiki
3.	Kalsel : apa saja alat bukti yg dianggap tidak syah atau tidak memiliki kekuatan atau di tolak MK
4.	Damanik_Sumut : Bagaimana jika kita menemukan bukti di TPS ada perselisihan tapi bukti itu tidak signifikan
5.	Maluku : bagaima cara meyakinkan Hakim biar Hakim percaya saksi

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERINDRA

Sesi II	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Narasumber	Pan Mohamad Faiz, SH., M.C.L., Ph.D
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Dede_Sumbar : apakah MK dapat menjamin bahwa hasil akhir putusan suatu Undang undang sudah benar dan ojektif Dalam memutus sengketa PHPU apakah itu murni hasil saja atau memang pelanggaran dan patut diduga menjadi penyebab munculnya sengketa hasil di maksud itu dpt di jadikan bahan pertimbangan untuk memutus suatu perkara



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik



Tepat waktu dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi



Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**



Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**



Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas



Tidak merokok dalam kamar



Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB



Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB



Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai
memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi
narasumber, kuesioner evaluasi
kegiatan, dan soal *Post Test* di akun
SIMULTAN masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat
akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada)
akan dilaksanakan dengan
mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan



SURAT TUGAS

Nomor: 06/K/TGS/SEK-PKS/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABOE BAKAR ALHABSYI

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera

Menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi Peserta pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera, sebagai berikut :

NO	NAMA+GELAR	ASAL/UTUSAN	JABATAN	ALAMAT DOMISILI
1.	Ruli Margianto, S.H., M.H. (merangkap panitia)	DPP PKS	Biro Advokasi DPP PKS	Kp. Wadassari, Rt.05/02, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan - Tangerang
2.	Seta Mahardika Caesar Wahyuono, S.H.,M.H. (merangkap panitia)	DPP PKS	Biro Hukum DPP PKS	Jl. Candi Sari IV/3, Rt.03/10, Kel. Mojolangu, Kec. Lowok Waru, Malang - Jawa Timur
3.	Ali Wiji Edhy, S.H.	DPP PKS	Biro Hukum DPP PKS	Jl. H. Ung No. 06, Rt. 01/02, Kel. Utan Panjang, Kec.Kemayoran - Jakarta Pusat
4.	Unggul Wibawa, S.E.,M.Akt.,S.H.,M.H.	DPP PKS	Wakil Bendahara Umum DPP PKS	Villa Dago Tol Blok H 15/25, Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten
5.	Isnu Harjo Prayitno, S.H., M.H.	DPP PKS	Bidang Polhukam DPP PKS	Tangerang Selatan, Banten
6.	Anton Aryadi, S.H.,M.H.	DPP PKS	Bidang Hubungan Antar Lembaga	Jl. Rambutan No. 16, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur
7.	Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Kampung Sawah No. 24, Rt.04/01, Kel. Srengseng Sawah,

NO	NAMA+GELAR	ASAL/UTUSAN	JABATAN	ALAMAT DOMISILI
				Kec. Jagakarsa - Jakarta Selatan
8.	Khairul Anwar Hasibuan, S.H.,M.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jl. Bhayangkara No 399 Medan, Indra Kasih, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara
9.	Edi Sugiarto, S.H.,M.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jalan Timur Indah 1 Komplek Perumahan Timur Indah Permai 2 Blok B 4 RT 30 RW 05 Kel Sidomulyo Gading Cempaka Kota Bengkulu
10.	Joko Fitriani Prabowo, S.H.,M.Kn.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jl. Inpres No. 54, Rt.05/02, Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati -Jakarta Timur
11.	Basrizal , S.H., M.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jl. Mawar Raya Gg. Cempaka No. 26, Rt. 04/02, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur - Bekasi
12.	Dr. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jln Candi Sari IV/3 Malang
13.	Hoirullah, S.Sy., M.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jl. Jatinegara Timur III, Rt. 06/07, Kel. Rawa Bunga, Kec. Jatinegara - Jakarta Timur
14.	Ismail Nganggon, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Asrama Pemadam, Rt.01/07, Kel.Semper Barat, Kec. Cilincing - Jakarta Utara
15.	Busyraa, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Rusun Guru Cipinang Muara II Blok BLL 4/8, Rt. 018/02, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit - Jakarta Timur
16.	Arah Madani, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jl. Bunga Rampai IV Gg. 1 No.106, Rt. 10/09, Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit - Jakarta Timur

NO	NAMA+GELAR	ASAL/UTUSAN	JABATAN	ALAMAT DOMISILI
17.	Faudjan Muslim, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jl. Pejagalan 1 No. 11, Rt.10/04, Kel. Pekojan, Kec. Tambora - Jakarta Barat
18.	Helmi Al Djufrie, S.Sy., M.Si.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Griya Setu Residende No. 11 Kp. Kramat, Rt. 07/04, Kel. Setu, Kec. Cipayung - Jakarta Timur
19.	Heru Julianto, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Rumdis TNI AL Blok H7-4, Pasir Angin, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
20.	Edius Pratama, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jl. Pulau Singkep, Gang Beo, Sukarama, Kota Bandar Lampung, Lampung
21.	Suminarso, S.H.	DPP PKS	Ketua Biro Administrasi DPP PKS	Komp Setneg RI, Blok H No. 4, Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten
22.	Hawari Muhammad, S.H., M.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jl. Darsono GG I-18, Ngaglik, Batu, Kota Batu, Jawa Timur
23.	M. Ihsan Abdurahman	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jl. Al Magfiroh No. 80 Rt. 006 Rw 04 Balekambang KramatJati Jakarta Timur
24.	Sabarrudin, S.H.,M.Kn.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jl. Situ Gede Raya No. 59, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur
25.	Khalid Dhiya Ul Haqq, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Taman Duta mas, Blok A2 No. 30, Tanah Merah, Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau
26.	Muhammad Syarif Hidayatullah Akbar, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Tengkyu Romot, Mata Air, Reok, Manggarai, NTT
27.	Umar Bassam, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jl. Platuk K-4/4 Sumi Makmur IV, Jatimakmur, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat

NO	NAMA+GELAR	ASAL/UTUSAN	JABATAN	ALAMAT DOMISILI
28.	Darmiyanto, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jl. Menteng Pualam, No. 7A, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
29.	Julita, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jl. WR Supratman, Cempaka Putih, Ciputat, Tangerang Selatan
30.	Della Haerunisa, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Kp. Cikadu, Dayeuh, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat
31.	Firda Faradillah, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jl. Puri Gg Kesatuan No. 18A, Kota Matsum, Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara
32.	Nardi Wiharto, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Lenteng Agung, No. 33, Jagakarsa, Jakarta Selatan
33.	Ernawati, S.H.,M.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Dusun Pemagong, Kel Lenangguar, Kec Lenangguar, Kab Sumbawa, NTB
34.	Nurfadhilah Rizmi, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Jl. Khairul Bariyah, Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi
35.	Solihin, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Dusun Marotuak II, Sambinasi barat, Riung, Kab. Ngada, NTT
36.	Rismaya Nurbaiti, S.H.	DPP PKS	Tim Hukum dan Advokasi DPP PKS	Trias Estate Blok A.12 No. 25, Wanasari, Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat
37.	Muhammad Arnif, S.H.	DPW PKS Aceh 1	Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Aceh	Jl. Merak Lr Kenari No. 5, Neusu Aceh, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh
38.	Faisal, S.H.,M.H.	DPW PKS Aceh 2	Ketua BP3 DPW	Jl. Jurong Dagang, Pango Deah, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh
39.	Taufik Hidayat, S.H.	DPW PKS Aceh 3	Tim Hukum DPW	Komplek Daroy Mansion Blok D No. 21 Gampong Ulee Tuy Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

NO	NAMA+GELAR	ASAL/UTUSAN	JABATAN	ALAMAT DOMISILI
40.	Dodi Candra, S.H., M.H.	DPW PKS Sumatera Utara 1	Sekretaris Bidang Polhukam DPW PKS Sumut	Jl. Bunga Rinte Raya, Pedumahan Puri Zahara 2, Blok E, Nomor 19, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
41.	Ramlan Damanik, S.H.	DPW PKS Sumatera Utara 2	Sekretaris Bidang Polhukam DPW PKS Sumut	Jl. Cempaka Gg. Cempaka I Lk.III No.2, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
42.	Sufrizal Lubis, S.H.	DPW PKS Sumatera Utara 3	Anggota MPD Medan	Jl. Young Panah Hijau lor. Sekolah Lk. XI Kel. Labuhan Deli Medan
43.	Dede, S.H.	DPW PKS Sumatera Barat 1	Anggota Bidang Polhukam	Lubuk Minturun, Kota Padang
44.	Budiman Putra, S.H.	DPW PKS Sumatera Barat 2	Ketua Bidang Polhukam DPW PKS	Jl. Koto Gadang RT 03 RW 04 Kel.Bungus Timur Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat
45.	Masrizal, S.H.	DPW PKS Sumatera Barat 3	Wakil Ketua Bid Polhukum DPW PKS	Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumbar
46.	Lilis Nurmalasari, S.Sy.,CPL.	DPW PKS Riau 1	Sekretaris Bidang Polhukam DPW PKS Riau	Jalan Kartika Sari Ujung, Srimeranti, Rumbai, Pekanbaru, Riau
47.	Ferlan Niko, S.H.I.,M.Sy.	DPW PKS Riau 2	Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Riau	Perum NPL Blok A 15, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau
48.	Dr. Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I.	DPW PKS Riau 3	Tim Hukum DPW	Jl. Gunung Agung No. 6 Sekip Limapuluh Pekanbaru
49.	Mohammad Indra Kelana, S.H.	DPW PKS Kepulauan Riau 1	Tim Advokasi	Jl. Rawasari, Perum. Rawasari Club House, Blok A, No. 11, Kampung Bulang, Tanjungpinang

NO	NAMA+GELAR	ASAL/UTUSAN	JABATAN	ALAMAT DOMISILI
				Timur, Kota Tanjungpinang
50.	Rijalun Sholihin Simatupang, S.H.	DPW PKS Kepulauan Riau 2	Tim Advokasi	Jl. Kampung Sukajaya No 37 Kel. Melayu Kotapiring, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepri.
51.	Mulyanto, S.H.I.,M.H.	DPW PKS Kepulauan Riau 3	Ketua DPC Batam Kota, Kota Batam	Perum Cendana Thp 1, Blok E4A
52.	Amir Hamzah Sihombing, S.H.	DPW PKS Jambi 1	Ketua Bidang Kepemudaan	Perum Villa Dahlia RT 52, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi
53.	Andes Robensyah, S.H.	DPW PKS Jambi 2	Ketua Bidang Polhukam DPD PKS Kota Sungai Penuh	Desa Sungai Ning, Kec. Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh Jambi
54.	Mhd. Izzuddin Abdul Aziz, S.H.,M.H.	DPW PKS Jambi 3	Staff Polhukam	Simpang 3 Sipin, Kota Jambi
55.	Nuhaman, S.H.	DPW PKS Bengkulu 1	Ketua Bidang Polhukam DPW PKS	Jl. Z. Arifin no.07 RT.05 RW.02 Kel. Dusun Besar, Kec. Singaranpati, Kota Bengkulu
56.	Martoni, S.H.I.	DPW PKS Bengkulu 2	Ketua DED Kabupaten Seluma	Jalan Bendungan Hulu No. 80 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Bengkulu
57.	Panji Brata Kusuma, S.H.	DPW PKS Bengkulu 3	Anggota Bid Polhukam DPW PKS Bengkulu	Jl Husni Thamrin Gang Manggis Dusun III Desa Karang Anyar II Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
58.	Drs. H. Deden Kurnaedi, S.Ag., S.H., M.M.	DPW PKS Sumatera Selatan 1	Sekretaris DSW PKS Sumatera Selatan	Perum PNS Pemkot Jl. Melati Blok GG No.22 , Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang Sumatera Selatan
59.	Martadinata, S.Pd., S.H.	DPW PKS Sumatera Selatan 2	Sekretaris Komisi Penegak Disiplin DSW PKS Sumatera Selatan	Jl. Soak Permai Komp. Arisma Sejahtera Blok L 14A Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota



NO	NAMA+GELAR	ASAL/UTUSAN	JABATAN	ALAMAT DOMISILI
				Palembang Sumatera Selatan
60.	Darussalam, S.H.	DPW PKS Sumatera Selatan 3	Sekretaris DED PKS Kota Palembang	Lr. Kota Baru No.378 , Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan
61.	Aldy Putranto, S.H.,MAPPI.	DPW PKS Kep. Bangka Belitung 1	Koordinator Tim Hukum DPW	Jl Hayati I Desa Kace Timur Kec Mendo Barat, Kab Bangka Provinsi Bangak Belitung
62.	Ihsan Abdillah, S.H.	DPW PKS Kep. Bangka Belitung 2	Staf Bidang Polhukam DPW PKS Babel	Pangkalpinang
63.	Syaidah Irma, S.H.	DPW PKS Kep. Bangka Belitung 3	Tim Advokasi Hukum DPW	Desa nibung, kec. Koba, kab.bangka tengah, prov. Bangka belitung
64.	Sultan, S.H.,M.H.	DPW PKS Lampung 1	Polhukam DPW PKS Lampung	Lk. Pringombo III, Pringsewu Timur, Pringsewu, Kab. Pringsewu, Lampung
65.	Ampria Bukhori, S.H.,M.H.	DPW PKS Lampung 2	DSW PKS Lampung	Jl. Komaruddin Perumahan Nunyai Permai Blok A No 22 Kel Rajabasa Raya, Kec Rajabasa Kota Bandar Lampung
66.	Galih Achmad Nasukhah, S.H.I.,M.H.	DPW PKS Lampung 3	Sekretaris Polhukam Lampung Timur	Dusun II 003/002 Tulung Pasik Kec Mataram Baru Lampung Timur Lampung
67.	Riki Martim, S.H.,CLA	DPW PKS Banten 1	Sekretaris Bid Polhukam Dpd kota Tangerang	Jalan Pisang Raya No.11, Rt 1 Rw 18, Kelurahan Cibodasari, Kec.Cibodas, Kota Tangerang
68.	Deni Wisnu, S.H.I.,M.H.	DPW PKS Banten 2	Tim Hukum DPW	Kp. Hunyur, Desa. Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang
69.	Neneng Annisa Rahmah, S.H.	DPW PKS Banten 3	Tim Hukum DPW	Kp. Ciinjuk, Desa Ciinjuk, Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Banten
70.	Fahmi Ali Ramdhani, S.H.,M.H.	DPW PKS Jawa Barat 1	Ketua Deputi Hukum PKS Jawa Barat	Jalan Kavling P&K No 7, Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi

NO	NAMA+GELAR	ASAL/UTUSAN	JABATAN	ALAMAT DOMISILI
71.	Hikmat Prihadi, S.H.	DPW PKS Jawa Barat 2	Tim Hukum DPW	Jl. Srimahi III No.31 Kota Bandung
72.	R. Suyadi, S.H.	DPW PKS Jawa Barat 3	Tim Advokasi	Perum Palasari 2 blok C 12. Sukamantri, ciawi Tasikmalaya
73.	Mustafa M. Yacob, S.Pd.i, S.H, CPM	DPW PKS DKI Jakarta 1	Koordinator Tim Hukum DPW	Jalan Gandaria No 10A, Jagakarsa Jakarta Selatan
74.	Rizki Masapan, S.H.	DPW PKS DKI Jakarta 2	Anggota Tim Hukum DPW	Jl. Kampung Baru VII No. 22, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan
75.	H. Zulfadillah, S.H.	DPW PKS DKI Jakarta 3	Ka biro Advokasi BP3 DPD PKS Jakarta Barat	Jl. Musyawarah III No 39, Kel. Kebon Jeruk, Jakarta Barat
76.	Eka Pala Suryana, S.H.,M.H.	DPW PKS Jawa Tengah 1	Kabid Hukum dan KP DPD	Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah
77.	Nadiya Ulfa S.H.	DPW PKS Jawa Tengah 1	Polhukam	Wuryantoro Kidul RT 001 RW 001 Wuryantoro, Kec. Wuryantoro, Kab Wonogirinya
78.	Ahmad Nur Rois, S.H.	DPW PKS Jawa Tengah 3	Polhukam Kabupaten Pati	Desa Kayen Rt 009 Rw 003, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
79.	Imam Rizki Pratama, S.H.	DPW PKS D.I. Yogyakarta 1	Anggota Divisi Polhukam DPW DIY	Perum Griya Citra Kav. 6, Ds Klaseman, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman
80.	Wawan Andriyanto, S.H., C.Me.	DPW PKS D.I. Yogyakarta 2	Koordinator Tim Hukum DPW	Karangmojo A, RT017RW005, Grogol, Paliyan, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta
81.	Hangga Sudewo, S.H.	DPW PKS D.I. Yogyakarta 3	Anggota Tim Hukum DPW	Perumahan Graha Hinggil A11, RT 06, Pedukuhan Ngrame, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kab Bantul, DIY
82.	Arip Imawan, S.H.,M.H.CM, SHEL	DPW PKS Jawa Timur 1	Deputi Hukum Polhukam DPW PKS Jawa Timur	JL Raya Putatlor No.114 Menganti, Gresik

NO	NAMA+GELAR	ASAL/UTUSAN	JABATAN	ALAMAT DOMISILI
83.	Imam Sutopo, S.H.	DPW PKS Jawa Timur 2	Sekretaris bidang polhukam DPD kota Malang	Jl. Gatot Subroto, V/2264, Jodipan, Blimbing, Kota Malang
84.	Nurul Fariati, S.H.	DPW PKS Jawa Timur 3	Sekretaris MPD DPD Bangkalan	Jl. Pelabuhan Kel Pangeranan, Bangkalan, Bangkalan
85.	Dr. Muhammad Wiman Wibisana, S.H.,M.H.	DPW PKS Bali 1	Koordinator Tim Hukum DPW	Jl. Batu No 38 Jagakarsa
86.	Kemas Muhammad Ali Utih, S.Ag.	DPW PKS Bali 2	Bendahara DPD Badung	Dalung permai br.bhineka Nusa kauh blok O no 3 Kuta Utara Badung
87.	Muhammad Abizar Al Ghifari Musya, S.H.	DPW PKS Bali 3	Anggota Tim Hukum DPW	KP Cipetir RT 003 RW 004 Ds Cipetir Kec Cibeber, Kab Cianjur
88.	Muhammad Ahyar, S.H.	DPW PKS Nusa Tenggara Barat 1	Kabid Polhukam	Jalan Batu Bolong 1 No 3 Perumahan Gria Pagutan Indah. Mataram
89.	Sunandar PS., S.H.,M.H.	DPW PKS Nusa Tenggara Barat 2	BP3	Jalan Sunan Sudar Lingkungan kebon jaya barat Monjok Mataram
90.	Nurwahidah, S.H.	DPW PKS Nusa Tenggara Barat 3	Tim Hukum DPW	Jl. KH. Mansyur IV Dasan Sari Rt 004 Rw 038 Kebunsari Ampenan
91.	Syarif Pati Pilohi, S.H.	DPW PKS Nusa Tenggara Timur 1	Koordinator Tim Hukum DPW	Desa Balauring Kec Omesuri, NTT
92.	Syamsul Syamsuddin Ali, S.H.	DPW PKS Nusa Tenggara Timur 2	Anggota Tim Hukum	Jl. Kenari, Naikoten Satu, Kotaraja, Kota Kupang, NTT
93.	Akhmad Bumi, S.H.	DPW PKS Nusa Tenggara Timur 3	Anggota Tim Hukum	Kolhua, RT. 017/006, Maulafa, Kota Kupang, NTT
94.	Deky Mulyadi, S.H.	DPW PKS Kalimantan Barat 1	Ketua DPD PKS Kabupaten Mempawah	Jln. Baburrahman RT 014 Rw 007 Desa Pasir Pasi Panjang

NO	NAMA+GELAR	ASAL/UTUSAN	JABATAN	ALAMAT DOMISILI
95.	Dwi Histiningrum, S.H.	DPW PKS Kalimantan Barat 2	Sekretaris Bidang Hukum, Kebijakan Publik dan Ketenagakerjaan DPD PKS Kubu Raya	Jalan Raya Sungai Kakap KM 7 GG. Bersama Kabupaten Kubu Raya
96.	Emisah, S.H.	DPW PKS Kalimantan Barat 3	Staff bidang hukum dan kebijakan publik DPD Kota Pontianak Kota Pontianak	Gang Beringin RT 31 RW 04
97.	Suntin Yono, S.H.	DPW PKS Kalimantan Selatan 1	Kabid Polhukamnaker DPW PKS Kalsel	Jln. Ir. P. H. M. Noor Gang Marga Rukun Rt. 32 No. 46 Kelurahan Pelambuan
98.	Suyadi, S.H.	DPW PKS Kalimantan Selatan 2	Ketua MPD PKS Kab. Tanah Bumbu	Jl. Pangeran Antasari, Batuah, Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
99.	Ibnu Saleh, S.H.	DPW PKS Kalimantan Selatan 3	Tim Hukum dan Advokasi DPW	Jl. Tambak Bitin No 96 RT.001 RW.001 Desa Tambak Bitin, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
100	Rusdi Agus Susanto, S.H.	DPW PKS Kalimantan Tengah 1	Ketua Bidang Hukum, Kebijakan Publik, dan Ketenagakerjaan	JL. RTA MILONO KOMP. BAMA RAYA IV NO. 135
101	Muhamad Budiono, S.H.	DPW PKS Kalimantan Tengah 2	Sekretaris Bidang Hukum, Kebijakan Publik, dan Ketenagakerjaan	Jl. Kalibata 2a No.5
102	Aminanto, SP.	DPW PKS Kalimantan Tengah 3	Kabid Kepanduan	Jl G Obos XIV Gang Keluarga A RT 15 Kel Menteng Kec Jekan Raya Kota Palangka Raya
103	Budi Jatmiko, S.E., S.H.	DPW PKS Kalimantan Timur 1	Ketua Komdis DSW Kaltim	Perumahan Grand Taman Sari Cluster Kakaban H10/06 Samarinda Kaltim

NO	NAMA+GELAR	ASAL/UTUSAN	JABATAN	ALAMAT DOMISILI
104	Joko Sulistiono, S.H., M.H.	DPW PKS Kalimantan Timur 2	Polhukam Samarinda	Jl. Juanda 4 RT.60 No.13, Kel. Sidodadi, Kec.Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur
105	Muhammad Iqbal, S.H.	DPW PKS Kalimantan Timur 3	Polhukam DPW PKS Kaltim	Jalan Merdeka 5
106	Hazlan, S.H.	DPW PKS Kalimantan Utara 1	Ketua Tim Hukum DPW	Jl Gelora Kp Enrekang
107	Yusri, S.H.	DPW PKS Kalimantan Utara 2	Anggota Tim Hukum	Jl. Kanduangan Rt. 012 Rw. 000 Sekaduyan Taka - Sei Mangaris - Nunukan
108	Jaya Wardana, S.H.	DPW PKS Kalimantan Utara 3	Anggota Tim Hukum	Jl. Lembasung Rt. 097 Rw. T036 Tanjung Selor Hilir - Tanjung Selor - Bulungan
109	Muhammad Fadhly Gella, S.H.,M.H.	DPW PKS Gorontalo 1	Koordinator Tim Hukum DPW	Desa Ulanta, Kec Suwawa, Kab Bone Bolango
110	Fricilia Jelita Wartabone, S.H.,M.H.	DPW PKS Gorontalo 2	Anggota Tim Hukum DPW	Desa Ulanta, Kec Suwawa, Kab Bone Bolango
111	Muhammad Sayyid Kamil Adam, SH	DPW PKS Gorontalo 3	Anggota Tim Hukum DPW	Perum Awara Karya, kel. liluwo, kec. kota tengah, Kota Gorontalo
112	Budiman Mubar, S.H.,M.H.	DPW PKS Sulawesi Selatan 1	Anggota MPW Sulawesi Selatan	Citra Sidang Indah X8 No. 11, Kel. PAI, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar
113	Agung Syaputra, S.H.	DPW PKS Sulawesi Selatan 2	Bidang Hukum DPW SulSel	Jl. Jendral Sudirman, RT.001/RW.001, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo
114	Sarifuddin, S.H.	DPW PKS Sulawesi Selatan 3	Anggota Tim Hukum DPW	Komp. PK BTN mangasa Blok E-1 No. 6, Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
115	Rahman Pulani, S.H.	DPW PKS Sulawesi Tenggara 1	Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah	Jl. RA Kartini, Kendari Caddi, Kendari, Kota

NO	NAMA+GELAR	ASAL/UTUSAN	JABATAN	ALAMAT DOMISILI
				Kendari, Sualwesi Tenggara
116	Sudiami, S.H.	DPW PKS Sulawesi Tenggara 2	Humas DPW PKS Sultra	BTN Bukit Cempaka, Kel, Lepo-lepo, Kec.Baruga, Kota Kendari, Sultra
117	Djumrin, S.H.	DPW PKS Sulawesi Tenggara 3	Tim Advokasi DPW	Jln cendrawasih, Kelurahan Nambo, kota kendari
118	Abdul Rasyid	DPW PKS Sulawesi Tengah 1	Ketua DPD	Jl. Banawa Kelurahan Maleni
119	Amal Hamsah, S.H.	DPW PKS Sulawesi Tengah 2	Anggota Bidang Hukum DPD PKS Banggai	Luwuk Banggai
120	Sudirman Anas, S.E.,M.Ak.	DPW PKS Sulawesi Tengah 3	Wakil Sekretaris DPW	Jl. Kijang 4 Utara No. 16 Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah
121	Muhammad Azwar Dukalang, S.E.	DPW PKS Sulawesi Utara 1	Ketua Bid. Hukum DPW Sulawesi Utara	Jalan batu kota Winangun satu lingk 1V No 104 kecamatan Malalayang kota Manado Provinsi Sulawesi Utara
122	Abdurahman Hamisi, S.H.	DPW PKS Sulawesi Utara 2	Sekretaris DPD	Jl. Mimosa, Mogolaing, Kotamobagu Barat
123	Wahyu Akbar Thalib, S.H.	DPW PKS Sulawesi Utara 3	Ketua BP3 DPW Sulut	RT. 4 Dusun II, Desa Tapa Aog, Kec Lolayan
124	Andi Hamdiah, S.H.,M.Hum	DPW PKS Sulawesi Barat 1	Koordinator Tim Hukum DPW	BTN H Basir F4-6 Rt 004 Rw. 000 Simboro - Simboro - Mamuju
125	Atry Fadly B, S.H.	DPW PKS Sulawesi Barat 2	Tim Hukum DPW	Jl. Insinyur H. Juanda No. 3 Mamunyu - Mamuju
126	Syamsul Bahri, SH	DPW PKS Sulawesi Barat 3	Tim Hukum DPW	BTN Legenda Garden Permai Blok F/13 Simboro - Simboro dan Kepulauan - Mamuju
127	Dudi Usman Sahupala, S.H.,M.H.	DPW PKS Maluku 1	Koordinator Tim Hukum DPW	Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku
128	Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I.	DPW PKS Maluku 2	Tim Hukum DPW Maluku	Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku

NO	NAMA+GELAR	ASAL/UTUSAN	JABATAN	ALAMAT DOMISILI
129	Sahri Mewar, S.H.	DPW PKS Maluku 3	Tim Hukum DPW Maluku	Desa Elara, Ambalau, Kab. Buru Selatan, Maluku
130	Sri Astuti A. Kadir, S.H.	DPW PKS Maluku Utara 1	Tim Hukum DPW PKS Malut	Jl. Raya Soasio Rum Rt 003 Rw 02 Seli - Tidore
131	Furkan Abdullah, S.H.	DPW PKS Maluku Utara 2	Tim Hukum DPW PKS Malut	Desa Gam Ici, Kec. Ibu, Kab. Halbar
132	Isra Safar, S.H.	DPW PKS Maluku Utara 3	Anggota polhukam	Kel. Kayu Mera, kota ternate
133	Muhammad Mujaini, S.E., M.M.	DPW PKS Papua 1	Tim Advokasi DPW Papua	Jl Furia Puskopad Kotaraja Rt. 002 Rw 05 Wahno - Abepura - Kota Jayapura
134	Kusanto	DPW PKS Papua 2	Tim Advokasi DPW Papua	Jl. Niho Rt. 002 Rw. 06 Dobonsolo - Sentani
135	Abdul Naim, S.H.	DPW PKS Papua 3	Tim Advokasi DPW Papua	Jl. Merah Putih Waena Rt 001 Rw 05 Waena - Heram - Kota Jayapura
136	Edi Sumardi, S.H.	DPW PKS Papua Barat 1	Ketua Bidang Humas	Jl. Lembah Hijau Gang Oridex 2 RT OO2 RW 013 Wosi Manokwari Barat
137	Masrawi Arianto, A.Md.	DPW PKS Papua Barat 2	Kabid BP3	Manokwari
138	Resky Arisal, S.Pd.	DPW PKS Papua Barat 3	Sekretaris DPD PKS Manokwari	Kampung Soribo. Wosi
139	Tuwarno	DPW PKS Papua Selatan 1	Anggota Tim Hukum dan Advokasi	Jl. Yawati RT 15 RW 005 Kel. Samkai, Kec. Merauke, Kab Merauke, Papua Selatan
140	Andika Saputra, S.H.	DPW PKS Papua Selatan 2	Ketua Bidang Hukum dan HAM DPW PKS Merauke	Jl. Natuna No 31 Kel Karang Indah, Kab Merauke
141	Purwanto, A.Md.	DPW PKS Papua Selatan 3	Sekretaris MPD	Jl. Nusa barong-merauke-papua selatan
142	Aleks Pigai, M.Pd.	DPW PKS Papua Tengah 1	Tim Advokasi DPW Papua Tengah	Jl. Mandala Rt. 018 Rw 002 Kalibobo - Nabire
143	Khairil Amrillah	DPW PKS Papua Tengah 2	Tim Advokasi DPW Papua Tengah	Jl. Pepera No 18 KarangMulia - Nabire

NO	NAMA+GELAR	ASAL/UTUSAN	JABATAN	ALAMAT DOMISILI
144.	Junaidi, S.Sos.I.	DPW PKS Papua Tengah 3	Ketua BKK DPD Mimika Papua	Tlmika, Mimika Papua Tengah
145.	Nioluen Kotouki	DPW PKS Papua Pegunungan 1	Anggota Tim Advokasi Hukum DPW	Jayapura
146.	Domiles Wanimbo	DPW PKS Papua Pegunungan 2	Wakil Ketua DPD PKS Tolikara	Kuari, Umaga, Kab. Tolikara, Papua Pegunungan
147.	Muhammad Firdaus Abduh, M.Si.	DPW PKS Papua Pegunungan 3	Tim Advokasi PKS DPW Papua Pegunungan	Jayapura, Papua Pegunungan
148.	Ahmad Rizal Kurniawan, S.H.,M.H.	DPW PKS Papua Barat Daya 1	Tim Advokasi DPW Papua Barat Daya	Jl Anggrek Raya 10 RT.04 RW 06, Klawuyuk, Sorong Timur
149.	Riki Sambora, S.H.	DPW PKS Papua Barat Daya 2	Tim Advokasi DPW Papua Barat Daya	Jl. TPU km10
150.	Kurniawan, S.H.,M.H.	DPW PKS Papua Barat Daya 3	Tim Advokasi DPW Papua Barat Daya	BTN Minasa Upa Blok D5 No 15 Rt. 003 Rw. 05 Minasa Upa - Rappocini

Pada :
Hari/Tanggal : Senin s.d. Kamis
: 8 s.d. 11 Mei 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
Jl. Raya Puncak KM 83, Cisaura, Bogor.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Sebagai Peserta Rapat perwakilan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS).

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 April 2023

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**
Sekretaris Jenderal,


ABOE BAKAR ALHABSYI

**DAFTAR PESERTA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI Keadilan Sejahtera**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	PENDIDIKAN
1	Rizki Masapan, S.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
2	Faudjan Muslim, S.H.	Laki-laki	DPP PKS	D.K.I. JAKARTA	S1
3	H. Zulfadillah, S.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
4	Rusdi Agus Susanto, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
5	Lilis Nurmalasari, S.Sy., CP	Perempuan	DPW Riau	RIAU	S1
6	Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si	Laki-laki	DPP PKS	D.K.I. JAKARTA	S2
7	Joko Fitrian Prabowo, S.H.	Laki-laki	DPP PKS	D.K.I. JAKARTA	S2
8	Akhmad Bumi, S.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Tim	NUSA TENGGARA TIMU	S1
9	Neneng Annisa Rahmah, S	Perempuan	DPW Banten	BANTEN	S1
10	Muhamad Budiono, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
11	Aminanto, SP.	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
12	Hoirullah, S.Sy., M.H.	Laki-laki	DPP PKS	D.K.I. JAKARTA	S2
13	Furkan Abdullah, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
14	Isra Safar, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
15	Dudi Usman Sahupala, S.H	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S2
16	Imam Rizki Pratama, S.H.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
17	Nuharman, S.H.	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGKULU	S1
18	Muhammad Firdaus Abdu	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	S2
19	Abdul Naim, S.Pd.	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	S1
20	Budiman Mubar, S.H., M.H	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S2
21	Kusanto, S.Pd.I.	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	S1
22	Kurniawan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S2
23	Muhammad Mujaini, S.E.,	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	S2
24	Ferlan Niko, S.H.I., M.Sy.	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S2
25	Khairil Amrillah, S.Pd.I.	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
26	Arip Imawan, S.H., M.H., C	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
27	Dr. Azzuhri Al Bajuri, S.H.I	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S3
28	Mustafa M. Yacob, S.Pd.I.,	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
29	Imam Sutopo, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
30	Nurul Fariati, S.H.	Perempuan	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
31	Fardy Iskandar, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S2
32	Joko Sulistiono, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S2
33	Agung Syaputra, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
34	Panji Brata Kusuma, S.H.	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGKULU	S1
35	Reza Revorma Putra Alam	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
36	Rahman Pulani, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
37	Martoni, S.H.I.	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGKULU	S1
38	Putri Amalia, S.H.	Perempuan	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
39	Amal Hamsah, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
40	Sahri Mewar, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S1
41	Umar Bassam, S.H.	Laki-laki	DPP PKS	JAWA BARAT	S1
42	Khalid Dhiya Ul Haqq, S.H.	Laki-laki	DPP PKS	RIAU	S1
43	Darmiyanto, S.H.	Laki-laki	DPP PKS	D.K.I. JAKARTA	S1
44	Syarif Pati Pilohi, S.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Tim	NUSA TENGGARA TIMU	S1

45	Djumrin, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
46	Aleks Pigai, M.Pd.	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S2
47	Junaidi, S.Sos.I.	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
48	Sabarrudin, S.H., M.Kn.	Laki-laki	DPP PKS	D.K.I. JAKARTA	S2
49	Resky Arisal, S.Pd.	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
50	Nardi Wiharto, S.H.	Laki-laki	DPP PKS	D.K.I. JAKARTA	S1
51	Edi Sumardi, S.H.	Laki-laki	DPW PKS Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
52	Sudiami, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
53	Suntin Yono, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
54	Ernawati, S.H., M.H.	Perempuan	DPP PKS	NUSA TENGGARA BARA	S2
55	Purwanto, A.Md.	Laki-laki	DPW Papua Selatan	PAPUA SELATAN	DIII
56	Nurfadhilah Rizmi, S.H.	Perempuan	DPP PKS	JAWA BARAT	S1
57	Julita, S.H.	Perempuan	DPP PKS	D.K.I. JAKARTA	S1
58	Rismaya Nurbaity, S.H.	Perempuan	DPP PKS	JAWA BARAT	S1
59	Tuwarno	Laki-laki	DPW Papua Selatan	PAPUA SELATAN	SMA
60	Firda Faradillah, S.H.	Perempuan	DPP PKS	SUMATERA UTARA	S1
61	Suyadi, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
62	Della Haerunisa, S.H.	Perempuan	DPP PKS	JAWA BARAT	S1
63	Ibnu Saleh, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
64	Andika Saputra, S.H.	Laki-laki	DPW Papua Selatan	PAPUA SELATAN	S1
65	Drs. H. Deden Kurnaedi, S.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S2
66	Muhammad Ahyar, S.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Bara	NUSA TENGGARA BARA	S1
67	Budiman Putra, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
68	Martadinata, S.Pd., S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
69	Darussalam, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
70	Nurwahidah, S.H.	Perempuan	DPW Nusa Tenggara Bara	NUSA TENGGARA BARA	S1
71	Sunandar PS, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Bara	NUSA TENGGARA BARA	S2
72	Ramlan Damanik, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
73	Dede, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
74	Masrizal, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
75	Sufrizal Lubis, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
76	Eka Pala Suryana, S.H., M.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
77	Isnu Harjo Prayitno, S.H., M	Laki-laki	DPP PKS	BANTEN	S2
78	Nadiya Ulfa, S.H.	Perempuan	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
79	Deni Wisnu, S.H.I., M.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S2
80	Ahmad Nur Rois, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
81	Andi Hamdiah, S.H., M.Hu	Perempuan	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S2
82	Riki Martim, S.H., CLA.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
83	ATRI FADLY B, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
84	Sri Astuti A. Kadir, S.H.	Perempuan	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
85	Dwi Histiningrum, S.H.	Perempuan	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
86	Ahmad Rizal Kurniawan, S	Laki-laki	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S2
87	Mohammad Indra Kelana,	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
88	Emisah, S.H.	Perempuan	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
89	RIJALUN SHOLIHIN SIMAT	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
90	Syamsul Bahri, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
91	Andes Robensyah, S.H.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
92	Hardiyansyah, S.H.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
93	Deky Mulyadi, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
94	Riki Sambora, S.H.	Laki-laki	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S1

95	Dr. Muhammad Wiman W	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S3
96	Mulyanto, S.H.I., M.H.	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S2
97	Muhammad Sayyid Kamil	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	SMA
98	Kemas Muhammad Ali Uti	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S1
99	Muhammad Fadhly Gella,	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S2
100	Fricilia Jelita Wartabone, S	Perempuan	DPW Gorontalo	GORONTALO	S2
101	Muhammad Abizar Al Ghif	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S1
102	Ihsan Abdillah, S.H.	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
103	Aldy Putranto, S.H., MAPP	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
104	Syaidah Irma, S.H.	Perempuan	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
105	Hazlan, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
106	Yusri, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
107	Basrizal, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP PKS	JAWA BARAT	S2
108	R. Hikmat Prihadi, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
109	Ismail Nganggon, S.H.	Laki-laki	DPP PKS	D.K.I. JAKARTA	S1
110	Faisal, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S2
111	Muhammad Arnif, S.H.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
112	Fahmi Ali Ramdhani, S.H.,	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
113	Shalihin Alamsyah Putra, S	Laki-laki	DPP PKS	NUSA TENGGARA TIMU	S1
114	Muhammad Azwar Dukala	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
115	Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn	Perempuan	DPP PKS	D.K.I. JAKARTA	S2
116	R. Suyadi, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
117	Muhammad Syarif Hidayat	Laki-laki	DPP PKS	NUSA TENGGARA TIMU	S1
118	Tulus Wahjuono, S.H., M.H	Laki-laki	DPP PKS	JAWA TIMUR	S2
119	Hawari Muhammad, S.H.,	Laki-laki	DPP PKS	JAWA TIMUR	S2
120	Mansur Naga, S.H.	Laki-laki	DPP PKS	D.K.I. JAKARTA	S1
121	Arah Madani, S.H.	Laki-laki	DPP PKS	D.K.I. JAKARTA	S1
122	Taufik Hidayat, S.H.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
123	Ruli Margianto, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP PKS	BANTEN	S2
124	Heru Julianto, S.H.	Laki-laki	DPP PKS	JAWA BARAT	S1
125	Seta Mahardika Caesar W	Laki-laki	DPP PKS	JAWA TIMUR	S2
126	Ampria Bukhori, S.H., M.H	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S2
127	Sultan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S2
128	Galih Achmad Nasukhah, S	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S2
129	Edius Pratama, S.H.	Laki-laki	DPP PKS	LAMPUNG	S1
130	Syamsul Syamsuddin Ali, S	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Tim	NUSA TENGGARA TIMU	S1
131	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	Perempuan	DPP PKS	D.K.I. JAKARTA	S1
132	Deviyanti Dwiningsih, S.H.	Perempuan	DPP PKS	JAWA BARAT	S2
133	H. Anton Hariyadi, S.H., M	Laki-laki	DPP PKS	D.K.I. JAKARTA	S2
134	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H	Laki-laki	DPP PKS	JAWA BARAT	S1
135	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP PKS	JAWA BARAT	S2
136	Suminarso	Laki-laki	DPP PKS	BANTEN	S1
137	Ali Wiji Edhy, S.H.	Laki-laki	DPP PKS	D.K.I. JAKARTA	S1
138	Khairul Anwar Hasibuan, S	Laki-laki	DPP PKS	SUMATERA UTARA	S2
139	Busyraa, S.H.	Laki-laki	DPP PKS	D.K.I. JAKARTA	S1
140	Unggul Wibawa, S.E., M.A	Laki-laki	DPP PKS	BANTEN	S2
141	Sudirman Anas, S.E., M.Ak	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S2
142	Abdul Rasyid	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	SMA
143	Amir Hamzah Sihombing, S	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
144	Malik Raudhi Tuasamu, S.	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S1

145	Maryono, S.H., CGP.	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	D.K.I. JAKARTA	S1
146	Arya Jagad Pamungkas	-		JAWA BARAT	-
147	Sukiswo	-		D.K.I. JAKARTA	-
148	Abdul Mamat Irawan	-		D.K.I. JAKARTA	-
149	Muhammad Fathur	-		D.K.I. JAKARTA	-
150	Abdul Rojak	-		D.K.I. JAKARTA	-
151	Defrizal	-		D.K.I. JAKARTA	-